

BAB – VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan pada RPJMD Tahap ke-2 Tahun 2009-2013, maka RPJMD ke-3 Tahun 2013-2018 ditujukan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Sejalan dengan tercipta dan terpeliharanya rasa aman, damai dan tumbuhnya demokratisme masyarakat yang ditandai dengan semakin berkembangnya nilai-nilai demokrasi ditengah-tengah masyarakat serta tumbuhnya sumberdaya manusia yang berkualitas hasil dari pembangunan jangka menengah tahap-I (RPJMD Transisi Tahun 2006-2009) dan tahap-II (RPJMD Tahun 2009-2013), maka Provinsi Sumatera Utara sudah berada pada posisi yang cukup baik untuk menumbuhkan dan memacu daya saing melalui transformasi daya saing komparatif berbasis sumberdaya alam menjadi daya saing kompetitif berbasis sumberdaya manusia.

Untuk itu, pemantapan struktur ekonomi dan keseimbangan persebaran pertumbuhan sektor-sektor melalui peningkatan keterpaduan sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dengan sektor pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya (sektor primer) dan sektor jasa-jasa yaitu keuangan, perdagangan, dan transportasi (sektor tersier) yang didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan akan menciptakan daya saing yang tangguh bagi Sumatera Utara. Ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata ruang yang meliputi mantapnya jaringan jalan terutama kearah kantong-kantong produksi dan daerah pemasaran, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal (tersedia sepanjang hari) dan efisien (tarif yang realistik) baik untuk kebutuhan industri/sektor bisnis maupun rumah tangga, tersedia pasokan air baik air minum/bersih maupun air irigasi merupakan kondisi penting lainnya yang harus dijamin pemenuhannya melalui pembangunan tahap ketiga ini.

Pembudayaan penggunaan teknologi informasi baik dalam pemerintahan maupun di dunia pendidikan, organisasi bisnis dan lain-lain diharapkan dapat ditumbuhkembangkan dengan baik. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah akan memberikan dukungan dan motivasi kepada lembaga-lembaga yang membangun infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kemampuan aksesnya terhadap informasi.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penetapan Kebijakan Umum dan program pembangunan berdasarkan urusan yang disesuaikan dengan Visi dan Misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan, yang meliputi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan maka kebijakan umum pelaksanaan dan program pembangunan akan dilaksanakan melalui :

7.1.1. Kebijakan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan

Kebijakan pelayanan administrasi umum pemerintahan ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur, terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin aparatur

4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.1.2. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 1 : *Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)*

Kebijakan umum untuk mencapai Misi-1 adalah : Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah; Meningkatkan koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah; Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara; Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Mengelola sumber daya manusia aparatur dan pembinaan administrasi kependudukan; Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; melalui *penerapan e-Government meliputi e-procurement, e-office, e-planning, e-budgeting, dan e-performance* ;Memanfaatkan dan Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan dan aplikasi lainnya; Peningkatan Kesadaran masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan, anak dan Keluarga Berencana Meningkatkan cakupan layanan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB); Peningkatan sadar akan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan; Meningkatkan potensi PAD yang belum tergal dari sektor-sektor yang dimungkinkan dalam UU Nomor 28 tahun 2009; melakukan percepatan penyusunan dokumen anggaran, penatausahaan dan realisasi anggaran; melakukan telaahan terhadap kondisi ketersediaan bahan pangan dan laju harga; melakukan pembinaan kepada BUMD yang sahamnya dimiliki Pemprov; Menumbuhkembangkan pusat riset pengkajian ilmu dan penerapan teknologi; mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional dan luar negeri; Meningkatkan daya tarik investasi melalui penciptaan iklim berusaha yang kondusif; mengembangkan pendidikan dan pelatihan; mengembangkan link and match dengan dunia usaha; Mendorong hak sipil dan politik warga; Memberikan ruang partisipasi public di dalam pembangunan; Mendorong dan memberikan ruang kepada DPRD untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya/hak inisiatifnya; Mendorong dan memfasilitasi penegakan hukum secara konsisten ; Mengefektifkan koordinasi penegakan hukum untuk mengurangi pelanggaran hukum; Meningkatkan dan penerapan produk hukum yang adil dan berwibawa melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dan perlindungan masyarakat, pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat ; Peningkatan kualitas perencanaan daerah ; pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; peningkatan kinerja perencanaan penataan ruang;

Sedangkan program-program untuk mewujudkan Misi ke-satu berdasarkan urusan adalah :

A. Urusan Perencanaan Pembangunan :

7. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah
8. Program Pengembangan Data dan Informasi
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh
11. Program Perencanaan Penataan Ruang

B. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian:

12. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
13. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
14. Program Pemeliharaan dan pengelolaan Bangunan Gedung Negara
15. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
16. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
17. Program Peningkatan Pelayanan Publik

18. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
19. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
20. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
21. Program Penataan Administrasi Kependudukan
22. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan daerah
23. Program Peningkatan Peran BUMD
24. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
25. Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
26. Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur
27. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
28. Program Kepemerintahan Yang Baik
29. Program Pembinaan Otonomi Daerah
30. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
31. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
32. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
33. Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana
34. Program Perencanaan Hukum
35. Program Pembinaan Peraturan Daerah
36. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia
37. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum
38. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum
39. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik
40. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
41. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
42. Program Peningkatan Pelayanan Persidangan dan Risalah
43. Program Peningkatan Pengembangan Persidangan dan Risalah
44. Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
45. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah
46. Program Desiminasi Informasi Teknologi
47. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
48. Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor
49. Program Peningkatan Retribusi Daerah
50. Program Peningkatan Pajak Air Permukaan
51. Program Peningkatan Pajak Rokok Daerah
52. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
53. Program Pendidikan Kedinasan
54. Program Pembinaan Mental dan Rohani Anggota KORPRI dan keluarga
55. Program Pembinaan Olahraga, Seni dan Budaya Anggota KORPRI dan keluarga
56. Program Pembinaan Usaha dan Keterampilan Anggota KORPRI dan keluarga

C. Urusan Penanaman Modal :

57. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
58. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah
59. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
60. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
61. Program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

D. Urusan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat

62. Program Pendidikan Politik Masyarakat
63. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal
64. Program Peningkatan Penegakan Perda

E. Urusan Komunikasi dan Informatika :

- 65. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 66. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi
- 67. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan antar Lembaga
- 68. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
- 69. Program Pengawasan Isi Siaran
- 70. Program Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran

F. Urusan Kearsipan :

- 71. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- 72. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi kearsipan

Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 1

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab			
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
Misi-1 : Membangun Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)											
Tujuan -1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik											
1	Sasaran Utama : Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum	Strategi : 1. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)	Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah	1 Kualifikasi SDM aparatur (Jumlah pegawai berpendidikan Menengah, Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2/S3)			24. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD		
S1				4.307 pegawai	4.357 pegawai						
S2				698 pegawai	724 pegawai						
S3				9 pegawai	14 pegawai						
2 Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan formal				300 pegawai	400 pegawai						
3. Terbinanya Mental dan Rohani Anggota KORPRI dan keluarga				5.920 orang	29.600 orang	54. Program Pembinaan Mental dan Rohani Anggota KORPRI dan keluarga				Pemerintahan Umum	Sekretariat KORPRI
4. Terbinanya kesadaran PNS dalam berolahraga, seni dan Budaya				7.710 orang	58.550 orang	55. Program Pembinaan Olahraga, Seni dan Budaya Anggota KORPRI dan keluarga				Pemerintahan Umum	Sekretariat KORPRI
5. Terbinanya usaha dan keterampilan serta bantuan kepada anggota KORPRI dan keluarga	900 orang	4.500 orang	56. Program Pembinaan Usaha dan Keterampilan Anggota KORPRI	Pemerintahan Umum	Sekretariat KORPRI						

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						dan keluarga		
		2. Peningkatan koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah	1 Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WTP	27. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Pemerintahan Umum	Inspektorat
			2 Indeks Persepsi Korupsi (Jumlah Kasus Korupsi Keuangan Daerah)	26 Kasus	5 Kasus	27. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Pemerintahan Umum	Inspektorat,
			3 Tersedianya dokumen KUA dan PPAS (dokumen)	1 Dokumen	5 Dokumen	22. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Administrasi keuangan daerah	Biro Keuangan
		3. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	C	B	27. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Pemerintahan Umum	Biro Administrasi Pemerintahan
		4. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Persentase SKPD Provinsi menerapkan SPIP	10 %	75 %	27. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Pemerintahan Umum	Inspektorat Provinsi
		5. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	1 Jumlah diklat teknis yang dilaksanakan dalam setahun	43 Diklat	215 Diklat	52. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Pemerintahan Umum	Badan Diklat

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			2 Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan dalam setahun	4 kali	20 kali	24. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD
			3 Jumlah Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota	52 SKPD 33 Kab/Kota	52 SKPD 33 Kab/Kota	25. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Pemerintahan Umum	Biro Organisasi
			4 Jumlah Pelayanan Informasi Kemitraan	99 kali	655 kali	67. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan antar Lembaga	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			5 Jumlah lembaga penyiaran televisi yang dibina	16 lembaga	16 lembaga	67. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan antar Lembaga	Komunikasi dan Informatika	Komisi Penyiaran dan Informasi
			6 Terlaksananya kegiatan kedinasan KDH/WKDH	6 Kegiatan	33 Kegiatan	13. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Pemerintahan Umum	Biro Umum
			7 Pembangunan dan Peningkatan gedung pemerintahan	0 unit	20 Unit	14. Program Pemeliharaan dan pengelolaan Bangunan Gedung Negara	Pemerintahan Umum	Biro Perlengkapan
			8 Jumlah dokumen tentang pengembangan pengelolaan aset daerah	1 Dok	5 Dok	15. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pemerintahan Umum	Biro Perlengkapan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		6. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1. Jumlah website SKPD yang hosting pada pemprov	12 website	52 website	66. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2. Tersampainya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat	415 kali	4.804 Kali	65. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			3. Terselenggaranya Pelayanan Kualitas Pelayanan Jasa Pos dan Telekomunikasi	1 tahun	5 tahun	68. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			4. Terselenggaranya pengawasan isi siaran	12 Media cetak (SKH), 4 Media TV, 6 Media Radio, 1 Media Berita Antara	12 Media cetak (SKH), 4 Media TV, 6 Media Radio, 1 Media Berita Antara	69. Program Pengawasan Isi Siaran	Komunikasi dan Informatika	Komisi Penyiaran dan Informasi
			5. Terselenggaranya Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran	24 Kab/Kota, 20 Lembaga Penyiaran Swasta, Radio dan Televisi	28 Kab/Kota, 20 Lembaga Penyiaran Swasta, Radio dan Televisi	70. Program Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran	Komunikasi dan Informatika	Komisi Penyiaran dan Informasi
		7. Pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dan penataan administrasi kependudukan	1. Jumlah aparatur pegawai yang mendapat pendidikan kedinasan/penjurangan	57 pegawai	287 pegawai	53. Program Pendidikan Kedinasan	Kepegawaian	BKD
			2. Persentase Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan SIAK (e-KTP)	81,14 %	100 %	21. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pemerintahan Umum	Biro Pemerintahan Umum

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			3. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya aparatur	10 Keg	10 Keg	26. Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur	Pemerintahan Umum	Biro Binsos
			4. Persentase peningkatan pelayanan publik	10 %	20 %	17. Program Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintahan Umum	Biro Pemerintahan Umum
		8. Peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; melalui penerapan e-Government (e-procurement, e-office, e-planning, e-budgeting, dan e-performance)	1. Pembangunan dan implementasi e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari					
			Sistem e - <i>Planning</i>	0 Sistem	1 Sistem	8. Program Pengembangan Data dan Informasi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Sistem e - <i>Office</i>	0 Sistem	1 Sistem	17. Program Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintahan Umum	Biro Organisasi
			Sistem e - <i>Procurement</i>	1 Sistem	1 Sistem	12. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Pemerintahan Umum	Biro Adm Pembangunan
			Sistem e - <i>Budgeting</i>	0 Sistem	1 Sistem	22. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan daerah	Pemerintahan Umum	Biro Keuangan
			Sistem e - <i>Performance</i>	0 Sistem	1 Sistem	27. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara	Pemerintahan Umum	Biro Organisasi

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			2. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Gubernur dan Peningkatan Peringkat hasil evaluasi terhadap LPPD Provsu	1 LKPJ, Peringkat 18	5 LKPJ, Peringkat 8	28. Program Kepemerintahan Yang Baik	Otonomi Daerah	Biro Otda dan Kerjasama
		9. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan dan aplikasi lainnya	1. Ditetapkannya Sistem Perencanaan dan Penganggaran terpadu melalui peraturan daerah (perda)	0 Perda	1 Perda	7. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			2. Terbangunnya Sistem Perencanaan dan Penganggaran terpadu secara elektronik	0 Sistem	1 Sistem	8. Program Pengembangan Data dan Informasi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			3. Tersedianya pusat data informasi geospasial Provinsi Sumatera Utara	0 Sistem	1 Sistem	8. Program Pengembangan Data dan Informasi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			4. Tersedianya data dan informasi hasil penelitian	42 Dokumen	230 Dokumen	44. Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pemerintahan Umum	Balitbang
			5. Terlaksananya penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	0 Kegiatan	30 Kegiatan	45. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Pemerintahan Umum	Balitbang
			6. Terlaksananya sistem informasi teknologi	20 kegiatan	111 kegiatan	46. Program Deseminasi Informasi Teknologi	Pemerintahan Umum	Balitbang
			7. Terciptanya optimalisasi pemanfaatan teknologi	1 kegiatan	5 kegiatan	40. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		10 Peningkatan Kesadaran masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan, anak dan Keluarga Berencana	1 Kuantitas dan kualitas hidup, peran kedudukan dan perlindungan perempuan	3 MoU.19 kl, 1616 orang. 33 kab/kota	17 kl, 885 orang. 33 kab/kota	30. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kependudukan , Keluarga Berencana (KB)	Biro PP, Anak dan KB
			2 Kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.	1 RAN perda. 5 kl, 1305 orang. 3 kota LA. 1 forum 30 kab/kota	17 kl, 1700 orang 33 kab/kota	31. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	Kependudukan , Keluarga Berencana (KB)	Biro PP, Anak dan KB
			3 Penguatan sistem dan mekanisme kelambagaan dan jaringan PUG & PUHA	1 pergubsu, 27 kasus.3 edisi, 2400 expl. 4 kl, 392 orang. 30 kab/kota	15 kl,1150 orang 5 kl, 33 kab/kota	32. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Kependudukan , Keluarga Berencana (KB)	Biro PP, PA dan KB
			4 Peningkatan kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	14 kl, 1788 orang 25 kab/kota	18 kl, 1750 orang 33 kab/kota	33. Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana	Kependudukan , Keluarga Berencana (KB)	Biro PP, Anak dan KB

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
			11 Meningkatkan cakupan layanan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)	1 Rasio akseptor KB (%)	62,8/100	67/100	30. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 31. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak 32. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) 33. Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana	Perangkat Daerah	Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB	
				2 Cakupan peserta KB aktif (%)	62,80%	67%				
				12. Peningkatan kesadaran penyelamatan dan pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	1 Pengelolaan arsip secara baku (unit)	2.000 Arsip				10.000 Arsip
			13 Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Kearsipan	2 Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	228 Orang	2.500 Orang	72. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Arsip	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
			2. Meningkatkan Pendapatan Daerah	1. Meningkatkan Potensi PAD yang belum tergal dari sektor-sektor yang diumumkan dalam UU Nomor 28 tahun 2009	1 Peningkatan pajak kendaraan bermotor (%)	10	15	47. Program peningkatan pengelolaan pendapatan daerah	Pemerintahan Umum	Dinas Pendapatan
						48. Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor	Pemerintahan Umum	Dinas Pendapatan		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				2 Peningkatan retribusi daerah (%)	11	10	49. Program peningkatan retribusi daerah	Pemerintahan Umum	Dinas Pendapatan
				3 Peningkatan pajak Air permukaan (%)	10	10	50. Program peningkatan Pajak Air permukaan	Pemerintahan Umum	Dinas Pendapatan
				4 Peningkatan pajak rokok daerah (%)	0	10	51. Program peningkatan pajak rokok daerah	Pemerintahan Umum	Dinas Pendapatan
	3. Meningkatkan kemampuan daerah dan mengelola perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat	1 Melakukan Telaahan terhadap ketersediaan bahan pangan dan laju harga	1 Terkendalinya indeks harga konsumen (IHK) sebagai satu ukuran untuk mengukur inflasi (%)	3.86 %	3.5	12. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Pemerintahan Umum	Biro perekonomian	
			2 Melakukan pembinaan kepada BUMD yang sahamnya dimiliki Pemerintah	2 Deviden dari BUMD (Rp.)	263.801.190.345	650.000.000.000	23. Program peningkatan peran BUMD	Pemerintahan Umum	Biro perekonomian
	4. Meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusia	1 Menumbuhkembangkan pusat riset pengkajian ilmu dan penerapan teknologi	1 Tersedianya data dan informasi hasil penelitian	41 jenis	65 enis	44. Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pemerintahan Umum	Badan Penelitian dan Pengembangan	
			2 Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional dan luar negeri	2 Terlaksananya penguatan Sistem Inovasi Daerah	1 MOU	9 MOU	45. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Pemerintahan Umum	Badan Penelitian dan Pengembangan
			3 Meningkatkan daya tarik investasi melalui penciptaan iklim berusaha yang kondusif	1 Jumlah Izin yang Diterbitkan	85	100	60. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Pemerintahan Umum	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	2 Jumlah layanan perijinan (ijin)	56		56	61. Program pengawasan dan pengendalian				

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				3 Lama perolehan ijin usaha (hari)	8	3	perijinan dan non perijinan		
				4 Peningkatan Jumlah Izin Investasi PMA yang Diterbitkan (%)	60	100	57. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
							59. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
		4	Mengembangkan link and macth dengan dunia usaha	1 Jumlah Misi Investasi yang diikuti baik di tingkat nasional maupun internasional dan kerjasama yang dijalin	12	17	58. Program Penyiapan Potensi sumber daya, sarana, dan prasarana Daerah	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
				2 Jumlah Kab/Kota yang memiliki data potensi dan peluang investasi	33 Kab/kota	33 Kab/kota	58. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
Tujuan-2 : Membangun demokrasi dan partisipasi social									
2	Sasaran Utama: Meningkatnya indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan	Strategi :	Arah Kebijakan						
		1. Pembangunan Indeks Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat di dalam Pembangunan	1. Mendorong hak sipil dan politik warga	1 Jumlah lembaga politik yang mendapat bantuan pembinaan	16 Lembaga	12 Lembaga	62. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan perlindungan masyarakat	Bakesbangpol Linmas
				2 Jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang mendapat bantuan pembinaan	50 Lembaga	100 Lembaga	64. Program Peningkatan Penegakan Perda	Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan perlindungan	Satpol PP

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
							masyarakat	
			4. Persentase tingkat keamanan, dan ketertiban umum dan Kamtibmas serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda semakin meningkat	20 %	100 %	64. Program Peningkatan Penegakan Perda	Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan perlindungan masyarakat	Satpol PP
			5. Terciptanya penyempurnaan dan penguatan kelembagaan politik	440 Rapat 64 Dokumen	2.200 Rapat 320 Dokumen	39. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik	Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
		2. Memberikan ruang partisipasi publik di dalam pembangunan	1. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (% kehadiran dalam pelaksanaan Musrenbang)	50 %	80 %	7. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah	Perencanaan pembangunan	Bappeda
			2. Persentase usulan masyarakat yang ditampung dalam dokumen perencanaan RKPD (minimal)	10 %	30 %	7. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			3. Terlaksananya Kewenangan Pusat dan Provinsi di Daerah serta lancarnya pelaksanaan Kewenangan Kab/Kota	6 Pusat 34 Provinsi 34 Kab/Kota	6 Pusat 34 Provinsi 34 Kab/Kota	29. Program Pembinaan Otonomi Daerah	Pemerintahan Umum	Biro Otonomi dan KJ

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		3. Mendorong dan memberikan ruang kepada DPRD untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya/hak inisiatifnya	1. Jumlah Perda yang dikeluarkan atas inisiatif DPRD	1 Perda	20 Perda	41. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
			2. Terciptanya peningkatan pelayanan persidangan dan risalah	608 Dokumen	3.390 Dokumen	42. Program Peningkatan Pelayanan Persidangan dan Risalah 43. Program Peningkatan Pengembangan Persidangan dan Risalah	Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
		4. Mendorong dan memfasilitasi penegakan hukum secara konsisten	1. Jumlah perkara terselesaikan terkait Sengketa Hukum di Lingkungan Pemprov	10 Perkara	50 Perkara	37. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum	Pemerintahan Umum	Biro Hukum
			2. Jumlah Aparatur yang memahami HAM semakin bertambah	340 Orang	1.700 Orang	36. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia	Pemerintahan Umum	Biro Hukum
		5. Mengefektifkan koordinasi penegakan hukum untuk mengurangi pelanggaran hukum	1. Jumlah Perda Provsu yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi	2 Perda	10 Perda	35. Program Pembinaan Peraturan Daerah	Pemerintahan Umum	Biro Hukum
			2. Jumlah Draf Ranperda yang disusun	10 Ranperda	50 Ranperda	34. Program Perencanaan Hukum	Pemerintahan Umum	Biro Hukum

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			3. Terciptanya kerjasama aparatur di lingkungan Pemprov dengan Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	38. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Pemerintahan Umum	Biro Hukum
			4. Meningkatkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dan berlandaskan aturan peraturan dlm penyelng pemerintahan dan pembangunan	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	16. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Pemerintahan Umum	Biro Hukum
			5. Terlaksananya penataan wilayah administrasi pemerintah daerah	2 Provinsi 33 Kab/Kota	2 Provinsi 33 Kab/Kota	18. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Pemerintahan Umum	Biro Pemerintahan Umum
			6. Terasilitasinya penyelesaian persoalan tanah yg dimiliki oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat	8 Kab/Kota	8 Kab/Kota	19. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Pemerintahan Umum	Biro Pemerintahan Umum
			7. Tertatanya kepemilikan tanah serta kawasan kawasan khusus dan umum dalam penyelenggaraan pembangunan	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	20. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Perencanaan Pembanguna	Biro Pemerintahan Umum
			10. Persentase Kualitas dan Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dan gangguan gejolak sosial di masyarakat	20 %	100 %	63. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			11 Persentase tingkat keamanan dan ketertiban umum dan Kamtibmas serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda semakin meningkat	20 %	100 %	66. Program Peningkatan Penegakan Perda	Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
		6. Meningkatkan dan penerapan produk hukum yang adil dan berwibawa melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dan perlindungan masyarakat, pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	1 Persentase tingkat keamanan, dan ketertiban umum dan Kamtibmas serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda semakin meningkat	20 %	100 %	66. Program Peningkatan Penegakan Perda	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Satpol PP
		7. Peningkatan kualitas perencanaan daerah	1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara	0 Dokumen	20 Dokumen	9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
		8. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	0 Dokumen	2 Dokumen	10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			9. Peningkatan kinerja perencanaan penataan ruang	1. Meningkatnya perencanaan penataan ruang	0 Kegiatan 0 Dokumen	3 Kegiatan 3 Dokumen	1.1. Program Perencanaan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

7.1.3. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi-2 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi.

Kebijakan umum untuk mencapai Misi-2 adalah : Mewujudkan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat ber-agama yang se-makin baik dan soliditas dan harmoni antar kelompok masyarakat; Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang rukun, aman, dan damai; Menyelenggarakan sistem pendidikan sepanjang hayat yang bermutu dan terjangkau serta berkarakter kebangsaan; Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan; Meningkatkan..kesejahteraan tenaga kependidikan; Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan; Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, keolahragaan, arsip dan perpustakaan pada semua jenjang pendidikan hingga ke pelosok kabupaten/kota; Meningkatkan minat baca masyarakat; Meningkatkan kualitas perlindungan dan pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian; Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi; Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan jaminan kesehatan hingga ke pelosok kabupaten/kota; Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan; Menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan dan sistem jaminan kesehatan yang bermutu dan terjangkau; Meningkatkan kesejahteraan tenaga tenaga kesehatan.

Program untuk mendukung Misi-2 berdasarkan Urusan adalah :

A. Urusan Pendidikan :

73. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
74. Program Pendidikan Menengah
75. Program Pendidikan Menengah Kejuruan
76. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
77. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas lainnya
78. Program Pendidikan Tinggi
79. Program Pendidikan Non Formal

B. Urusan Kesehatan :

80. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
81. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
82. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
83. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
84. Program Lingkungan Sehat
85. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
86. Program Upaya Kesehatan Perorangan
87. Program Sumber Daya Kesehatan
88. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
89. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
90. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
91. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
92. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

C. Urusan Kepemudaan dan Olahraga :

93. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan
94. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
95. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
96. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
97. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

D. Urusan Perpustakaan

98. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

E. Urusan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat

- 99. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 100. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 101. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

F. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

- 102. Program pembinaan keagamaan

G. Urusan Kebudayaan :

- 103. Program Pengembangan Nilai Budaya
- 104. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.2.

**Tabel 7.2.
Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 2**

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Misi - 2 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi										
Tujuan - 3 : Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman										
3.	<i>Sasaran Utama : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya</i>	Strategi : 1. Mendorong dinamika kehidupan beragama dan berbudaya, yang dilandasi nilai-nilai hukum dan etika serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan berne-gara yang berlandas-kan semangat per-satuan dan kesatuan	Arah Kebijakan :							
1			Mewujudkan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama yang semakin baik dan soliditas dan harmoni antar kelompok masyarakat	1	Jumlah pertemuan forum keagamaan yang diselenggarakan dalam setahun	1 Kali/thn	2 Kali/thn	99. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Dinas Kesbangpol Linmas
				2	Fasilitasi Kegiatan lembaga keagamaan	1 Keg	5 Keg	102. Program pembinaan keagamaan	Pemerintahan Umum	Biro Bantuan Sosial
2.			Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang rukun, aman, dan damai	1	Terciptanya stabilitas keamanan dan kenyamanan di sumut	3 Forum 1.200 Orang 33 Kab/ kota	3 Forum 6.000 Orang 33 Kab/ kota	100. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Dinas Kesbangpol Linmas
								101. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Dinas Kesbangpol Linmas
					2. Forkopimda, Kab/Kota, FKDM, Resimen Mahasiswa, FKPT, Kominda	3 Forum 33 Kab/kota	3 Forum 33 Kab/kota	100. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Dinas Kesbangpol Linmas
			3. Frekuensi Pertemuan Forum Strategis Deteksi Dini dan Cegah Dini Gangguan Keamanan Dalam Negeri	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	101. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol Linmas		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
		2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat lainnya dalam pembangunan yang berkarakter kebangsaan	1. Penyelenggaraan sistem pendidikan sepanjang hayat yang bermutu dan terjangkau serta berkarakter kebangsaan	1. APK PAUD Non Formal	37,53%	66,41%	79. Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				2. APM SD/SDLB	92,66%	93,41%	73. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				3. APK SD/SDLB	7 kota (87,5%)	100%			
				4. APK SMP /SMPLB	95,68%	101,70%			
				5. APM SMP/SMPLB	8 kota (100%)	89,84%			
				6. APK SMA/SMK	82,20%	95,69%	74. Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				7. APM SMA/SMK	67,25%	78,76%	75. Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				8. APK perguruan tinggi usia 19-23 tahun	29,10%	70,20%	78. Program Pendidikan Tinggi	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			2. Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan	1. Persentase guru TK/SLB berkualifikasi akademik S1/D4	20,11%	25,67%	76. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan	2. Persentase Guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4	75,29%	83,13%			
				3. Persentase Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4	82,12%	90,67%			
		4. Persentase guru SMA/berkualifikasi S1/D4		93,31%	98,07%				
		4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	5. Persentase kehadiran pegawai tidak kurang dari 99%	94,55%	98,09%	77. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas lainnya	Pendidikan	Dinas Pendidikan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, keolahragaan, arsip dan perpustakaan pada semua jenjang pendidikan hingga ke pelosok kabupaten/kota	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemuda terampil	45%	70%	93. Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
			2. Meningkatnya keaktifan pemuda dalam menjaga keutuhan NKRI	80%	70%	97. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
			3. Meningkatnya jumlah organisasi keolahragaan, atlet dan kabupaten/kota yang mengembangkan olahraga	20%	70%	94. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
			4. Meningkatnya jumlah atlet, pelatih dan wasit dalam mengikuti event olahraga	80%	70%	95. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
			5. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang disediakan	20%	70%	96. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
			6. Meningkatnya jumlah pemuda mengikuti pelatihan keterampilan bidang usaha	10%	70%	97. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
			7. Meningkatnya keaktifan masyarakat dalam kepramukaan	70%	70%	97. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			8. Penambahan Jumlah Koleksi buku/tahun	20.000 Eks	100.000 Eks	98. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
	6 Meningkatkan minat baca masyarakat		1 Pelayanan Perpustakaan Keliling	33 Pos	50 Pos	98. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			2 Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah	35 Sekolah	50 Sekolah	98. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	7 Meningkatkan kualitas perlindungan dan pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian		1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7 Kali penyelenggaraan	12 kali penyelenggaraan	103. Program Pengembangan Nilai budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	8 Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi		2 Penyelenggaraan festival seni dan budaya; dokumentasi peninggalan sejarah	10 Kali penyelenggaraan ; 300 dokumen	20 Kali penyelenggaraan ; 400 dokumen	104. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	9. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan jaminan kesehatan hingga ke pelosok kabupaten/kota		1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin	95%	100 %	80. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan, RS. Jiwa
			2. Persentase cakupan pelayanan antenatal care (K4)	89%	96%	81. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			3. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di RS Jiwa Daerah Provsu	70%	80%	81. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	RS. Jiwa

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			4. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	65%	80%	82. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			5. Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan kepada perorangan	40%	60%	82. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	RS. Jiwa
			6. Tercapainya persentase gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	100%	83. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			7. Tercapainya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan	78%	84%	84. Program Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			8. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	90%	95%	85. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			9. Persentase RSUD yang menyelenggarakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)	45%	100%	86. Program Upaya Kesehatan Perorangan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		10 Meningkatkan kapasitas tenaga tenaga kesehatan	10.Persentase tenaga kesehatan yang berstandar kompetensi	55%	85,00%	87. Program Sumber Daya Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		11 Menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan dan sistem jaminan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	11.Meningkatnya persentase alokasi pembiayaan kesehatan	4,7%	10%	88. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			12.Terlaksananya penelitian pembangunan kesehatan	3 PEN	15 PEN	89. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan, RS Jiwa
		12 Meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan	13.Meningkatnya fasilitas rumah sakit yang bermutu dan memadai	67%	100%	91. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Kesehatan	RS. Haji
			14. Tersedianya sarana dan prasana Rumah Sakit Jiwa Daerah Provsu	65%	100%	91. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Kesehatan	RS. Jiwa
			15.Terkendalinya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit yang bermutu	50%	100%	92. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Kesehatan	RS. Haji
			16.Meningkatnya fasilitas rumah sakit yang bermutu dan memadai	67%	100%	90. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	RS. Haji

7.1.4. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi -3 : Membangun Dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi Melalui Kerjasama Antar Daerah, Swasta, Regional dan Internasional.

Kebijakan umum untuk mencapai Misi-3 adalah :

Merencanakan program dan kegiatan infrastruktur jalan, sumber daya air dan perhubungan; Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan, sumber daya air dan perhubungan; Mewujudkan sistem transportasi wilayah (SISTRAWIL), informasi dan komunikasi wilayah;. Mewujudkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP);. Mewujudkan pengembangan sarana pendukung jalan usaha tani; Menyediakan sumber energi untuk kebutuhan masyarakat, khususnya dari sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan; Menyelenggarakan penataan ruang yang tidak hanya melihat dari aspek nilai ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan pelestarian sumber daya alam (*sustainable development*); juga mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan pelestarian sumber daya alam (*sustainable development*); Membangun dan meningkatkan keterkaitan fungsi wilayah antara wilayah inti dan wilayah pinggiran, dan Mendorong penguatan kawasan koridor ekonomi ; Menguatkan peran dan fungsi kewilayahan, membangun, dan meningkatkan infrastruktur sosial ekonomi berbasis mitigasi bencana; Menguatkan sistem dan efektivitas penanggulangan bencana

Program untuk mendukung misi ini berdasarkan Urusan adalah :

A. Urusan Pekerjaan Umum :

105. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
106. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
107. Program Pembinaan Jalan dan Jembatan
108. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya
109. Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
110. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
111. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
112. Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
113. Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air;

B. Urusan Penataan Ruang :

114. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
115. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
116. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

C. Urusan Perhubungan :

117. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
118. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
119. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
120. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
121. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas
122. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

D. Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat :

123. Program Penguatan Kelembagaan Bencana
124. Program Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana
125. Program Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana
126. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.3.

Tabel 7.3. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi - 3

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi - 3 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional									
Tujuan - 4 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan									
4.	Sasaran Utama : Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah	Strategi :	Kebijakan :						
		1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penumbuhan kawasan	1. Merencanakan program dan kegiatan infrastruktur jalan, sumber daya air dan perhubungan	1. Terencananya program dan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan	47 Kegiatan	227 Kegiatan	107. Program Pembinaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga
				2. Tercapainya peningkatan ketrampilan SDM dalam melaksanakan pengelolaan SDA pada Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumut Tersedianya pedoman/manual operasional pengelolaan sumber daya air yang berkaitan dengan Perencanaan atau Pengaturan, Pelaksanaan, serta Pengawasan atau Pencegahan / Pengendalian	60/ 17, 10 %/ Dokumen, Laporan UPT per Tahun	90/ 67, 10 %/ Dokumen Laporan UPT per Tahun	113. Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan, sumber daya air	A. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	66,59 %	95,00 %	105. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga
			1. Terlaksananya Pembangunan jalan (km)	2.029,72 km	2.896,00 km			
			2. Terlaksananya Pembangunan jembatan (m')	13.280,1 m"	16.278,2 m'			
			3. Terlaksananya pemeliharaan berkala ruas jalan (km)	0 Km	295.50 Km	106. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
			4. Terlaksananya pemeliharaan rutin ruas jalan (km)	3.048,5 Km	3.021,50 Km			
			5. Terlaksananya kondisi baik infrastruktur jalan & jembatan (Keg)	0 keg	47 keg	107. Program Pembinaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga
			B. Rasio jaringan irigasi kondisi baik (%)			108. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
			1. Berfungsinya jaringan Irigasi seluas 86.999 Ha dan jaringan Rawa seluas 64.339 Ha yang menjadi kewenangan Provinsi	64,88 %	90,00 %			
				72.934 Ha/Thn	72.934 Ha/Thn			
				55.832 Ha/Thn	55.832 Ha/Thn			
			a. Bangunan Irigasi	3.380 bh	4.693 bh			
			b. Sal. Pasangan /Tembok Pasangan	150.175 m	258.733 m			

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			c. Normalisasi Saluran /Tanggul Saluran	480.316 m	685.544 m			
			a. Bangunan Rawa	208 bh	247 bh			
			b. Saluran Drainase	345.926 m	437.035 m			
			c. Tanggul Air Asin	53.735 m	78.017 m			
			2. Tersedianya sumber air baku pada daerah kekurangan air di musim hujan dalam bentuk Waduk/Embung/Situ-situ	20 Unit	70 Unit	110. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
			3. Terlaksananya Kordinasi Pengelolaan SDA Propinsi Sumatera Utara dan Kordinasi Pengelola SDA pada wilayah sungai melalui kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi dan wadah lainnya.	60/ 43, 32 %/ Dokumen, Kegiatan	90/ 98, 72 %/ Dokumen Kegiatan	111. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
			4. Meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air pada sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air dan pengurangan luasan genangan banjir.	74,16 %	90,00 %	112. Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			5 Perbaikan/Pemb. Perkuatan Tebing	129.539 m	151.668 m	112. Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
			6 Normalisasi /Pelurusan alur sungai/Perbaikan /Pembuatan Tanggul	375.15 m	472.500 m	112. Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
		3. Mewujudkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	7. Terbinanya dan terkoordinasinya perkuatan kelembagaan SDA Provsu (SKPD,Komisi Irigasi, P3A/GP3A/IP3A) Provinsi dan Kab/Kota	4 Kab/Kota	33 Kab/Kota	109. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
		4. Mewujudkan sistem transportasi wilayah (SISTRAWIL), informasi dan komunikasi wilayah	C. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan transportasi bagi masyarakat				Perhubungan	Dinas Perhubungan
			1. Tersedianya Halte KA Mebidangro (unit)	0 unit	2 unit	117. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			2. Terbangun dan beroperasinya Pelabuhan Pengumpulan Regional (unit)	0 unit	7 unit	120. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			3. Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan (lokasi)	0 Lokasi	6 Lokasi	118. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			4. Terehabilitasinya jalan keluar masuk UPPKB (lokasi)	1 Lokasi	7 Lokasi	120. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			5. Tersedianya terminal VIP bandara Kualanamu (unit)	0 unit	1 unit	120. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			6. Tersedianya Halte / Pos Pengawasan Angkutan Pemandu Moda bandara Kualanamu (unit)	0 unit	10 unit	120. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			7. Terpenuhinya fasilitas keselamatan Lalu Lintas berupa:			121. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			a. Rambu Lalu Lintas (buah)	1670 buah	8.170 buah			
			b. Guard rail (buah)	4275 buah	20.075 buah			
			c. Delineator (buah)	2075 buah	13.875 buah			
			d. Paku jalan (buah)	2085 buah	346.285 buah			

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			e. APILL (buah)	13 buah	41 buah			
			f. Marka Jalan (m')	9487 m	4.086.388 m			
			g. LPJU (buah)	0 buah	180 buah			
			h. Cermin Tikungan (buah)	0 buah	40 buah			
			i. ZOSS (lokasi)	4 lokasi	8 lokasi			
			j. Rambu Perairan (buah)	0 buah	860 buah			
			k. VMS (lokasi)	1 lokasi	4 lokasi			
			8. Tersedianya alat uji Emisi Gas Buang	0 Paket	10 Paket	122. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		
			9. Terpasangnya CCTV pada Koridor Bus Pemadu Moda (lokasi)	0 Lokasi	15 Lokasi	121. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			1. Tersedianya alat-alat keselamatan pelayaran (buah)	1300 buah	5.200 Buah	119. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			2. Tersedianya kapal pengawas operasional yang layak termasuk pemeliharaannya (unit)	0 unit	7 unit			
			3. Terpenuhnya operasional KMP Ferry Roro rute Muara-Nainggolan (kali)	1 kali	6 kali			

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		6. Mewujudkan pengembangan sarana pendukung jalan usaha tani dan kawasan wisata	1 panjang jalan poros pendukung ekonomi pedesaan dan menuju kawasan pariwisata	22,5 km	126 km	105. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga
		7. Menyelenggarakan penataan ruang yang tidak hanya melihat dari aspek nilai ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan pelestarian sumber daya alam (<i>sustainable development</i>)	1 Luas kawasan kumuh (Ha)	1.792 Ha	5960 Ha	114. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah 116. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Urusan Penataan Ruang dan Permukiman	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
	2 Meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan pengembangan kewilayahan, dan rawan bencana;	1 Membangun dan meningkatkan keterkaitan fungsi wilayah antara wilayah inti dan wilayah pinggiran, dan mendorong penguatan kawasan koridor ekonomi	1 Perencanaan Kawasan Strategis Provinsi (Dokumen/regulasi)	0	13	115. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Penataan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, Bappeda
2 Evaluasi Rencana Umum dan Rencana Detail RTRW Kabupaten/Kota			Rencana Umum	Rencana Umum dan Rencana Detail RTRW Kabupaten/Kota	114. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Penataan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	
3 Fasilitasi penyusunan dokumen kawasan strategis Kabupaten/Kota			0	33 Kab/Kota				

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2. Menguatkan peran dan fungsi kewilayahan, membangun, dan meningkatkan infrastruktur sosial ekonomi berbasis mitigasi bencana	1. Regulasi daerah terhadap pengendalian ruang (perda/Pergub)	1	5	114. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
			2. Luas Ruang Terbuka Hijau perkotaan		10 %	15 %	116. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pentaaan Ruang
		3. Menguatkan sistem dan efektivitas penanggulangan bencana	1. Meningkatnya Kapasitas Lembaga dan Aparatur Penanggulangan Bencana	15%	20%	123. Program Penguatan Kelembagaan Bencana	Penanggulanga n Bencana Daerah	BPBD
			2. Jumlah masyarakat dan stakeholder sadar bencana	280	400 org	124. Program Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	Penanggulanga n Bencana Daerah	BPBD
			3. Jumlah desa tangguh bencana	2	4 desa			
			4. Informasi dan data kebencanaan Sumut	12 bulan	12 bulan			
			5. Persentase Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana (%)	20%	25%	125. Program Penyelenggaraan Tanggap Darurat dan Bencana	Penanggulanga n Bencana Daerah	BPBD
			6. Jumlah Kab/Kota yang mengusulkan rehab rekon yang direkomendasi Gubsu	6 Kab/Kota	10 Kab/Kota	126. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Penanggulang an Bencana Daerah	BPBD
			7. Persentase Rehab/Rekon Pasca Bencana di Sumut	6 kab/kota	9 Kab/Kota			

7.1.5. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi- 4 : Meningkatkan Kualitas Standar Hidup Layak, Kesetaraan Dan Keadilan Serta Mengurangi Ketinggian Antar Wilayah.

Kebijakan umum untuk mencapai Misi 4 adalah : Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah provinsi; Meningkatkan akses pada wilayah terluar, terpencil dan perbatasan ; Menyediakan dan pemeratakan fasilitas sarana dan prasarana sosial ekonomi serta kesejahteraan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air minum, perumahan, permukiman, sanitasi, bantuan dan lainnya) ; Meningkatnya produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kreativitas dan produktivitas tenaga kerja melalui Penguasaan Teknologi; Menyelenggarakan sistem pengendalian kependudukan yang berkualitas.

Program untuk mendukung misi ini berdasarkan Urusan adalah :

A. Urusan Sosial :

- 127. Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya (APBD).
- 128. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 129. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 130. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
- 131. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
- 132. Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

B. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 133. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- 134. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 135. Program Pengembangan Desa Tertinggal
- 136. Program Pengembangan Ekonomi Lokal
- 137. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pokok PPK Melalui Kerjasama Antar Desa
- 138. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

C. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi :

- 139. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 140. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 141. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
- 142. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

D. Urusan Perumahan/Permukiman :

- 143. Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman
- 144. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman
- 145. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan
- 146. Program Pembinaan dan Pengembangan Bangunan Gedung
- 147. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan

Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.4.

**Tabel 7.4.
Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 4**

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi -4 : Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah									
Tujuan -5 : Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan									
5.	Sasaran Utama : Meningkat nya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan	Strategi :	Arah Kebijakan :						
		1 Meningkatkan kuantitas dan kapasitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat	1 Peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi	1 Meningkatkan keterampilan dan adanya usaha yang dimiliki bagi keluarga miskin guna mencapai keluarga mandiri	818 kk	4925 kk	127. Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya (APBD)	Sosial	Dinkessos
				2 Meningkatkan fungsi sosial para PMKS untuk kelangsungan dan pengembangan hidupnya	985 org	5810 org	128. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinkessos

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			3 Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.	1969 org	1999 org	129. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinkessos
			4 Meningkatkan kader yang terbentuk dalam memperkuat integrasi sosial di lingkungan; dan kelompok penyuluhan sosial di lokasi rawan bencana dan konflik;	73 keg	73 keg	130. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinkessos
			5 Meningkatkan pemahaman terhadap dampak bencana dan meningkatnya taraf hidup masyarakat korban bencana	406 org	406 org	131. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinkessos

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			6 Meningkatkan sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk standar dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial;	33 kab/kota	33 kab/kota	132. Program Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinkessos
		2 Mengoptimalkan kelembagaan masyarakat dan desa	1 Meningkatkan efektivitas fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat (LPM)	330 KLP	1000 Klip	133. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Bappemas dan Pemdes
			2 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Perangkat Desa	3541 org	3.541 org	134. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Bappemas dan Pemdes
			3 Bertambahnya desa keluar dari tertinggal	2 Kabupaten	6 Kabupaten	135. Program Pengembangan Desa Tertinggal	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Bappemas dan Pemdes
			4 Meningkatkan ekonomi lokal	22 kab/kota	33 kab/kota	136. Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Bappemas dan Pemdes
			5 Meningkatkan efektifitas PPK melalui Kerjasama antar Desa	25 Kabupaten dan 3 Kota	25 Kabupaten dan 7 Kota	137. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pokok PPK melalui Kerjasama antar Desa	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Bappemas dan Pemdes

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			6 Meningkatkan kelembagaan PKK desa/kelurahan	23 klp	33 klp	138. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Bappemas dan Pemdes
		3 Meningkatkan kreativitas dan produktivitas tenaga kerja	1 Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1554 Orang	8000 Orang	139. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenaga kerjaan dan transmigrasi	Disnakertrans
			2 Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	5227 Orang	660 Orang	140. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenaga kerjaan dan transmigrasi	Disnakertrans
		4 Meningkatkan jaminan ketenagakerjaan	1 Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	1.521 Perusahaan	4500 Perusahaan	141. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Disnakertrans
		5 Meningkatkan efektivitas wilayah transmigrasi	1 Berkembangnya wilayah transmigrasi	864 Orang	400 Orang	142. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Disnakertrans
		6 Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan	1 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	2.900 Unit	6600 Unit	143. Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan permukiman	Penataan Ruang dan Permukiman	Dinas Tata Ruang & Permukiman Provsu

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			permukiman	2. Bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas hunian masyarakat kurang mampu	0	7.500 Unit	144. Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan permukiman	Perumahan	Dinas Tata Ruang & Permukiman Provsu
				2. Pembangunan Rumah Sederhana Sehat	0	109.000 Unit	145. Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan permukiman	Perumahan	Developer dan swadaya, BUMN, dan CSR
				3. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami	0	37.500 Unit	145. Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan permukiman	Perumahan	Developer dan swadaya, BUMN, dan CSR
				4. Luas kawasan kumuh (Ha)	1.792,0	792	145. Program Pembinaan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman	Perumahan dan Permukiman	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
				5. NSPM Bangunan gedung (regulasi)	16,0	33	146. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bangunan Gedung	Perumahan dan Permukiman	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
				6. Bangunan gedung pemerintah (Unit)	0	2	146. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bangunan Gedung	Perumahan dan Permukiman	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
				7. Persentase Penduduk berakses air minum Perpipaan (%)	15,25	30	146. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan	Perumahan dan Permukiman	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			8. Persentase penanganan sampah (sampah terangkut ke TPA (%))	34	55	147. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan	Perumahan dan Permukiman	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
			9. Cakupan pelayanan air limbah perpipaan (KK)	12.150	64.650	147. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan	Perumahan dan Permukiman	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
			10 Jaringan drainase dengan kondisi baik (Km)	186,19	536,15	147. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan	Perumahan dan Permukiman	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
			11 Panjang jalan lingkungan yang ditangani (km)	-	85	144. Program Pembinaan dan pengembangan infrastruktur penataan lingkungan permukiman	Perumahan dan Permukiman	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
			12 panjang jalan poros pendukung ekonomi pedesaan (km)	22,5	126	144. Program Pembinaan dan pengembangan infrastruktur penataan lingkungan permukiman	Perumahan dan Permukiman	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

7.1.6. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi-5 : Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan umum untuk mencapai Misi 5 adalah : Memperkuat fungsi kelembagaan pelaku pertanian baik kelembagaan ditingkat on-farm, pasca panen, pengolahan hasil, off-farm maupun penyuluh pertanian, perikanan kelautan dan kehutanan; Meningkatkan kerjasama dalam penerapan inovasi dan teknologi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan untuk pengembangan agroindustri dan agrobisnis; Menumbuhkembangkan kawasan ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan peningkatan sektor ekonomi strategis lainnya; Mengembangkan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat; Menumbuhkembangkan sistem ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perluasan kemitraan dengan usaha ekonomi skala besar; Menetapkan regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan; Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan; Menumbuhkembangkan potensi wisata Sumatera Utara untuk peningkatan pendapatan daerah ; Menumbuhkembangkan pusat riset pengkajian ilmu dan penerapan teknologi; Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional dan luar negeri; Meningkatkan daya tarik investasi melalui penciptaan iklim berusaha yang kondusif; Mengembangkan pendidikan dan pelatihan; Mengembangkan link and match dengan dunia usaha ; Memberikan sarana dan prasarana dalam hal mengoptimalkan kinerja nelayan serta memberikan perlindungan bagi nelayan berupa asuransi; Mengembangkan usaha budidaya ikan di Kab./Kota yang memiliki potensi usaha budidaya perikanan; Menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) guna menghasilkan mutu ikan; Mensosialisasikan GEMARIKAN dan pembentukan FORIKAN; Melakukan pembinaan kepada unit pengolahan ikan dan suplayer ikan, melakukan pengendalian terhadap mutu hasil perikanan serta melakukan pengawasan terhadap proses produksi hasil perikanan dan proses pemasarannya; Mensosialisasikan peraturan perikanan dan teknologi di bidang perikanan; Meningkatkan bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan baik penangkapan, budidaya, pengolahan maupun pemasaran; Meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik dengan fokus pada penggunaan energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat dan dunia usaha ; Meningkatkan potensi PAD yang belum tergali dari sektor-sektor yang dimungkinkan dalam UU No 28 Thn 2009 ; Melakukan percepatan penyusunan dokumen anggaran, penatausahaan dan realisasi anggaran ; Melakukan telaahan terhadap kondisi ketersediaan bahan pangan dan laju harga; Melakukan pembinaan kepada BUMD yang sahamnya dimiliki Pemprov; Memenuhi jumlah penyuluh pertanian sebanyak 1 orang/desa, penyuluh perikanan 3 org/kec. dan penyuluh kehutanan 3 orang/kabupaten; Memperkuat kelembagaan petani ; Memanfaatkan swasembada beras, jagung dan kedelai melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan; Meningkatkan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, embung, jalan desa dan jalan usaha tani; Memperkuat kelembagaan perbenihan dan perbibitan daerah; Meningkatkan kesejahteraan petani ; Menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak; Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak; Mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ; Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim; Meningkatkan ketersediaan penanganan kerawanan pangan dan akses pangan; Meningkatkan system distribusi dan stabilitasi harga dan cadangan pangan; Meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan; Mengembangkan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilitasi harga di sentra produksi.

Program untuk mendukung misi -5 berdasarkan Urusan adalah :

A. Urusan Lingkungan Hidup

148. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
149. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
150. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
151. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

B. Urusan Koperasi dan UKM :

- 152. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM
- 153. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM
- 154. Program Penumbuhan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 155. Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM yang kondusif
- 156. Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
- 157. Program Pembinaan dan Pengembangan KUMKM yang Berwawasan Lingkungan

C. Urusan Ketahanan Pangan :

- 158. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan
- 159. Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

D. Urusan Pertanian :

- 160. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 161. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- 162. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
- 163. Program Pengembangan Teknologi Pertanian
- 164. Program Pengembangan Agribisnis
- 165. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
- 166. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- 167. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 168. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

D. Urusan Kehutanan :

- 169. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
- 170. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- 171. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
- 172. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- 173. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 174. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi

E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral :

- 175. Program Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Energi
- 176. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi Dan Air Tanah
- 177. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pertambangan Mineral, Batubara Dan Energi
- 178. Program Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan Dan Energi Terbarukan
- 179. Program Mitigasi Bencana Alam Geologi

F. Urusan Kelautan Perikanan :

- 180. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- 181. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 182. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 183. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

C. Urusan Industri :

- 184. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
- 185. Program Penataan Struktur Industri
- 186. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

D. Urusan Perdagangan :

- 187. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 188. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 189. Program Peningkatan kerjasama Perdagangan Internasional
- 190. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor-Import

E. Urusan Pariwisata :

- 191. Program Pemasaran Pariwisata
- 192. Program Destinasi Pariwisata
- 193. Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
- 194. Program Pengembangan Industri Pariwisata

Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.5.

**Tabel 7.5.
Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 5**

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Misi -5 : Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan									
Tujuan - 6 : Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan									
6.	Sasaran Utama : Meningkatnya daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya	Strategi :	Arah Kebijakan :						
		1 Menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan (UMKM) sesuai dengan potensi daerah masing-masing	1 Menumbuhkembangkan sistem ekonomi kerakyatan (UMKM) dan perluasan kemitraan dengan usaha ekonomi skala besar;	1 Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif (unit)	11.206	13.706	152. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				2 Peningkatan Jumlah UMKM Aktif (unit)	2.290.304	2.298.304	155. Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM yang kondusif	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
							154. Program Penumbuhan dan Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
							156. Program pemberdayaan usaha mikro dan kecil	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2 Menumbuhkembangkan kawasan ekonomi unggulan di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota dan peningkatan sektor ekonomi strategis lainnya;	1 Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	22.15	22.96	184. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						185. Program penataan struktur industri	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						186. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			2. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	16.97	17.95	187. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			3. Ekspor Bersih Perdagangan Ton atau (US\$)	10.21	13.95	188. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						189. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						190. Program peningkatan pengembangan ekspor impor	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3	Menetapkan regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan;	Perda atau Pergub Ekonomi Kerakyatan	1 Perda dan 1 Pergub	Diharapkan ada 2 Perda dan 2 Pergub	153. Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi KUKM	Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM
		4	Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan.	Pelatihan dan Pendidikan Bagi Para Pengurus KUKM	150 UMKM	500 UMKM	157. Program Pembinaan dan Pengembangan KUKM yang Berwawasan Lingkungan	Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM
		5	Menumbuhkembangkan potensi wisata Sumatera Utara untuk peningkatan	1 Kenaikan Jumlah kunjungan wisman (%)	8,38	10	191. Program Pemasaran pariwisata	Pariwisata Dinas Kebudayaan dan pariwisata

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pendapatan daerah	2 Objek wisata menjadi destinasi pariwisata nasional (objek)	2	5	192. Program Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
				3 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2.17	2.36	194. Program Pengembangan Industri Pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
				4 Peningkatan kelembagaan pariwisata	65 %	85%	193. Program pengembangan kelembagaan pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		2 Pembangunan PLTS dan PLTMH;	1 Meningkatkan kapasitas ketersediaan energy listrik dengan fokus pada penggunaan energy baru dan terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energy listrik bagi masyarakat dan dunia usaha	1 Ratio Desa Berlistrik (%)	84,63	95	178. Program pengembangan pelayanan ketenagalistrikan dan energy baru terbarukan	Pertambangan dan energi	Dinas Pertambangan dan energi
				Ratio elektrifikasi (%)	87,8	96			
				Pertambangan tanpa ijin (PETI) (buah)	750	750	175. Program pemanfaatan sumberdaya mineral dan energy	Pertambangan dan energi	Dinas Pertambangan dan energi

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0.75	0.71	176. Program pengelolaan dan pengembangan sumber daya mineral, geologi dan air tanah	Pertambangan dan energi	Dinas Pertambangan dan energi
							177. Program pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral, batubara dan energy	Pertambangan dan energi	Dinas Pertambangan dan energi
							179. Program mitigasi bencana alam geologi	Pertambangan dan energi	Dinas Pertambangan dan energi
		3	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Mengawasi, mengendalikan pemanfaatan sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraan	6	36	149. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Lingkungan Hidup	BLH

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			masyarakat;	2 Pelayanan informasi status mutu udara ambient (unit Lokasi)	5	31	149. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Lingkungan Hidup	BLH
				3 Cakupan pelayanan AMDAL (%)	100	100	149. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Lingkungan Hidup	BLH
				4 Penanganan sampah 3R (%)	34	55	148. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
				5 Publikasi dokumen status lingkungan hidup	1	5	152. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH
		2	Meningkatkan kinerja penegakan hukum atas kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;	1 Cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup (%)	100	100	148. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			3 Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim;	1 dokumen regulasi pengendalian pencemaran udara	1	6	148. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH
			4 Memulihkan fungsi lingkungan pesisir pantai dan laut untuk mendukung pertumbuhan pembangunan dan ekonomi.	1 Dokumen regulasi pengelolaan wilayah pesisir	1	6	151. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Lingkungan Hidup	BLH
		4 Revitalisasi SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1 Pemenuhan jumlah penyuluh pertanian sebanyak 1 orang/desa, penyuluh perikanan 1 orang /kecamatan dan penyuluh kehutanan 3 orang/kabupaten	1. Jumlah penyuluh yang direkrut (orang)	50	250	159. Program Pemanfaatan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Ketahanan Pangan	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
			2 Memperkuat kelembagaan petani	2 Jumlah Kelembagaan Petani (orang) yang mendapat pembinaan	725	3.625	159. Program Pemanfaatan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan		
				3 Jumlah perlengkapan kerja penyuluhan lapangan (unit)	2500	12500	159. Program Pemanfaatan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab			
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir						
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
							dan Kehutanan					
		5	Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana prasarana pertanian	1	Pemantapan Swasembada beras, jagung dan kedelai melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan	-	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, terdiri dari :			161. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pertanian	Dinas Pertanian
						-	Padi (Ton/Ha)	5,02	5,28	161. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pertanian	Dinas Pertanian
						-	Jagung (Ton/Ha)	5,56	5,99			
						-	Kedele (ton/ha)	1,03	1,09			
						-	Peningkatan Produksi hortikultura (Sayur, Buah, Tan. Obat, Tan. Hias) utama lokal lainnya (%)			162. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Pertanian	Dinas Pertanian
							1. Sayuran (Ton)	1.148.050	1.299.547			
							2. Buah-Buahan (Ton)	1.776.875	2.011.352			
							3. Biofarmaka (Ton)	15.980	17.643			
							4. Tanaman Hias Bunga Potong (Tangkai)	16.796.171	18.544.330			
							5. Tanaman Hias Satuan Produksi Pohon	145.233	160.349			
							6. Melati (Kg)	158.925	175.466			
						-	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB (%)	7,47	6,66	164. Program : Pengembangan Agribisnis	Pertanian	Dinas Pertanian

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				- Cakupan bina kelompok petani (%)	3,0	8	164. Program : Pengembangan Agribisnis	Pertanian	Dinas Pertanian	
		2	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, embung, jalan desa dan jalan usaha tani	- Jumlah Embung terbangun	2 kab	12 kab	161. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pertanian	Dinas Pertanian	
				- Jalan Usaha Tani terbangun	22,5 Km	112,5 Km	161. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pertanian	Dinas Pertanian	
		3	Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan daerah	- Perbanyak Benih Tanaman Pangan (%)	1,0	1,0	163. Program Pengembangan Teknologi Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian	
				- Perbanyak Benih Hortikultura (%)	1,0	2,0	163. Program Pengembangan Teknologi Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian	
		4	Peningkatan Kesejahteraan Petani	- NTP Tanaman Pangan	99,46	102,36	160. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Pertanian	
				- NTP Hortikultura	103,39	110,94				
		6.	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan	1 Peningkatan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan	1 Ketersediaan energi perkapita minimal 2400 k.kal/hari dan penyediaan protein perkapita minimal 63 gr/hari	Karbohidrat 3868,41 K.kal Protein : 76,18 gr	Karbohidrat 4068 K.kal Protein : 96 gr	158. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						i Pangan		
		2 Peningkatan sistem distribusi dan stabilisasi harga dan cadangan pangan	- Ketersediaan cadangan pangan	66 ton	160 ton	158. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan		
		3 Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan	- Terbinanya kelompok lumbung pangan masyarakat	53 lumbung 84 gapoktan	178 lumbung 109 gapoktan	158. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan		
		4 Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi	- Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan rawan pangan minimal 1 % setiap tahun	10,41%	5,00%	158. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			- Konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2200 kkal/hari dan protein sebesar 57 gr/kap/hari	1.997,2 kkal 57,6 gr	2.200 kkal 57 gr	158. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			- Sistem distribusi, harga dan akses pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan masyarakat		40 kelompok	138 klmpk	158. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			- Penganekaragaman konsumsi pangan dan penurunan konsumsi beras per kapita 1,5 % untuk memenuhi target Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Konsumsi Beras 130,61 kg/kap/th, PPH : 91,5	Konsumsi Beras 121,11 kg/kap/th, PPH : 98	158. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			- Sistem penanganan keamanan pangan segar	60 sampel	100 sampel	158. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			- Sertifikasi buah dan sayuran pangan segar mendukung OKKPD	10 kab/kota	25 kab/kota	158. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				5 sayuran , 1 buah	33 sayuran, 12 buah	158. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			- Efektifitas Koordinasi Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan	42%	100%	158. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						i Pangan		
		5 Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan rakyat melalui peremajaan tanaman perkebunan rakyat	1 Produktivitas tanaman perkebunan rakyat (PR)	2,57%/thn	2,57%/thn	165. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Perkebunan	Dinas Perkebunan
			Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (Ton)	6.245.196	7.090.026			
			1 K. Sawit (ton/Ha)	5.711.147,33	6.483.733,29	165. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan		
			2 Karet (ton/Ha)	295.045,79	334.958,65			
			3 Kopi Arabika (ton/Ha)	51.916,59	58.939,70			
			4 Kopi Robusta (ton/Ha)	8.830,13	10.024,65			
			5 Kelapa (ton/Ha)	96.400,19	109.440,90			
			6 Kakao (ton/Ha)	39.645,30	45.008,39			
			6 Komoditi Lainnya (ton/Ha)	42.210,61	47.920,73			
			Luas Areal	1.100.649,60	1.103.672,08			
			1 K. Sawit (Ha)	406.132,16	406.965,42			
			2 Karet (Ha)	378.688,35	379.636,02			
			3 Kopi Arabika (Ha)	59.029,36	59.473,41			
			4 Kopi Robusta (Ha)	20.988,98	21.020,48			
			5 Kelapa (Ha)	110.204,93	110.453,11			
			6 Kakao (Ha)	66.546,22	66.879,62			
			7 Komoditi Lainnya (Ha)	59.059,60	59.224,02			

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			Kontribusi terhadap PDRB ADHB (%)	9,53	8,59	166. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Pertanian	Dinas Perkebunan	
		6 Menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak	1 Nilai tukar petani peternak (%)	105,14	109,88	160. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		7 Meningkatkan populasi dan produktifitas ternak	2 Produksi komoditi hasil ternak per tahun			167. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
			- Daging (ton/thn)	135.911,00	164.792,09				
			- Telur (ton/thn)	133.464,26	162.959,87				
			- Susu (ton/thn)	761,04	1.131,67				
			3 Pemanfaatan teknologi IB				168. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			- Jumlah akseptor IB (ekor)	56.758,00	78.670,00				
			- Jumlah kelahiran IB (ekor)	37.388,00	56.642,00				
			4 Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB						
			- PDRB ADHB (%)	1,98	1,79	164. Program Pengembangan Agribisnis	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8 Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui :						
		a. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan hutan	1 Meningkatnya penerimaan iuran kehutanan (%)	10	50	169. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
			2 Meningkatnya Industri Hasil Hutan yang bersertifikat (%)	5	25			
			3 Terlatihnya petugas penatausahaan hasil hutan	200	1000			
		b Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan pertanian	1 Teridentifikasinya potensi dan pengembangan hasil hutan kayu dan non kayu (jenis hasilhutan/ha/model)	10	50	170. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
		c Menyiapkan prakondisi pemantapan kawasan hutan dan lahan pertanian	1 Terpeliharanya batas kawasan hutan	500 km	2,500 km	171. Program perencanaan dan pengembangan hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
			2 Fasilitasi Penataan Batas Kawasan	500 km	2,500 km			
			3 Terbentuknya dan terkelolanya kesatuan pengelolaan hutan (KPH)	1 KPH Model	33 KPHL/KPHP			
			4 Sosialisasi hasil revisi penunjukkan kawasan hutan	0 Kab/Kota	33 Kab/Kota			
			5 Terkendalinya penggunaan kawasan hutan	25 lokasi	25 lokasi			

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			d Meningkatkan perlindungan dan pengamatan terhadap hutan dan lahan pertanian	1 Penurunan kerusakan kawasan hutan (ha)	81,500	40,750	172. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan	
				2 Penurunan konflik, perambahan kawasan hutan dan ilegal logging (%)	20	100				
				3 Penurunan tingkat kebakaran hutan (%)	5	25				
			e Meningkatkan pengelolaan hutan dan bagi hasil hutan partisipatif, terpadu, transparan dan berkelanjutan	1 Berkurangnya lahan kritis (Ha)	279.864	204.864	173. Program rehabilitasi hutan dan lahan	Kehutanan	Dinas Kehutanan	
				2 Tersedianya bibit tanaman hutan dan MPTS (Bibit)	500	2.500			Kehutanan	Dinas Kehutanan
				3 Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan perhutanan social (orang/tahun)	0	2.500				
			f Meningkatkan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM)	Terlaksananya hutan tanaman rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM)	1000 Kepala Keluarga	1000 Kepala Keluarga	174. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi	Kehutanan	Dinas Kehutanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		9	Memberikan sarana dan prasaran dalam hal mengoptimalkan kinerja nelayan (Kapal, Alat Tangkap dan Rumah Ikan) serta memberikan perlindungan bagi nelayan berupa Asuransi Nelayan	1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	436.791,40	506.360,95	182. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		10	Pengembangan usaha budidaya ikan (Budidaya Air Laut, Air Tawar dan Air Payau) di Kab/Kota yang memiliki potensi usaha budidaya perikanan	1	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	157.791,10	254.124,14	181. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		11	Menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) guna menghasilkan mutu ikan	1	Meningkatnya produksi ikan : 1. produksi perikanan tangkap (ton) 2. produksi tanaman budidaya 3. produksi perikanan kelompok nelayan	1) 436.791,4 ; 2) 157.791,1 ; 3) 208,8	1) 506.360,9 ; 2) 254.124,1 ; 3) 242,06			
		12	Sosialisasi GEMARIKAN (Gerakan Makan Ikan) dan Pembentukan FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional)	1	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	36,30	46,33	183. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			13 Melakukan pembinaan kepada Unit Pengolahan ikan dan suplayer ikan, melakukan pengendalian terhadap mutu hasil perikanan serta melakukan pengawasan terhadap proses produksi hasil perikanan dan proses pemasarannya	1 Ekspor Hasil Perikanan (Ton)	54.300,90	67.983,18	182. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			14 Sosialisasi Peraturan Perikanan dan Teknologi dibidang perikanan (Penangkapan, Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran)	1 Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	10,90	12,64	180. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			15 Peningkatan bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan baik Penangkapan, Budidaya, Pengolahan maupun Pemasaran	1 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	209	242	182. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

7.2 Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang

Kebijakan pembangunan lintas bidang diarahkan untuk peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar berbagai satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan lintas bidang secara terpadu yakni :

1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu

Landasan operasional dalam Pengelolaan DAS secara terpadu di Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012
- 2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor NO: P.12/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk RHL-DAS)
- 3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 tentang pengelolaan DAS
- 5) Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS Secara Terpadu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Daerah Aliran Sungai atau disingkat dengan DAS diartikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dengan sumberdaya alam (terutama lahan, vegetasi dan air) di dalam DAS untuk mendapatkan manfaat barang dan jasa sekaligus menjaga kelestarian DAS serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi DAS di Sumatera Utara sudah sangat mendesak untuk ditangani. Kerusakan bukan hanya terjadi di bagian hilir DAS tetapi juga di bagian hulu DAS yang merupakan daerah penyangga. Di bagian hulu dan tengah DAS sering kali terjadi alih fungsi lahan, dimana lahan yang seharusnya kawasan hutan dialih fungsikan menjadi kawasan perkebunan dan kegiatan ekonomi lainnya.

Degradasi hutan dan lahan ditimbulkan oleh penggunaan lahan tidak sesuai dengan kemampuan dan peruntukannya sesuai penataan ruang, penebangan hutan dan pengurusan lantai hutan, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran yang dipengaruhi aktifitas industri, pertambangan, dan pertanian, penggenangan berupa banjir cukup lama dan sedimentasi bahan kasar, dan akibat yang ditimbulkan bencana alam berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, badai/angin puting beliung dan tsunami.

Permasalahan yang ditimbulkan antara lain meningkatnya lahan kritis, penurunan kualitas Habitat/lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, meningkatnya sedimentasi (pendangkalan pada alur sungai dan muara, penurunan kualitas air, masalah penggunaan air tanah dan air permukaan, kerawanan bencana alam (banjir dan longsor), masalah sosial, ekonomi dan kelembagaan, masalah tata ruang dan penggunaan lahan, dan konflik pemanfaatan sumber daya.

Dalam rangka mengatasi permasalahan dan untuk mewujudkan tujuan menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan, maka diperlukan adanya kesamaan dalam pemikiran dan tindakan dalam pengelolaan DAS yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang bersifat multidisiplin, lintas bidang dan lintas wilayah administratif.

Azas Pengelolaan DAS Terpadu adalah :

- 1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam (hutan, tanah dan air) dengan memperhatikan perlindungan lingkungan;
- 2) Pengelolaan DAS bersifat multidisiplin dan lintas sektor;
- 3) Bertujuan untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
- 4) Keterpaduan dimulai sejak dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pembinaan dan pengawasan

Rencana pengelolaan DAS Terpadu pada DAS Prioritas-I di Sumatera Utara telah disusun untuk jangka waktu selama 15 tahun yang menjadi panduan dalam mewujudkan pengelolaan DAS Terpadu yang berbasis *one river, one plan dan one management*.

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam pengelolaan DAS secara terpadu tertuang dalam Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang telah disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara untuk DAS Prioritas - I di Provinsi Sumatera Utara yakni :

1. DAS Padang (SK Gubernur Nomor : 1/1775/2013)
2. DAS Wampu (SK Gubernur Nomor :11/1776/2013)
3. DAS Deli (SK Gubernur Nomor : 611/1778/2013)
4. DAS Asahan Toba (SK Gubernur Nomor : 611/1774/2013),
5. DAS Batang Gadis (SK Gubernur Nomor : 611/1779/2013), dan
6. DAS Nias (SK Gubernur Nomor : 611/1777/2013)

Kebijakan dalam Pengelolaan DAS Terpadu di Provinsi Sumatera Utara di arahkan kepada :

1. Keterpaduan dalam Pengelolaan DAS dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah
2. Peningkatan pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Peningkatan kualitas Penataan Ruang Kawasan DAS

Secara umum Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam pengelolaan DAS secara terpadu yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 7.6. berikut :

Tabel 7.6.
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SECARA TERPADU

Misi -5 : Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan								
Tujuan -6 : Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan								
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Terciptanya kondisi hidrologi DAS yang optimal sesuai dengan fungsi dan kemanfaatannya			Berkurangnya luas lahan kritis (Ha) pada DAS prioritas melalui upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada :					
			DAS Padang	6.518,51	5.967,76			
			DAS Wampu	28.909,61	26.467,02			
			DAS Deli	1.395,88	1.277,94			
			DAS Asahan Toba	189.257,26	173.266,80			
			DAS Batang Gadis	486.639,00	445.522,57			
DAS Nias	126.924,26	116.200,35						
	1. Penataan Penggunaan Lahan	1) Penciptaan dukungan berkesinambungan untuk suatu sistem legal maupun dukungan terhadap aparaturnya mampu menangani masalah DAS	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan DAS secara Terpadu, yang terdiri dari : Rencana Pengelolaan DAS Terpadu, Indikator Kinerja DAS, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Pembinaan dan Koordinasi, Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat, Besar dan Tatacara Insentif dan Disinsentif	Belum Ada	Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan DAS secara Terpadu Provinsi Sumatera Utara	Program Perencanaan Hukum Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah	Pemerintahan Umum Perencanaan pembangunan	Biro Hukum Bappeda

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2) Upaya penegakan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi bagi pelanggar kelestarian ekosistem DAS	Penyadaran publik tentang hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi bagi pelanggar kelestarian ekosistem DAS	Belum Ada	Terlaksananya penyadaran publik tentang hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi bagi pelanggar kelestarian ekosistem DAS	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia	Pemerintahan Umum;	Biro Hukum
						Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
		3) Peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya luas Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan	Luas Ruang Terbuka Hijau 10%	Luas Ruang Terbuka Hijau 15%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Penataan Ruang	Dinas Tarukim
		4) Mengawasi, mengendalikan pemanfaatan sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor yang sensitif (Unit Lokasi)	6 Lokasi	36 Lokasi	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
		5) Meningkatkan kinerja penegakan hukum atas kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;	Cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup	100%	100%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
		6) Meningkatkan perlindungan dan pengamatan terhadap hutan dan lahan pertanian	Penurunan kerusakan kawasan hutan rata-rata 10%/Tahun	81.500 Ha	40.750 Ha	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Rehabilitasi hutan dan lahan	1) Rehabilitasi dan konservasi kawasan yang berfungsi lindung baik hutan maupun non hutan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu	Rehabilitasi dan konservasi kawasan yang berfungsi lindung berbasis DAS secara terpadu	Belum terlaksana di seluruh kawasan yang berfungsi lindung	Rehabilitasi dan konservasi telah terlaksana di seluruh kawasan yang berfungsi lindung	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
		2) Rehabilitasi lahan kritis melalui usaha vegetatif untuk penghijauan di lahan masyarakat	Rehabilitasi lahan kritis melalui usaha vegetatif untuk penghijauan di lahan masyarakat	Belum terlaksana di seluruh lahan kritis di lahan masyarakat	Telah terlaksana minimal 75% dari lahan kritis di lahan masyarakat	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
		3) Rehabilitasi daerah resapan air guna mempertahankan ketersediaan air	Rehabilitasi daerah resapan air guna mempertahankan ketersediaan air	Belum terlaksana pada seluruh daerah resapan air	Rehabilitasi daerah resapan air dapat terlaksana minimal 75%	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
		4) Penerapan teknik pengelolaan lahan berbasis pengelolaan DAS melalui metode pembuatan rorak, pembuatan embung, situ, dan biopori	Terlaksananya pembuatan rorak dan biopori	Pembuatan rorak, dan biopori minimal 30%	Pembuatan rorak, dan biopori minimal 75%	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Pertanian
						Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Jumlah embung, situ terbangun	20 Unit	70 Unit	Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		5) Pemanfaatan Agroteknologi Tepat Guna	Meningkatnya Nilai Tukar Petani yang berada disekitar	< 100	>100	Program Peningkatan Kesejahteraan	Pertanian	Dinas Pertanian

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		berbasis Pengelolaan DAS	Kawasan Hutan			Petani		
						Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Ketahanan Pangan	Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
	3. Pengendalian dan pengamanan tebing pada daerah rawan bencana banjir dan longsor	1) Pembangunan DAM Pengendali pada DAS/ Sub DAS Rawan Banjir	Terbangunnya DAM Pengendali Banjir pada Sub DAS Rawan Banjir	0 Unit	1 Unit	Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Perbaikan/Pembangunan Perkuatan Tebing			129.539 m	151.668 m				
2) Melakukan pengerukan sedimen pada sungai dan muara sungai		Normalisasi sungai	375.155 m	472.500 m	Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
3) Peningkatan kemampuan aparat teknis dan masyarakat untuk pengelolaan DAS		Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparat dan Masyarakat tentang Pengelolaan DAS	Belum Ada	1 Kegiatan/ Tahun	Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air	Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
2. Meningkatnya fungsi hidroorologis DAS untuk mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat yg lebih baik			Meningkatnya produktivitas lahan	Produktivitas belum optimal untuk komoditi utama	Produktivitas optimal untuk semua komoditi			

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Menerapkan Sistem Pertanian Konservasi (SPK) dalam menekan degradasi lahan dan mendapatkan hasil yang menguntungkan secara berkesinambungan	1) Intensifikasi penerapan sistem pertanian konservasi (SPK) di lahan pertanian tanaman semusim	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar. 1. Padi 2. Jagung 3. Kedele	Produktivitas tanaman pangan utama 4,77 Ton/Ha 5,54 Ton/Ha 1,01 Ton/Ha	Produktivitas tanaman pangan utama 5,13 Ton/Ha 5,99 Ton/Ha 1,13 Ton/Ha	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pertanian	Dinas Pertanian
		2) Intensifikasi penerapan sistem pertanian konservasi (SPK) di lahan perkebunan	Meningkatnya kesadaran perkebunan dalam penerapan sistem pertanian konservasi di lahan perkebunan	Sosialisasi sistem pertanian konservasi (SPK) di lahan perkebunan belum optimal	Terlaksana Sosialisasi /Bintek tentang penerapan sistem pertanian konservasi (SPK) di lahan perkebunan	Program Pengembangan Teknologi Pertanian	Pertanian	Dinas Perkebunan
		3) Penataan dan pengembangan sistem agroforestry (kebun campuran)	Terlaksananya penataan dan pengembangan sistem agroforestry	Sosialisasi agroforestry pada lahan pertanian rakyat	Pemasyarakatan teknik agroforestry pada lahan pertanian rakyat	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pertanian	Dinas Pertanian
						Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
		4) Penataan dan pengembangan sistem pertanian terpadu berwawasan lingkungan	Terlaksananya penataan dan pengembangan sistem pertanian terpadu berwawasan lingkungan	Sosialisasi sistem pertanian terpadu berwawasan lingkungan	Penerapan sistem pertanian terpadu berwawasan lingkungan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Pertanian Kehutanan	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan
	5) Mendorong pengembangan sistem pertanian organik	Cakupan bina kelompok petani (%)	3%	10%	Program Pengembangan Agribisnis	Pertanian	Dinas Pertanian	
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan, dilihat dari pendapatan per-kapita	Kurang dari Kebutuhan Hidup Layak atau UMR	Sama atau lebih dari Kebutuhan Hidup Layak atau UMR			

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2. Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan	1) Pengembangan UKM berbasis pengelolaan DAS	Terbentuknya UKM berbasis pengelolaan DAS	Belum terbentuk UKM berbasis pengelolaan DAS	Terbentuk UKM berbasis pengelolaan DAS pada 6 Kawasan DAS yang dipulihkan daya dukungnya	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan	
						Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Perindustrian Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Program Pembinaan dan Pengembangan KUMKM Yang Berwawasan Lingkungan	Koperasi & UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	
			2) Pemberian bantuan teknis dan permodalan untuk pengembangan Hutan Desa, hutan Kemasyarakatan, Hutan Kota dan Hutan Rakyat Kemitraan	Tersalurkannya bantuan teknis dan permodalan untuk pengembangan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Kota dan Hutan Rakyat Kemitraan	Bantuan teknis dan permodalan belum tersalurkan di semua Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Kota dan Hutan Rakyat Kemitraan	Bantuan teknis dan permodalan tersalurkan di semua Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Kota dan Hutan Rakyat Kemitraan	Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi	Kehutanan	Dinas Kehutanan
							Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Perindustrian Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM	Koperasi & UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
3. Terwujudnya peran serta masyarakat dan kelembagaan Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial yang lebih kuat			Meningkatnya pemahaman dan peran serta masyarakat dan kelembagaan dalam pengelolaan DAS secara terpadu	Belum terbentuk kelembagaan pengelolaan DAS pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kelompok Swadaya Masyarakat	Terbentuk dan terbinanya kelembagaan pengelolaan DAS pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kelompok Swadaya Masyarakat				

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					sebagai mitra kerja Forum DAS			
	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan DAS	1) Penyadaran publik melalui seminar, sosialisasi, diseminasi, pendidikan dan keterampilan terkait pengelolaan DAS secara terpadu	Publik menyadari pentingnya pengelolaan DAS secara Terpadu	Publik belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya pengelolaan DAS secara terpadu	Terlaksananya penyadaran publik tentang pentingnya pengelolaan DAS secara terpadu	Program Pendidikan Non Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PNFI & PAUD)	Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenagakerja	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
						Program peningkatan kapasitas perencanaan daerah	Perencanaan pembangunan	Bappeda
						Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Kehutanan	Kehutanan
						Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan informatika	Dinas Infokom Dinas
	2. Mendorong peran serta masyarakat untuk pengelolaan hutan yang lestari	2) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Masyarakat sekitar hutan berperanserta aktif dalam pengelolaan hutan secara lestari	Masyarakat sekitar hutan belum aktif berperanserta dalam pengelolaan hutan	Peranserta masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan minimal 50%	Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi	Kehutanan	Dinas Kehutanan
						Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Ketahanan Pangan	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2013)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Pemberdayaan stakeholder dan lembaga pengelolaan DAS secara terencana dan sistematis untuk peningkatan kinerja pengelolaan DAS dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pengkajian dan pengembangan, serta pendampingan masyarakat sehingga peduli, berpartisipasi dan ikut serta bertanggung jawab dalam pengelolaan DAS.	3) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS baik pada DAS yang dipulihkan daya dukungnya maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya.	Terwujudnya Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu melalui Kajian pada seluruh DAS (yang dipulihkan daya dukungnya dan yang dipertahankan daya dukungnya)	Telah tersusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu pada 6 DAS yang dipulihkan daya dukungnya, yakni DAS Padang, DAS Wampu, DAS Deli, DAS Asahan Toba, DAS Batang Gadis dan DAS Nias	Tersusunnya Kajian Rencana Pengelolaan DAS pada DAS lainnya yang dipulihkan daya dukungnya dan yang dipertahankan daya dukungnya	Program peningkatan kapasitas perencanaan daerah	Perencanaan pembangunan	Bappeda
		4) Penataan kelembagaan dalam pengelolaan DAS secara berkelanjutan melalui peningkatan peran dan fungsi Forum Koordinasi Pengelolaan DAS/Forum DAS	Terbentuk dan terbinanya kelembagaan pengelolaan DAS pada Tingkat Kabupaten/Kota (Forum DAS pada DAS/Sub DAS Kabupaten/Kota)	Kabupaten/kota membentuk kelembagaan pengelolaan DAS	Terbentuk dan terbinanya kelembagaan pengelolaan DAS di tingkat Kabupaten/ Kota (Forum DAS pada DAS/Sub DAS Kabupaten/Kota)	Program peningkatan kapasitas perencanaan daerah	Perencanaan pembangunan	Bappeda
			Terbentuk dan terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Community Based Organization (CBO)	Belum terbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Community Based Organization (CBO)	Terbentuk dan terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Community Based Organization (CBO) di tingkat tapak sebagai mitra kerja Forum DAS	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
						Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Peningkatan peran Masyarakat dalam kegiatan perencanaan, konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan prasarana peng.DAS dengan pelibatan masyarakat.	1) Penerapan Beneficiary Pays Principles bagi perusahaan yang memanfaatkan/mendapatkan jasa lingkungan	Tertindaknya penerapan Beneficiary Pays Principles bagi perusahaan yang memanfaatkan/mendapatkan jasa lingkungan	Belum terkoordinasinya perencanaan dan pengelolaan program CSR dari perusahaan besar yang memanfaatkan/mendapatkan jasa lingkungan	Terkoordinasinya perencanaan dan pembinaan program CSR perusahaan yang memanfaatkan/mendapatkan jasa lingkungan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	Badan Lingkungan Hidup
						Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air	Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		2) Penerapan Polluter Pays Principles bagi perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan (polusi)	Tertindaknya penerapan Polluter Pays Principles bagi perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan	Pembiayaan dari perusahaan besar bagi pemeliharaan lingkungan	Pembiayaan dari seluruh perusahaan bagi pemeliharaan lingkungan daerah hulu	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	Badan Lingkungan Hidup
						Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air	Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		3) Penerapan Cost Sharing sebagai pertanggungjawaban antar sektor dan antar wilayah hulu-tengah-hilir	Tertindaknya penerapan cost sharing sebagai pertanggungjawaban antar sektor dan antar wilayah hulu-tengah-hilir	Wilayah/sektor pemanfaatan jasa lingkungan (daerah hulu) membayar pemeliharaan lingkungan daerah hulu	Wilayah/sektor pemanfaatan jasa lingkungan (daerah tengah, hilir) membayar	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	Badan Lingkungan Hidup

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air	Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	4) Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan DAS termasuk kesepahaman dalam pengelolaan DAS dengan masyarakat dengan melakukan pengembangan sistem informasi yang akuntabel	1) Penciptaan sistem basis data dan utilitas untuk pelayanan informasi serta konsistensi penyediaan informasi	Terciptanya sistem basis data dan utilitas untuk pelayanan informasi serta konsistensi penyediaan informasi	Belum tersusun secara baik sesuai NSPK	Tersusunnya sistem basis data dan utilitas untuk pengelolaan dan pelayanan informasi Pengelolaan DAS Terpadu	Pengembangan data dan informasi	Perencanaan pembangunan	Bappeda
		2) Penyajian informasi tentang pengelolaan DAS yang akurat	Tertaksananya penyajian Informasi tentang Pengelolaan DAS Terpadu melalui media cetak, elektronik atau website	Belum Ada	Tersajinya Informasi tentang Pengelolaan DAS Terpadu melalui media cetak, elektronik atau website	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan informatika	Dinas Kominfo
		3) Menyusun nota kesepahaman dalam pengelolaan DAS secara terpadu	Tersusunnya nota kesepahaman dalam pengelolaan DAS secara terpadu	Belum tersusun nota kesepahaman dalam pengelolaan DAS secara terpadu	Tersusunnya nota kesepahaman dalam pengelolaan DAS secara terpadu antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan

Keterangan :

Laju rehabilitasi 1,75%/tahun

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Secara Partisipatif (PPSIP)

Mengingat negara kita umumnya, dan Sumatera Utara pada khususnya merupakan daerah agraris dan banyak masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka perencanaan strategis sangat perlu untuk mengarahkan bagaimana supaya sektor ini bisa menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Tentu sektor pertanian ini tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh sistem irigasi yang terintegrasi dengan pertanian. Maka membangun sistem irigasi dengan manajemen irigasi yang mampu menjawab kebutuhan pertanian perlu didorong terus kedepan agar bisa mendukung sistem pertanian masyarakat Sumatera Utara yang berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian pangan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan keirigasian nasional melalui program **Modernisasi Irigasi** pada seluruh Daerah Irigasi dalam pengertian bahwa modernisasi merupakan perubahan **MINDSET** dalam pengelolaan irigasi (**Efisiensi dan Tingkat layanan**). Modernisasi tersebut dilakukan pada 5 pilar irigasi (Ketersediaan Air, Infrastruktur Irigasi, Pengelolaan Irigasi, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia) dengan menggunakan pendekatan proses ABCDE-F (*Accounting, Bargaining, Codification, Delegation, Engineering, Feedback*).

Dalam upaya menciptakan tata kelola daerah irigasi yang efisien dan merata, diperlukan penyesuaian kelembagaan baik untuk kelembagaan pemerintah, swasta maupun kelompok petani. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja kerjasama melalui pengelolaan jaringan irigasi di tingkat atas (pemda setempat) dengan pengelola di tingkat bawah (P3A, GP3A dan IP3A) belum berjalan optimal. Permasalahan yang ditemui terindikasi banyak terjadi kerusakan jaringan sehingga kemampuan air terbatas mengairi lahan yang ada. Hal ini sangat penting dalam menghadapi otonomi daerah yang menuntut adanya sistem pengelolaan daerah irigasi yang semakin kompetitif dan profesional. Kebijakan pengelolaan irigasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi antara lain diarahkan untuk memperkuat Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI).

Perkembangan reformasi kebijakan pengelolaan irigasi sebagaimana diamanatkan, kebijakan yang dikembangkan dalam reformasi irigasi adalah pengembangan sistem dengan pola irigasi partisipatif. Instrumen yang cukup tepat untuk digunakan dalam program peningkatan pengelolaan daerah irigasi adalah Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK). Konsep ini mengarahkan bagaimana gambaran tentang kondisi sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan suatu daerah irigasi yang dibutuhkan oleh Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) untuk proses perencanaan program dalam meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif.

Perkembangan reformasi kebijakan pengelolaan irigasi tersebut di atas, mengamanatkan antara lain arah untuk memperbaiki kinerja pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi melalui paradigma baru yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat. Perbaikan kinerja tersebut diimplementasikan dalam reformasi irigasi melalui **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)** yang diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain dengan membangun sistem perencanaan yang dapat memberikan masukan positif dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif dengan mengacu kepada Profil Sosial, Ekonomi, Teknis, dan Kelembagaan (PSETK).

Landasan operasional dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Secara Partisipatif (PPSIP) di Provinsi Sumatera Utara adalah :

- Undang-Undang Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air;
- Undang-undang No. 41 Tahun 2008 tentang Perlindungan Lahan Pangan yang Berkelanjutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20/2006 tentang Irigasi;
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah;

- Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 26 Tahun 2010 tentang Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota;
- Permentan Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- Panduan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2009;

Kondisi ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan kemandirian dan swasembada pangan khususnya beras dan jagung dihadapkan kepada tantangan dan permasalahan dimana infrastruktur irigasi masih belum berfungsi secara optimal. Sekitar 40% jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dalam keadaan rusak demikian juga sebagian bangunan irigasi juga dalam keadaan rusak yang memerlukan perbaikan dan rehabilitasi, sehingga indeks pertanaman pada sebagian pertanaman padi sawah masih ada yang kurang dari kondisi minimal yang diharapkan yakni 120. Dampak yang ditimbulkan adalah timbulnya alih fungsi lahan pada sebagian daerah potensial tanaman pangan menjadi areal bukan tanaman pangan (kelapa sawit dan karet) dan peruntukan lainnya (industri, permukiman dan perumahan).

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat (*capacity building*) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder untuk berperan serta dalam pembangunan ketahanan pangan dan sumber daya air serta untuk meningkatkan kemandirian dan rasa memiliki melalui peran Kelembagaan Pengelola Irigasi (SKPD, P3A, GP3A, IP3A, Komisi Irigasi) Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota melalui penerapan prinsip-prinsip pengembangan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif (PPSIP).

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara Partisipatif adalah Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Prinsip Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara Partisipatif adalah :

- 1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh Pemerintah dan Pemda melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
- 2) Pemerintah dan Pemda memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan kemandirian.

Selain itu perlu ditingkatkan peran aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara Partisipatif.

Secara umum Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dapat dilihat pada matriks Tabel 7.7. berikut :

Tabel 7.7.
Kebijakan Umum Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Secara Partisipatif

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi - 1 : Membangun Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)									
Tujuan - 2 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik									
1.	Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan	1 Memberikan ruang partisipasi publik di dalam pembangunan	1 Peningkatan kualitas perencanaan daerah	1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif	-	5 Dok	1. Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Perencanaan pembangunan	Bappeda
Misi - 3 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional									
Tujuan - 4 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial									
2.	Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah	1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penumbuhan kawasan	1 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	1. Terbinanya dan terkoordinasinya perkuatan kelembagaan SDA Provsu (Komisi Irigasi, P3A/GP3A/IP3A)	4 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota	2. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
Misi - 5 : Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan									
Tujuan - 6 : Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan									
3.	Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya	1 Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana prasarana pertanian melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, embung, jalan desa dan jalan	1 Pemantapan Swasembada beras, jagung dan kedelai melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan	1. Produktivitas padi per hektar (Ton/Ha)	5,02	5,28	3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pertanian	Dinas Pertanian

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		usaha tani							
		2 Revitalisasi SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2 Memperkuat kelembagaan petani	2. Jumlah Kelembagaan Petani (orang)	725	3.625	4. Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Ketahanan Pangan	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3. Peningkatan Ketahanan Pangan, sesuai Instruksi Gubernur No. 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrem sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara Tahun 2012-2020.

Perubahan pola hujan sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sejak beberapa dekade terakhir, seperti awal musim hujan yang mundur pada beberapa lokasi, dan maju di lokasi lain (Ibrahim, 2004). Penelitian Aldrian dan Djamil (2006) menunjukkan jumlah bulan dengan curah hujan ekstrim cenderung meningkat dalam 50 tahun terakhir, terutama di kawasan pantai.

Naylor (2007) memprediksi Variabilitas curah hujan cukup tinggi di Sumatera Utara. Sejauh ini BMKG telah melakukan mapping terhadap karakteristik hujan di Sumatera Utara dengan membagi 16 kawasan masuk dalam Zona Musim (ZOM) dan 4 (empat) kawasan yang merupakan Non Zona Musim (Non ZOM). Identifikasi ZOM ini bertujuan untuk memudahkan mengenali kapan awal musim tiba dan kapan pula berakhir.

Dengan berkembangnya isu perubahan iklim, beberapa studi menunjukkan adanya tren-tren perubahan beberapa unsur iklim dari suatu daerah ke daerah lain yang berbeda-beda di Sumatera Utara. Misalnya, suhu minimum absolut di Sampali mengalami tren menaik sementara suhu maksimum absolut justru menurun. Awal musim serta panjang musim yang tidak tetap dan senantiasa memiliki perubahan dari tahun ke tahun.

Penyebab utama perubahan iklim adalah meningkatnya aktifitas manusia yang dimulai sejak revolusi industri. Dimana CO₂ dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batubara dan gas, selain itu CO₂ juga dihasilkan dari kegiatan penebangan hutan (deforestasi). Menurut Susandi (2010), data historis konsentrasi CO₂ meningkat dari tahun ketahun dan peningkatan secara drastis dimulai sejak di mulainya revolusi industri pada sekitar tahun 1900. Peningkatan konsentrasi CO₂ di atmosfer ini akan mengakibatkan naiknya temperatur permukaan bumi yang dapat menyebabkan melelehnya es di kutub utara dan kutub selatan, sehingga tinggi muka air laut pun akan mengalami peningkatan.

Perubahan iklim merupakan ancaman yang sangat potensial terhadap stabilitas ketahanan pangan karena sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim. Ketahanan pangan nasional Indonesia kerap kali menghadapi tantangan tidak ringan baik dari dalam maupun dari luar. Salah satu dimensi terbaru adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim akibat pemanasan global yang tidak terduga langsung berdampak pada ketahanan pangan nasional. Sudah pasti perubahan drastis demikian langsung berdampak pada kapasitas produksi pertanian dan ketersediaan pangan yang masih sangat bergantung pada iklim. Bahkan, sebagai akibat dari itu, situasinya kadang tidak lagi sekedar penurunan drastis dan krisis ketersediaan pangan. Tetapi, bahkan kadang di daerah-daerah tertentu karena terkena dampak langsung perubahan cuaca ekstrim, telah menyentuh situasi krisis atau darurat pangan. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim kini menjadi faktor penentu dalam pembuatan kebijakan ketahanan pangan nasional.

Masalah dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mencapai status ketahanan pangan mantap masih cukup berat. Rata-rata rasio cadangan pangan (beras) terhadap penggunaan masih 4,38 padahal yang diperlukan untuk mencapai status mantap adalah 20 persen ke atas. Di sisi lain, angka kemiskinan juga masih cukup tinggi. Sebagai gambaran, angka kemiskinan tahun 2008 adalah sekitar 15,1 persen, dan perkiraan sementara untuk tahun 2009 sekitar 14,2 persen; dan jika tidak ada terobosan khusus diperkirakan angka kemiskinan tahun 2015 masih sekitar 10,6 persen atau 26,3 juta orang dimana 18,1 juta diantaranya adalah penduduk pedesaan (Sudaryanto, 2009). Dengan tingkat kemiskinan seperti itu, jumlah penduduk yang kurang mampu mengakses pangan masih sangat banyak. Pada tahun 2008 yang lalu, jumlah penduduk yang masih termasuk kategori sangat rawan pangan masih sekitar 25,1 juta orang (11,1 %). Segala bentuk antisipasi dan peringatan dan respon dini terhadap segala kemungkinan terjadi krisis, kelangkaan dan darurat pangan akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrim penting dikembangkan. Konsepsi dan pendekatan dan mekanisme harus dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi ketahanan pangan. Mengingat bahwa status ketahanan pangan mantap masih memperhitungkan rata-rata rasio cadangan pangan (beras) terhadap penggunaan, maka salah satu dimensi pangan yang harus diantisipasi dalam menghadapi perubahan iklim ekstrim adalah keamanan produksi gabah/beras nasional. Untuk kepentingan sangat strategis tersebut telah dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem sebagai upaya mengamankan produksi gabah/beras nasional serta antisipasi dan respon cepat untuk menghadapi kondisi iklim ekstrim. Sumatera Utara telah merespon dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Sumatera Utara dalam menghadapi tantangan perubahan iklim terhadap ketahanan pangan khususnya Provinsi Sumatera Utara.

Secara umum Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan, sesuai Instruksi Gubernur No. 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrem sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara Tahun 2012-2020 dapat dilihat pada matriks Tabel 7.8, berikut :

Tabel 7.8.
Kebijakan Umum Pembangunan Lintas Bidang Ketahanan Pangan
(Adaptasi Iklim Ekstrem sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara Tahun 2012-2020)

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab			
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
Misi - 5 : Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan											
Tujuan - 6 : Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan											
1.	Meningkatnya daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya	1 Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana prasarana pertanian melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, embung, jalan desa dan jalan usaha tani	1 Pemantapan Swasembada beras, jagung dan kedelai melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan	1. Produktivitas padi per hektar (Ton/Ha)	5,02	5,28	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pertanian	Dinas Pertanian		
				2. Produksi Padi (Ton GKG)	3.549.371	4.087.420					
			2 Peningkatan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan	1. Ketersediaan energi perkapita minimal 2400 k.kal/hari dan penyediaan protein perkapita minimal 63 gr/hari	Karbohidrat 3868,41 K.kal	Karbohidrat 4068 K.kal	2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan			Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
					Protein : 76,18 gr	Protein : 96 gr					
3 Peningkatan sistem distribusi dan stabilisasi harga dan cadangan pangan	1. Ketersediaan cadangan pangan	66 ton	160 ton	3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan					
4 Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan	Terbinanya kelompok lumbung pangan masyarakat	53 lumbung	178 lumbung	4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan							
		84 gapoktan	109 gapoktan								

4. Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (RAD-MDGs 2011-2015)

Pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) merupakan pemenuhan komitmen internasional yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Laporan Pemerintah Indonesia pada Sidang Majelis Umum ke-65 (High-level Plenary Meeting on MDGS) yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 September 2010 di New York mengungkapkan bahwa kinerja pencapaian target MDGs Indonesia telah sejalan dengan kinerja pencapaian target MDGs yang tercantum dalam Laporan Pencapaian MDGs Global Tahun 2010.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyelesaikan penyusunan Peta Jalan (roadmap) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs, RAN MDGs, yang merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs, sebagaimana yang tercantum dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan terkait Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs, yang bertujuan untuk mendukung percepatan pencapaian target MDGs di daerah.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Untuk Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015 yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional (RAN MDGs) merupakan amanah setiap daerah untuk mengimplementasikan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang di dalamnya antara lain berisikan Percepatan Pencapaian MDGs.

Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs, Target Kinerja Pencapaian MDGs Sumatera Utara, Program MDGs Sumatera Utara, secara umum dapat dilihat pada Tabel 7.9 sebagai berikut :

Tabel 7.9.
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILLENNIUM (RAD-MDGs 2011-2015)

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target MDGs (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan	Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015	Peningkatan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat miskin.	Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional	8.75%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Sosial	Dinkessos Provsu dan Bappeda Provsu	
		Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Menurun	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinkessos Provsu dan Bappeda Provsu	
						Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinkessos Provsu dan Bappeda Provsu
						Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Sosial	Dis Tarukim Provsu dan Bappeda Provsu
	Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda	Penciptaan iklim yang kondusif, agar kegiatan usaha dapat tumbuh berkembang dan mandiri	Laju PDRB per tenaga kerja	menurun	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenaga Kerjaan	Disnakertran Provsu dan Bappeda Provsu	
					Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pokok PPK melalui Kerjasama antar Desa	Pemberdayaan Masyarakat	BAPEMMAS DAN PEMDES dan Bappeda Provsu	
		Penciptaan iklim yang kondusif, agar kegiatan usaha dapat tumbuh berkembang dan mandiri	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	80.18%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenaga Kerjaan	Disnakertran Provsu, Dis Tarukim Provsu dan Bappeda Provsu	
		Peningkatan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Meningkat	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	Ketenaga Kerjaan	Disnakertran Provsu dan Bappeda Provsu	

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target MDGs (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab				
1	2	3	4	5	6	7	8				
					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM	Ketenaga Kerjaan	Dinas UMKM Provsu dan Bappeda Provsu				
					Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM	Ketenaga Kerjaan	Dinas UMKM Provsu dan Bappeda Provsu				
					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM	Ketenaga Kerjaan	Dinas UMKM Provsu dan Bappeda Provsu				
					Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015	Penurunan Prevalensi Balita dengan berat badan rendah dan prevalensi gizi buruk	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	14.05%	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu
					Prevalensi balita gizi buruk		2.15%	Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu	
					Prevalensi balita gizi kurang		11,90%	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu	
					Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum: - 1.400 kkal/kapita/hari - 2.000 kkal/kapita/hari		8.50 %	Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu	
			35.32%	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu					
Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua	Target 2A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar	Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan dan keterampilan yang lebih berkualitas dan terjangkau secara ekonomis baik pendidikan formal	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A Proporsi murid kelas 1 yang berhasil mencapai kelas akhir (kelas 6) SD/ MI	100% 100%	- Program Pendidikan Non Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PNFI & PAUD) - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan Provsu dan Bappeda Provsu				

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target MDGs (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>maupun non formal bagi penduduk miskin, daerah terpencil kepulauan, serta pada anak penyandang cacat, anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelaianan fisik, emosional, mental dan sosial</p> <p>Pengembangan fasilitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik;</p> <p>Peningkatan partisipasi segenap komponen masyarakat dalam menjamin ketersediaan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau secara ekonomi</p>	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Program Pendidikan Menengah 	Pendidikan	Dinas Pendidikan Provsu dan Bappeda Provsu
Tujuan 3: Mendorong kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Target 3 A : menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal dan non formal yang responsive gender	Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas lainnya	Pendidikan	Dinas Pendidikan Provsu dan Bappeda Provsu
			Rasio Melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas lainnya	Pendidikan	Dinas Pendidikan Provsu dan Bappeda Provsu

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target MDGs (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
	lebih dari tahun 2015		15-24 tahun				
		Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang melalui sosialisasi, edukasi dan advokasi	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	57 %	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Pemberdayaan Perempuan	Biro PP, PA dan KBA Provsu dan Bappeda Provsu
		Peningkatan partisipasi perempuan dalam legislatif dan partai politik	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	25 %	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pendidikan Provsu dan Bappeda Provsu
Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak	Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015	Peningkatan akses pelayanan kesehatan terhadap bayi dan balita bagi penduduk miskin serta penduduk yang berada di daerah tertinggal	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	23	- Obat dan Perbekalan Kesehatan - Upaya Kesehatan Masyarakat - Perbaikan Gizi Masyarakat - Sumber Daya Kesehatan - Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu
		Peningkatan kesadaran lingkungan sehat, berperilaku hidup bersih dan pola gizi yang seimbang bagi bayi dan balita	Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup	34	- Obat dan Perbekalan Kesehatan - Upaya Kesehatan Masyarakat - Sumber Daya Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu
		Peningkatan cakupan imunisasi di semua desa dengan meningkatkan pelayanan posyandu dan pos pelayanan kesehatan lainnya	Proporsi anak berusia 1 tahun diimunisasi Campak	95%	- Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit - Sumber Daya Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target MDGs (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu	Target 5 A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990-2015	Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan bermartabat dengan membina dan memfasilitasi kemampuan pelayanan puskesmas dan rumah sakit umum daerah	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	102	- Obat dan Perbekalan Kesehatan - Upaya Kesehatan Masyarakat - Perbaikan Gizi Masyarakat - Sumber Daya Kesehatan - Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu
		Pemberdayaan rumah sakit umum provinsi sebagai pusat rujukan layanan kesehatan bagi ibu yang beresiko melahirkan di wilayah Sumatera Utara	Proporsi Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	94%	- Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan - Upaya Kesehatan Masyarakat - Sumber Daya Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu
	Target 5 B : Mewujudkan akses Reproduksi bagi semua pada tahun 2015	Peningkatan akses dan pengembangan kualitas pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Sumatra Utara melalui Revitalisasi Program KB dan penyerasian kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana, pemberdayaan masyarakat di bidang Keluarga Berencana dan	Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (Cara Modern)	60,4%	- Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Sumber Daya Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu
			Tingkat Kelahiran pada remaja (per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	15.9%	- Program Upaya Kesehatan Perorangan - Sumber Daya Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu
			Cakupan pelayanan Antenatal (K4)	95%	- Obat dan Perbekalan Kesehatan - Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu
			Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana / KB yang tidak terpenuhi)	6%			

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target MDGs (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi					
Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya	Target 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015	Peningkatan akses melalui penguatan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk mengantisipasi dan menghadapi epidemi yang ada	Prevalensi HIV	<0.5	- Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit - Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu
		Peningkatan akses pelayanan bagi penderita HIV/AIDS melalui kerjasama dengan sector terkait untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	95 %	- Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit - Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu
	Target 6 B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015	Peningkatan cakupan universal dan penguatan pelaksanaan melalui mobilisasi sosial yang berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang intervensi dan pencegahan penyakit malaria, memperkuat pelayanan kesehatan dalam pencegahan,	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral (ART)	90%	- Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit - Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target MDGs (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		pengendalian dan pengobatan, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di semua aspek, serta meningkatkan struktur manajemen dan tata kelola yang meliputi strategi, program kerja, dan sistem informasi					
	Target 6 C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya Tuberculosis (TB) hingga tahun 2015	Pemantapan komitmen tenaga kesehatan dalam penanganan kasus TB melalui deteksi dini dan survey ke daerah-daerah endemis	Angka kejadian TB (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/tahun	163	- Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit - Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu
Tingkat prevalensi TB (per 100.000 penduduk)			221	Kesehatan		Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu	
Tingkat kematian karena TB (per 100.000 penduduk)			46	Kesehatan		Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu	
Proporsi kasus TB yang ditemukan melalui DOTS			80%	Kesehatan		Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu	
Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS (cure rate)			95%	Kesehatan		Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu	
Penyediaan kelambu kelambu berinsektisida terutama bagi anak balita untuk mengurangi resiko kejadian malaria Pemantapan komitmen dari		Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	<1	Kesehatan		Dinas Kesehatan Provsu dan Bappeda Provsu	
		Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk)	51				
		Angka Kematian DBD	<1%	Kesehatan		Dinas Kesehatan Provsu dan	

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target MDGs (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		penentu kebijakan dan lintas sector melalui akselerasi implementasi Peraturan Daerah melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian derajat kesehatan masyarakat					Bappeda Provsu
Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Target 7A: memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang	Peningkatan rasio luasan kawasan tertutup pepohonan melalui peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang kritis dan potensial kritis; dan peningkatan fungsi RTH sebagai jantung kota dan upaya penghijauan di wilayah perkotaan	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Meningkat	- Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Tata Ruang	Dinas Tarukim Provsu, Dinas Kehutanan Provsu dan Bappeda Provsu
		Pengurangan emisi karbon dioksida melalui fasilitasi pencarian potensi cadangan energi baru dan penganekaragaman pemanfaatan energi terbarukan (energi alternatif) yang lebih ramah lingkungan, dan pengolahan gas cerobong pabrik	Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)e	10%	- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan dan energy terbarukan	Lingkungan Hidup dan energi	Badan Lingkungan Hidup Provsu, Dinas Pertambangan dan Energi Provsu dan Bappeda Provsu

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target MDGs (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengurangan jumlah konsumsi bahan perusak ozon melalui peningkatan kampanye hemat energi, pengurangan penggunaan refrigerant; dan pengurangan peredaran barang-barang ilegal yang menggunakan CFCs	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO)	Menurun	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan dan energy terbarukan - Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 	Lingkungan Hidup dan energi	Badan Lingkungan Hidup Provsu, Dinas Pertambangan dan Energi Provsu dan Dinas Perhubungan Provsu dan Bappeda Provsu
		Pengelolaan terpadu sumber daya perikanan dan kelautan guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya rehabilitasi dan konservasi sumber daya perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan perikanan tangkap - Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan - Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir - Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu dan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Bappeda Provsu
	Target 7B : menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2015	Mempertahankan fungsi hutan lindung melalui peningkatan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	24.85 % kualitas tutupan pohon pada kawasan lindung menjadi 75 %	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam - Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut - Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 	Kehutanan	Dinas Kehutanan, Dinas Tarukim, BLH, Bakorluh, dan Bappeda Provsu

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target MDGs (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					<ul style="list-style-type: none"> - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi 		
		Pengendalian kerusakan kawasan lindung melalui upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan serta fasilitasi penanganan pemulihan kerusakan lingkungan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	Meningkat	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 	Kehutanan	Dinas Kehutanan, Dinas Tarukim, BLH, Bakorluh, dan BAPPEDA Provsu
	Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015	Pencarian sumber dana untuk pembangunan WTP dan optimalisasi sistem perpipaan; Perencanaan pembangunan WTP sesuai kebutuhan pelanggan yang sangat besar dalam upaya pengurangan proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air bersih; Perencanaan Pembangunan booster dan optimalisasi perpipaan terencana untuk memperbaiki	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perKotaan dan perdesaan	71% (sesuai SPM Kemen PU)	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman - Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan - Program Pembangunan dan Pengelolaan Air Baku dan Sumber Air lainnya - Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air 	Pengairan	Dinas Tarukim, Dinas PSDA dan BAPPEDA Provsu
PerKotaan			56%				
Perdesaan			24%				

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target MDGs (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		tekanan air di rumah pelanggan					
		Pengurangan proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar melalui peningkatan ketersediaan prasarana sanitasi dasar melalui peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi pemukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan terutama bagi Rumah Tangga Miskin (RTM)	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perKotaan dan perdesaan	65% (sesuai SPM Kemen PU)	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya mineral, Geologi dan Air Tanah - Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air 	Pengairan	Dinas Tarukim, Distamben, Dinas PSDA dan Bappeda Provsu
	Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020	Prioritas pemenuhan kebutuhan rumah pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Proporsi rumah tangga kumuh perKotaan	0 %	Program Pembinaan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman	Perumahan	Dinas Tarukim, Distamben, Dinas PSDA dan Bappeda Provsu

5. Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAD PG 2011-2015)

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 13 dan 14 serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota bahwa penanganan bidang pangan dan kesehatan menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan kota.

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir ditandai dengan indeks kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Pada tahun 2010 ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 6,22%, meningkat menjadi 6,49% pada tahun 2011 dan 6,23% pada tahun 2012, sementara PDRB per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku juga meningkat dari Rp. 21.23 Juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 23,97Juta pada tahun 2011 dan Rp. 26,56 Juta pada tahun 2012.

Jika dicermati data capaian indikator makro kesehatan tahun 2010 menunjukkan masih tingginya Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI), yakni sebesar 268/100.000 kelahiran hidup, dan angka prevalensi balita kekurangan gizi sebesar 21,4%, sementara pada tahun yang sama AKI nasional sebesar 226/100.000 kelahiran hidup (angka perkiraan) dan prevalensi balita kekurangan gizi sebesar 17,9%. Dalam hal ini diperlukan upaya keras untuk mengakselerasi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang telah menetapkan target penurunan angka kematian ibu menjadi 102/100.000 kelahiran hidup dan prevalensi balita kekurangan gizi sebesar 15,5 %, di tahun 2015, yang berarti kita hanya memiliki waktu kurang dari 2 tahun.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Jika dilihat peta penduduk rawan pangan pada tahun 2009 menunjukkan situasi yang sedikit lebih baik. Jumlah penduduk Sumatera Utara yang termasuk kategori sangat rawan pangan yaitu dengan asupan kalori kurang dari 1.400 Kkal per orang per hari mencapai 14,48%, sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 14,47%. Namun masih ditemukan disparitas yang tinggi antar kabupaten/kota. Ini diakibatkan rendahnya aksesibilitas pangan, yaitu kemampuan rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya, untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi-seimbang, dan aman di tingkat rumah tangga. Hal ini berdampak pada semakin beratnya masalah kekurangan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak.

Sumatera Utara sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di luar Pulau Jawa dengan wilayah yang cukup luas, ketahanan pangan dan gizi merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan. Keberhasilan ketahanan pangan dan gizi di Sumatera Utara sebagai wilayah yang surplus pangan telah menjadi tolok keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik, sehingga hal ini menjadi sangat penting bagi Sumatera Utara untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi wilayah, rumahtangga dan individu yang berbasiskan kemandirian pangan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi Sumatera Utara secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability) yang selaras dengan RPJMD. Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, sehingga perlu ditindak lanjuti oleh daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pembangunan ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan tujuan pembangunan di Sumatera Utara. Oleh karena itu untuk mendukung peningkatan IPM tersebut, maka Sasaran RAD-PG Sumatera Utara Tahun 2015 adalah :

1. Penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang balita
2. Penurunan prevalensi pendek balita
3. Penurunan kerawanan pangan masyarakat
4. Peningkatan ketersediaan pangan berbasis kemandirian
5. Peningkatan keragaman konsumsi pangan masyarakat
6. Peningkatan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat
7. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
8. Memperkuat Kelembagaan Pangan dan Gizi

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, maka akan dilakukan berbagai program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Sumatera Utara 2011-2015 (RAD-PG 2011-2015). Program dirancang dalam satu rencana yang integratif dalam 5 pilar rencana aksi, yang terdiri atas :

1. Perbaiki gizi masyarakat terutama pada ibu pra hamil, ibu hamil dan anak balita
2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam
3. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan
4. Peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS)
5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Adapun tujuan pembangunan pangan dan gizi pada tahun 2011-2015 sebagai berikut :

1. Meningkatkan status gizi masyarakat dengan memprioritaskan pada penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang balita menjadi 14,05 persen, dan penurunan prevalensi pendek balita menjadi 32 persen, serta menurunkan kerawanan pangan masyarakat menjadi 10 persen pada tahun 2015.
2. Mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan berbasis kemandirian untuk menyediakan ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari.
3. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi 95 pada tahun 2015.
4. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada rumah tangga menjadi 60%.
5. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan dan meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan.

Secara umum Arah Kebijakan yang ditempuh RAD-PG Provinsi Sumatera Utara tetap mengacu kepada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2011-2015 yakni dengan mempercepat penurunan prevalensi kekurangan gizi pada ibu dan anak dan peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, yang ditempuh melalui beberapa arah kebijakan yakni :

1. Perbaiki gizi masyarakat. Arah kebijakan adalah : (a) peningkatan pembinaan Gizi masyarakat dan (b) peningkatan layanan kesehatan bagi pada ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi, dan anak balita;
2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. Arah kebijakan adalah : (a) pengembangan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dan mutu tanaman pangan sereal, aneka kacang dan umbi, tanaman buah, perkebunan, peternakan dan perikanan, (b) pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, (c) pengembangan pangan beragam jenis dan peningkatan keamanan pangan segar;
3. Peningkatan pengawasan Mutu dan keamanan pangan. Arah kebijakan adalah : (a) pengawasan makanan, termasuk pengujian di peredaran (b) pengawasan produk dan bahan berbahaya, (c) inspeksi dan sertifikasi makanan, termasuk sertifikasi ISTP IRT (d) peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh keamanan pangan (PKP) dan pengawas pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector), (e) bimbingan teknis dan monitoring pada industri rumah tangga pangan (IRTP), (f) bimbingan Teknis dan monitoring pada kantin sekolah;
4. Peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS). Arah kebijakan adalah menciptakan kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan

pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat, melalui pendekatan pimpinan, bina suasana dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui : (a) pembinaan PHBS pangan dan Gizi, dan (b) pengembangan kebijakan sehat bidang pangan dan gizi; dan

5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Arah kebijakan adalah : (a) penguatan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan pada level kabupaten/kota, (b) penguatan koordinasi antar insitusi di tingkat provinsi, koordinasi antar insitusi tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten, (c) peningkatan tenaga profesional di tingkat pemerintahan paling bawah yakni tingkat kecamatan dan desa, (d) peningkatan kelembagaan masyarakat tingkat desa, (e) perbaikan sistem pendataan pangan dan gizi, dan (e) penguatan lembaga sistem kewaspadaan pangan dan gizi di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat desa , (d) pengembangan inovasi ketahanan pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal.

Strategi yang ditempuh untuk implementasi kebijakan tersebut melalui :

1. Perbaikan gizi masyarakat. Peningkatkan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan berkelanjutan yang difokuskan pada intervensi gizi efektif pada ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi, dan anak baduta dan balita;
2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. Peningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang difokuskan pada keluarga rawan pangan dan miskin;
3. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan. Peningkatkan pengawasan keamanan pangan yang difokuskan pada makanan jajanan yang memenuhi syarat dan produk industri rumah tangga (PIRT) tersertifikasi;
4. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Peningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peran pimpinan formal serta non formal terutama dalam perubahan perilaku atau budaya konsumsi pangan yang difokuskan pada penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, perilaku hidup bersih dan sehat, serta merevitalisasi posyandu;
5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi di tingkat provinsi, dan kabupaten dan kota yang mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi.

Secara umum tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Aksi Pangan Dan Gizi (RAD-PG 2011-2015) dan target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2018 sebagaimana diuraikan pada Tabel 7.10, berikut ini :

Tabel 7.10.
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI (RAD-PG 2011-2015)

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target RAD-PG (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Penurunan prevalensi gizi kurang anak balita dan Penurunan Prevalensi pendek anak balita, dan pencapaian konsumsi pangan dengan asupan kalori 2000 Kkal/kapita/hari	Meningkatnya status gizi masyarakat dengan penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang balita menjadi 14,05 persen, dan penurunan prevalensi pendek balita menjadi 32 persen, serta menurunkan kerawanan pangan masyarakat menjadi 10 persen pada tahun 2015	Pilar-1 Gizi Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat terutama pada ibu pra-hamil, ibu hamil dan anak	Pembinaan Gizi Masyarakat					
			1. Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) (%)	85	1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2. Program Upaya Kesehatan Perorangan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			2. Persentase Balita Usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)	85				
			3. Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)	65				
			4. Persentase Ibu Hamil yang mendapat 90 tablet (%)	85				
			5. Cakupan Rumah Tangga mengkonsumsi garam beryodium (%)	92				
		6. Persentase Balita Gizi Buruk Ditangani (%)	100					
		Pilar-2 : Aksesibilitas Pangan						
		Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang beragam,						

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target RAD-PG (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		melalui :					
		1. Pengembangan Ketersediaan Pangan	1. Ketersediaan pangan dalam bentuk energi per-kapita/ hari minimal 2.200 K.kal (K.Kal)	3897	Program Peningkat an Produksi Tanaman Pangan	Pertanian	Dinas Pertanian
			2. Ketersediaan protein minimal per kapita/hari sebesar 57 gr/kapita/hari (Gr)	80.96	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertanian Perikanan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kelautan dan Perikanan
			3. Tersedianya cadangan pangan pemerintah di tingkat Kabupaten/kota minimal 100 ton ekuivalen beras dan ditingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras (Ton)	450	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			4. Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah dan atau lumbung pangan pada setiap provinsi dan kabupaten (Lembaga)	40	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target RAD-PG (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Penanganan Rawan Pangan	1. Wilayah rawan pangan yang tertangani (desa)	763	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			2. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans pangan dan gizi (SKPG) (%)	100	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			3. Tersedia Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) (Kab)	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			4. Jumlah Desa Mandiri Pangan (Desa)	145	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
		3. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Pangan	1. Lembaga distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di daerah produsen Pangan	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
		4. Pengembangan Panganeka ragam Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	1. Menurunnya konsumsi beras 1,5% per tahun (Kg/Kap/Thn)	126,89	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			2. Meningkatnya skor PPH wilayah	95,0	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target RAD-PG (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			tiap tahun		Diversifikasi Pangan		
		Pilar – 3 : Mutu dan keamanan pangan					
		1. Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh Kemananan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten /Kota (District Food Inspector)	1. Jumlah Tenaga penyuluh Kemananan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten /Kota (District Food Inspector) (Orang)	40	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Badan POM Dinas Kesehatan
		2. Bimbingan teknis pada Industri Rumah Tangga (IRTP)	2. Jumlah IRTP yang dilatih dan difasilitasi Disain dan Implementasi Cara Produksi Produk Pangan yang baik (CPPB) pada Industri Rumah Tangga	150	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Badan POM Dinas Kesehatan
			3. Monitoring dan Verifikasi Penerapan CPPB pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) (Kegiatan)	10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Badan POM Dinas Kesehatan
		3. Bimbingan Teknis dan Monitoring pada Kantin Sekolah	4. Jumlah Kantin Sekolah yang dilatih dan difasilitasi penerapan	100	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Badan POM Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target RAD-PG (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			prinsip-prinsip keamanan kantin sekolah (Kantin)				
			5. Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Prinsip-prinsip keamanan pangan pada kantin sekolah (Jumlah Kantin)	100	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Badan POM Dinas Kesehatan
			6. Pengawasan jajanan Anak Sekolah (PJAS)	1000	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Badan POM Dinas Kesehatan
			Pilar – 4 : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
		Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	1. Persentase persalinan ditolong oleh nakes (%)	90	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Badan POM Dinas Kesehatan
			2. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih (%)	75	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Badan POM Dinas Kesehatan
			3. Persentase rumah tangga dengan akses terhadap jamban keluarga. (%)	75	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Badan POM Dinas Kesehatan
			4. Persentase rumah tangga yang ber PHBS (%)	70	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Badan POM Dinas Kesehatan
			Pilar - 5 : Kelembagaan				

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target RAD-PG (2015)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pangan dan Gizi					
		Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi	Tersedianya kelembagaan pangan di daerah (Kab)	33	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			Jumlah Tenaga Kesehatan Gizi di Puskesmas D1-D3 (Orang)	75	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			Jumlah kecamatan yang mempunyai Tenaga PPL Pertanian yang mengikuti Pelatihan Pangan dan Gizi (Kecamatan)	132	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			Tersedianya data tingkat konsumsi energi dan protein	2 kab/kota	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			Tersusunnya program pangan dan gizi pada RPJMD	100	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

6. Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK 2011-2020)

Perubahan iklim merupakan tantangan paling serius yang dihadapi dunia pada saat ini. Sejumlah bukti baru dan kuat yang muncul dalam studi mutakhir memperlihatkan bahwa masalah pemanasan yang terjadi 50 tahun terakhir disebabkan oleh tindakan manusia yang mana temperatur di bumi telah naik secara cepat, perubahan iklim juga dipengaruhi oleh aktivitas matahari dan ozon serta kegiatan vulkanik dan sulfat. Namun sejak tahun 1960-an, penyebab utama naiknya temperatur bumi adalah akibat efek rumah kaca yang menurut sebagian ahli disebabkan oleh meningkatnya kandungan gas karbon dioksida dan partikel polutan lainnya di atmosfer bumi. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang memiliki kemampuan untuk dapat menyerap radiasi matahari yang dipantulkan oleh bumi, sehingga menyebabkan suhu dipermukaan bumi menjadi hangat. Menurut konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), ada 6 jenis gas yang digolongkan sebagai GRK, yaitu: karbondioksida (CO₂), dinitro oksida (N₂O), metana (CH₄), sulfurheksaflorida (SF₆), perflorokarbon (PFCs), dan hidroflorokarbon (HFCs).

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah kaca sampai tahun 2020, Pemerintah Sumatera utara merespon dengan menetapkan Pergub No. 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2020 yang merupakan kontribusi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sampai menjadi 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020 (Kesepakatan Internasional Copenhagen, 2009).

Rencana aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari aksi mitigasi baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung bersumber dari 6 bidang yang menjadi target penurunan emisi di Indonesia, yaitu: bidang pertanian, bidang kehutanan dan lahan gambut, bidang energi, bidang transportasi, bidang industri dan bidang pengelolaan limbah, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah yang tidak bertentangan dengan prinsip pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Sumber emisi GRK di Provinsi Sumatera Utara yang terbesar berasal dari sektor berbasis lahan yaitu Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut (12,2%), kemudian sektor yang berbasis energi, yaitu sektor industri (4,7%), energi (2,5%) transportasi (1,8%) dan yang terendah adalah sektor pengelolaan limbah (1,6%). Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara dapat menurunkan emisi GRK sebesar 63 juta tCO₂eq atau 24,8% dari baseline BAU. Kondisi ini berada dibawah target nasional sebesar 26 % pada tahun 2020.

Pelaksanaan RAD-GRK menganut sistem pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pihak terkait yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas, sehingga terbuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam implementasi RAD-GRK serta usulan kegiatan mitigasi dilakukan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan APBD, yang merupakan prioritas dari setiap sektor yang memungkinkan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan SDM dan pendanaan yang tersedia.

Tabel 7.11.
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
RENCANA AKSI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK 2011-2020)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				KondisiAwal (2013)	KondisiAkhir (2018)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi - 5: Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan								
Tujuan - 6 : Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdayasaing dan berwawasan lingkungan								
Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% dari kondisi Business As Usual (BAU) sampai dengan tahun 2020	Penurunan emisi pada sektor: Pertanian, kehutanan dan lahan gambut, transportasi, pengelolaan limbah, dan energi	1. Integrasi RAD-GRK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020	1) Penurunan emisi GRK sector pertanian (tCO ₂ eq)	1.808.758,299 ton eCO ₂ (15,43 % dari emisi BaU)	4.183.979,0	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Teknologi Pertanian • Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi 	Pertanian	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2. Implementasi RAD-GRK oleh masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya	2) Penurunan emisi GRK sector Kehutanan dan lahan gambut (tCO ₂ eq)	1.925.538,90 ton eCO ₂ (1.02 % dari emisi BaU)	23.027.594,7	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan • Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 	Kehutanan	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Bina Marga
		3. Promosi/sosialisasi RAD-GRK kepada seuruh stakeholders dengan target mendapatkan hibah luar negeri	3) Penurunan emisi GRK sector Industri (tCO ₂ eq)	0	3,260.000	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penataan Struktur Industri • Program Pengembangan Industri Kecil Menengah 	Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				KondisiAwal (2013)	KondisiAkhir (2018)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4) Penurunan emisi GRK sector energy (tCO2eq)	56,01 ton eCO2 (0.000265% dari emisi BaU)	4.316.000,0	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan Dan Energi Terbarukan 	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan energi
			Penurunan emisi GRK sector transportasi (tCO2eq)	105,1 0,000967656% dari emisi BaU	4.540.000,0	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan pelayanan angkutan • Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan • Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas • Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 	Perhubungan	Dinas perhubungan
			Penurunan emisi GRK sektor pengelolaan limbah (tCO2eq)	4.447 ton eCO2 (0,22 % dari emisi BaU)	2.028.568	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan • Program Pengendalian Pencemaran 	Perumahan Permukiman	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dinas Badan Lingkungan Hidup

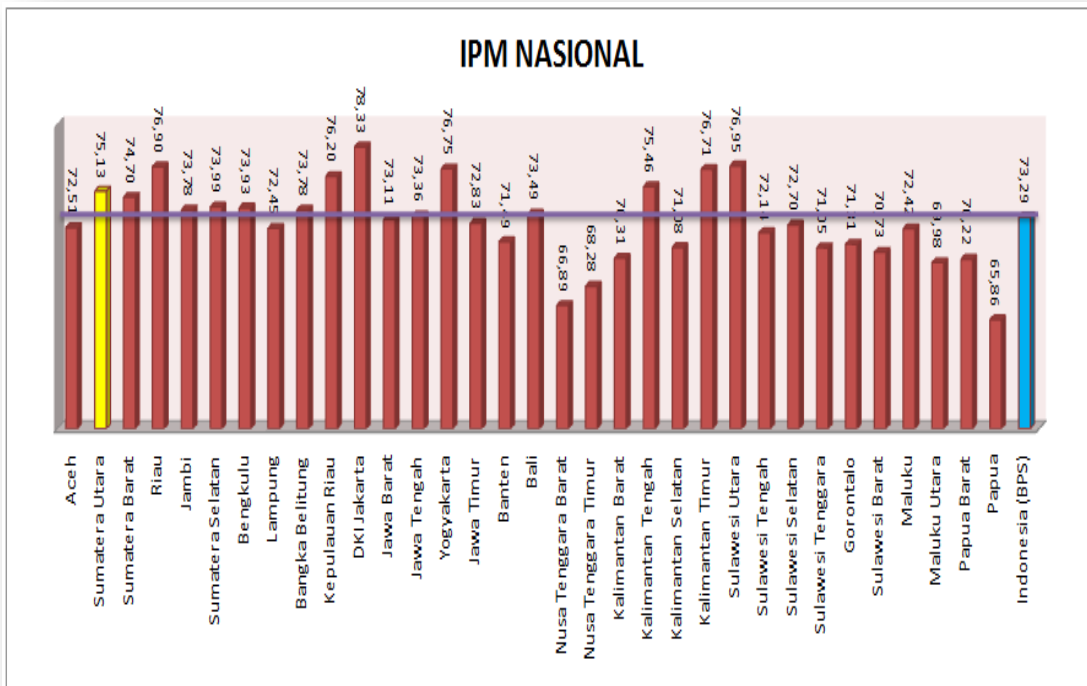
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						dan Perusakan Lingkungan Hidup		

7. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (RAD PUG 2013-2018)

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Belum lagi, persoalan lain seperti budaya, atau agama yang terkadang dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai kesetaraan gender.

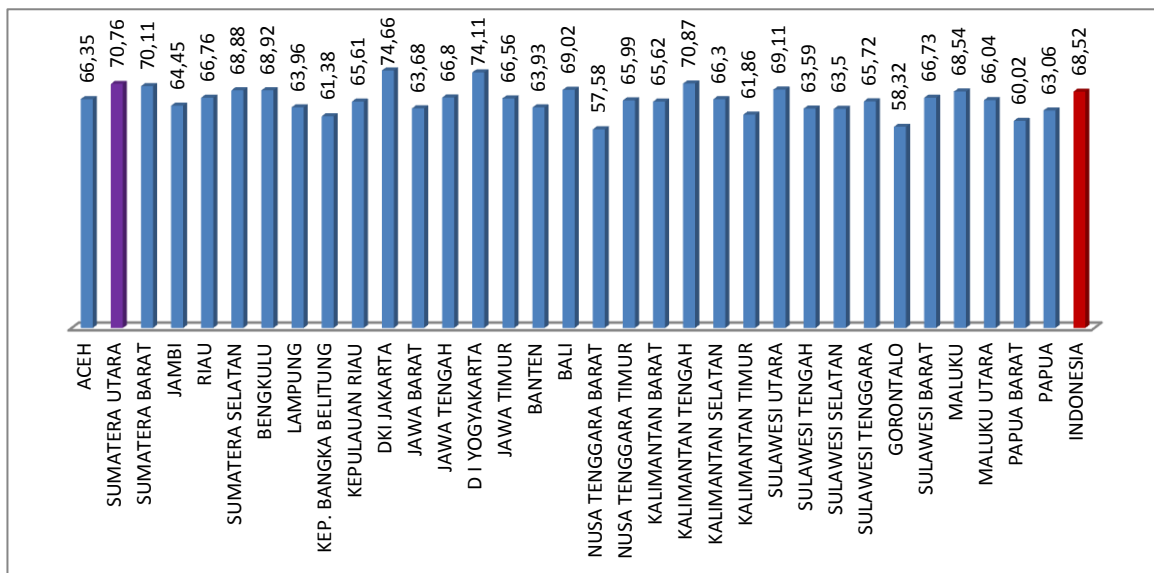
Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peranserta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus pemanfaat hasil pembangunan. Tuntutan akan kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan paling tidak memiliki dampak pada dua hal. Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang. Tetapi pada kenyataannya, selama ini peranserta kaum perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Faktor penyebab belum optimalnya peranserta perempuan dalam pembangunan karena masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan sehingga tidak mampu untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan mitra seajarnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Pada tahun 2004, IPM nasional mencapai 68,69 kemudian meningkat menjadi 73,19 pada tahun 2012, dimana Provinsi Sumatera Utara pada tahun yang sama telah mencapai IPM sebesar 75,13 persen, di atas rata-rata nasional dengan selisih sebesar 1,84 persen.



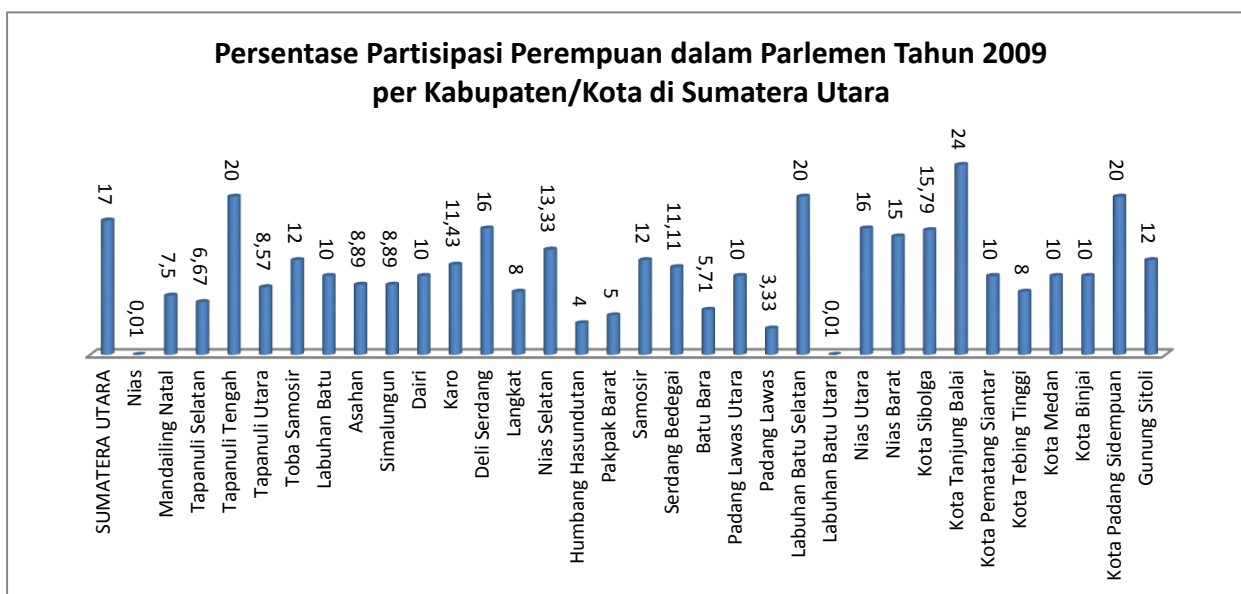
Hanya sayangnya, keberhasilan pembangunan kualitas hidup yang diukur melalui IPM masih belum cukup efektif memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam

pencapaian kapabilitas dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Fenomena kesenjangan ini secara statistik dapat ditunjukkan oleh pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang nilainya lebih kecil dari pencapaian IPM, baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Meski demikian, perkembangan pencapaian IPG dari tahun ke tahun terus meningkat, akan tetapi tidak secepat peningkatan IPM.



Sumber BPS, 2012

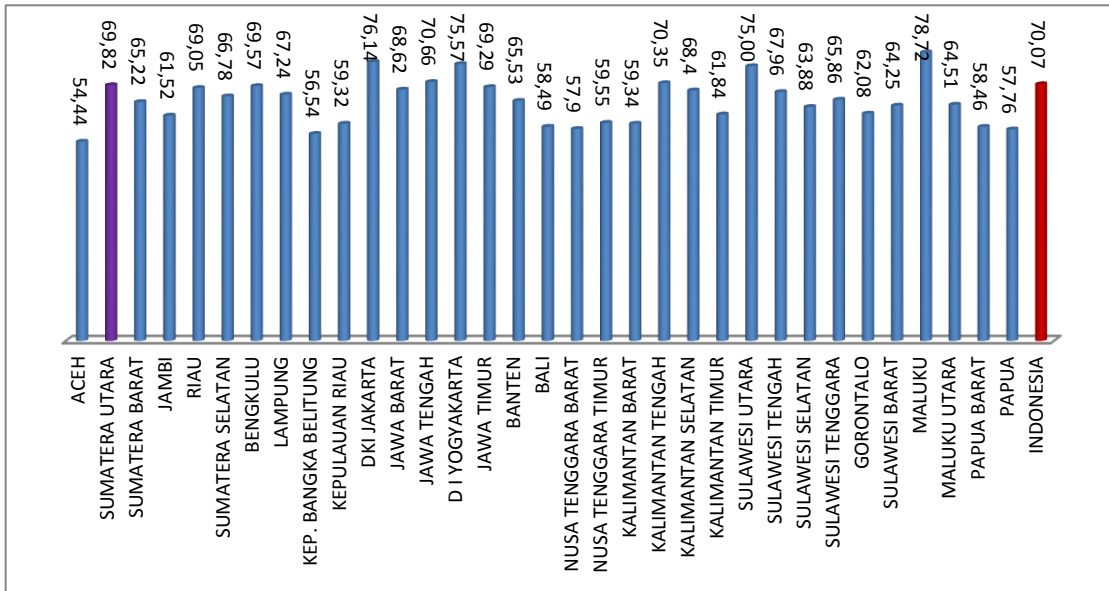
Dalam aspek pemberdayaan terutama keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, perempuan juga relatif tertinggal dibandingkan laki-laki. Ketertinggalan ini sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan apapun yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hasil pemilu legislatif tahun 2009 menempatkan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR hanya sekitar 17,49 persen dari keseluruhan jumlah anggota DPR RI, termasuk di antaranya adalah Provinsi Sumatera Utara.



Bahkan di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD jauh lebih kecil. Sementara itu, perempuan sebagai tenaga profesional, manager,

administrasi dan teknisi yang bekerja di lembaga eksekutif, yudikatif serta lembaga swasta lainnya tidak lebih dari 45,75 persen dari seluruh tenaga profesional, manager, administrasi dan teknisi. Namun demikian, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski relatif lambat.

IDG Provinsi se – Indonesia Tahun 2012



Permasalahan gender sesungguhnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara di dunia. Hal ini terlihat dengan dicetuskannya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Pada tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita atau Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*). Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan Negara-negara di dunia, mencakup:

1. Perempuan dan Kemiskinan;
2. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Perempuan;
3. Perempuan dan Kesehatan;
4. Kekerasan Terhadap Perempuan;
5. Perempuan dan Konflik Bersenjata;
6. Perempuan dan Ekonomi;
7. Perempuan dan Kekuasaan serta Pengambilan Keputusan;
8. Mekanisme Kelembagaan Untuk Kemajuan Perempuan;
9. Hak Asasi Perempuan;
10. Perempuan dan Media;
11. Perempuan dan Lingkungan Hidup; serta
12. Anak Perempuan.

UNDP dalam publikasi *Human Development Report (HDR)* tahun 1995 mengangkat tema mengenai gender. Publikasi tersebut menekankan bahwa pembangunan manusia merupakan upaya untuk memperluas pilihan bagi semua masyarakat, bukan hanya salah satu bagian dari masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang terkecualikan. Dalam publikasi tersebut juga tersirat pesan bahwa pengabaian aspek gender akan menghambat proses pembangunan di suatu wilayah.

Melalui publikasi tersebut UNDP sekaligus memperkenalkan suatu indeks untuk mengukur

pembangunan gender di suatu wilayah yaitu *Gender Development Index* (Indeks Pembangunan Gender/IPG) dan *Gender Empowerment Measure/GEM* (Indeks Pemberdayaan Gender/IDG). IPG adalah suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara capaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan IDG melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam Pembangunan Millennium (*Millennium Development Goals*) atau MDG's pada tahun 2015 adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Deklarasi yang telah disepakati oleh 189 negara anggota PBB pada tahun 2000 tersebut menjadi bukti keprihatinan negara-negara di dunia terhadap permasalahan ketidakadilan gender yang terutama kerap menimpa perempuan. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender terjadi akibat adanya perbedaan gender yang dikonstruksikan secara social, sehingga timbul perbedaan maupun pembatasan pada salah satu jenis kelamin. Adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk pada kedua belah pihak menyebabkan pandangan yang mendiskreditkan salah satu kaum yang umumnya adalah kaum perempuan.

Pentingnya aspek gender dalam pembangunan mendorong pemerintah untuk menyusun suatu strategi yang disebut dengan pengarusutamaan gender. Pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan INPRES Nomor 9 tentang Pengarusutamaan Gender yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

8. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei

Salah satu Produk industri Agro andalan Indonesia yang menjadi salah satu lokomotif dalam pengembangan ekonomi negara adalah CPO yang saat ini merupakan terbesar di dunia (Dengan produksi mencapai sekitar 20 juta ton pada tahun 2009. Pemerintah menargetkan produksi CPO dapat mencapai 40 juta ton pada tahun 2020).

Hingga saat ini, sebagian besar CPO kita masih diekspor, padahal apabila CPO ini diolah menjadi produk hilir, akan diperoleh nilai penjualan yang jauh lebih tinggi. Untuk memperoleh nilai tambah dari sekedar mengekspor bahan mentah, Pemerintah berupaya untuk mempercepat pengembangan industri turunan CPO, melalui pembentukan beberapa kawasan industri.

Pemerintah telah mencanangkan pembentukan 3 (tiga) kawasan industri berbasis komoditas kelapa sawit atau CPO, yaitu Kawasan Industri Sei Mangkei di Sumatera Utara, Kawasan Industri Dumai di Riau, dan Kawasan Industri Maloy di Kalimantan Timur. Keberadaan tiga kawasan industri ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi karena dapat menjadi pemicu pertumbuhan industri penyokong, seperti transportasi dan logistik.

Kawasan Industri Sei Mangkei dirancang menjadi suatu kawasan industri yang tertata rapi, nyaman, aman, asri dan berwawasan lingkungan sehingga sanggup menarik minat Mitra Patungan Usaha PTPN III untuk berkerja sama. Selain itu juga bertujuan untuk mengintegrasikan pembangunan pabrik-pabrik hulu dan hilir baik milik PTPN III maupun pabrik hilir usaha patungan hingga terjadi efisiensi yang berdampak naiknya nilai korporasi secara keseluruhan. Kawasan ini juga nantinya di dipersiapkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

Faktor yang menyebabkan dipilihnya Sei Mangkei menjadi Klaster Industri antara lain :

- 1) Letak lokasi Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM) berada di areal perkebunan kelapa sawit (Raw Material Oriented).
- 2) Dekat ke pelabuhan Kuala Tanjung milik PT. Inalum maupun PT. Pelindo I.
- 3) Ada jalur Kereta Api dari Gunung Bayu – Stasiun Perlanaan yang jaraknya dekat dengan KISM (\pm 2 Km). Sehingga bisa dikoneksikan dengan jalur existing ke Pelabuhan Kuala Tanjung

- 4) Telah ada pabrik kelapa sawit (PKS) milik PTPN III yang telah dibangun pada tahun 1997, yang letaknya jauh dari permukiman masyarakat umum sehingga masyarakat tidak terganggu oleh polusi suara atau polusi bau.
- 5) Sumber air melimpah dari sungai Bah Bolon
- 6) Berada dan dekat dengan beberapa PKS (berjarak kurang dari 70 km)

Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, Sei Mangkei merupakan kawasan industri, trading and processor yang berdiri sendiri di mana nantinya saham kepemilikannya dapat dimiliki oleh seluruh BUMN, baik BUMN perkebunan maupun pemerintah daerah dan investor lainnya.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, maka secara resmi berdirilah KEK Sei Mangkei yang secara letak batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Keramat Kuba, Kecamatan Bandar Perdagangan,
- Sebelah Selatan : PTPN IV Kebun Mayang,
- Sebelah Timur : PTPN IV Kebun Gunung Bayu,
- Sebelah Barat : Sungai Bah Bolon

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus pada pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Mengingat hal ini, Kawasan Ekonomi Khusus siap beroperasi bila terpenuhi seluruh kelengkapannya baik infrastruktur, sumber daya manusia maupun perangkat pengendalian administrasi.

Dan dalam rangka percepatan operasional KEK Sei Mangkei maka disusun rencana aksi penyelenggaraan KEK Sei Mangkei yang mencakup :

- 1) Pembentukan Kelembagaan dan Pelimpahan Kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Administrator KEK;
- 2) Pembangunan Infrastruktur, yang terdiri dari infrastruktur di dalam kawasan dan infrastruktur di luar kawasan;
- 3) Pelaporan

9. Pengembangan Regional Manajemen Kawasan Danau Toba

Sumatera Utara bersama seluruh pihak yang berkepentingan, membangun Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan, dengan memanfaatkan posisi geografi yang sangat strategis dan potensi demografi (sumber daya manusia) serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan antarwilayah. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah.

Pemecahan berbagai masalah di daerah tersebut tentunya memerlukan adanya suatu kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten dan terpadu serta dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum serta koordinasi dan kerjasama yang solid dari semua satuan kerja perangkat daerah dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Aksi ini dimaksudkan untuk menyusun suatu rangkaian program/kegiatan yang saling bersinergi dan menyeluruh dalam rangka mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai kawasan wisata berskala dunia.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Aksi ini adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan dan kelembagaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional kawasan Danau Toba, khususnya upaya pengentasan daerah atau kabupaten tertinggal di kawasan Danau Toba.

Ruang lingkup wilayah meliputi daerah kabupaten-kota yang berada di kawasan Danau Toba dan sekitarnya, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir, Karo, Simalungun, Toba Samosir, Pakpak Bharat dan Kota Pematangsiantar.

Ruang lingkup materi meliputi substansi kelembagaan dan indikasi kegiatan dalam upaya revitalisasi kelembagaan Regional Management Lake Toba, yaitu:

- Penguatan Visi, Misi dan Tujuan kelembagaan Regional Manajemen Kawasan Danau Toba;
- Penguatan peran Pakpak Bharat dalam upaya pengentasan kabupaten tertinggal di kawasan Danau Toba;
- Penyusunan indikasi program/kegiatan dalam mendorong kerjasama pembangunan dan meningkatkan ekonomi regional kawasan Danau Toba.

Penyusunan Rencana strategis dan Rencana aksi Regional Manajemen Kawasan Danau Toba diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir, Karo, Simalungun, Toba Samosir, Pakpak Bharat dan Kota Pematangsiantar dalam penetapan prioritas program/kegiatan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan dalam upaya pengembangan agrowisata dan agropolitan.

Kebijakan dan kesepakatan penting yang dimuat dalam Renstra dan Renaksi Regional Manajemen Kawasan Danau Toba menjadi landasan konsisten bagi anggota Regional Manajemen Kawasan Danau Toba untuk melaksanakannya secara bersama-sama dan terpadu guna mendorong percepatan pembangunan daerah.

Renstra dan Renaksi Regional Manajemen Kawasan Danau Toba juga menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya mendukung setiap tahapan implimentasi program/kegiatan tahunan pengembangan agrowisata dan agropolitan.

Selanjutnya, Renstra dan Renaksi Regional Manajemen Kawasan Danau Toba bermanfaat juga bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam suatu kawasan fungsional Regional Manajemen Kawasan Danau Toba untuk berkontribusi positif dan turut serta dalam mendorong peningkatan nilai tambah agrowisata dan agropolitan dari hulu-hilir serta mendukung sepenuhnya kerjasama antardaerah dalam kerangka kesatuan Regional Manajemen Kawasan Danau Toba.

Secara umum tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pengembangan Regional Manajemen Danau Toba dan target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2018 sebagaimana diuraikan pada Tabel 7.10, berikut ini :

Tabel 7.12.
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
PENGEMBANGAN REGIONAL MANAJEMEN DANAU TOBA

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (2018)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
Menyiapkan dokumen perencanaan dan kelembagaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional kawasan Danau Toba, khususnya upaya pengentasan daerah atau kabupaten tertinggal di kawasan Danau Toba	Terwujudnya kerjasama antar wilayah yang saling menguntungkan melalui penguatan kelembagaan dan kerjasama antar kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba	Penguatan kelembagaan dan kerjasama antar kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba, arah kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Danau Toba dalam kurun waktu 2013-2018	1) Terbentuknya kelembagaan dan kerjasama antar Kabupaten/Kota se-Kawasan Danau Toba	9 kab/kota, 1 bentuk kerjasama	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Penataan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Peremukiman, Bappeda
			2) Terbentuknya sistem informasi dan database pembangunan yang terintegrasi antar kabupaten/kota	1 sistem informasi dan database pembangunan	Program Pengembangan Data dan Informasi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan swasembada pangan yang berkelanjutan melalui percepatan pengembangan kawasan budidaya ekonomi berbasis masyarakat serta mempertahankan dan pengembangan sentra kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang ramah lingkungan	Percepatan pengembangan kawasan budidaya ekonomi berbasis masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan swasembada pangan yang berkelanjutan	1) Terbentuknya Kawasan Agropolitan berbasis tanaman pokok masyarakat	1 kawasan	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pertanian	Dinas Pertanian, Bappeda
			2) Terbentuknya pusat penelitian keunggulan komoditas dan kapasitas masyarakat	1 pusat penelitian	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi	Pertanian	Dinas Pertanian, Balitbang

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (2018)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya kawasan pariwisata berskala internasional dan nasional melalui pengembangan infrastruktur transportasi antarmoda yang handal dan lebih cepat menuju/dari, maupun antar Kawasan Danau Toba	Pengembangan infrastruktur transportasi antarmoda yang handal dan lebih cepat antar wilayah di Kawasan Danau Toba	1) Terbangunnya jaringan jalan <i>outer ring road</i> Kawasan Danau Toba	100 %	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga
	Terjaganya kelestarian ekosistem Kawasan Danau Toba sebagai kawasan lindung terhadap daerah bawahan dari fungsi hidrologisnya serta terjaganya kawasan cagar budaya batak	Menjaga kelestarian kawasan lindung dan budaya batak di Kawasan Danau Toba	1) Kualitas mutu air Danau Toba	Mutu Air Kelas I	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
2) Rehabilitasi fungsi hidrologis pada kawasan lindung dan kawasan budidaya hutan di Daerah Tangkapan Air dan Cekungan Air Tanah di Kawasan Danau Toba			100%	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Kehutanan	Dinas Kehutanan	
3) Revitalisasi situs-situs bersejarah dan kawasan cagar budaya batak			100%	Program Pengeloaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

10. Pengembangan Regional Manajemen Kepulauan Nias

Pembangunan daerah tertinggal merupakan isu krusial dan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia terkait dengan pembangunan nasional. Pembangunan daerah tertinggal merupakan amanah UUD 1945 yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, selama sebagian warganegara Indonesia masih mengalami kendala sosial, ekonomi, budaya akibat keterbatasan daya dukung daerah yang dihuninya. Pemerintah Indonesia menempuh berbagai upaya strategis terhadap penanganan daerah tertinggal dengan menempatkan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai salah satu dari 11 prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yakni prioritas ke 10 adalah: daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. Pemerintah memiliki target untuk mengupayakan pada tahun 2014 dapat mengentaskan daerah ketertinggalan paling sedikit 50 daerah kabupaten dari sekitar 183 kabupaten tertinggal di Indonesia. Prioritas penanganan daerah tertinggal di antaranya dilakukan melalui pengalokasian sumber daya yang lebih memihak kepada kelompok miskin dan daerah tertinggal, pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi, serta peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah yang tertinggal. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi disparitas tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Jawa, antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta membuka keterisoliran wilayah di wilayah-wilayah terpencil.

Didalam RPJMN 2010-2014 dinyatakan bahwa daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara terdapat di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, Tapanuli Tengah dan Pakpak Bharat. Upaya pengentasan kabupaten-kabupaten tertinggal ini secara sinergi dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan sinergitas pembangunan dan mempercepat pertumbuhan wilayah, perlu didorong peningkatan kerjasama dalam beberapa sektor pembangunan yang menjadi potensi unggulan daerah.

Sebagai kabupaten tertinggal yang terletak pada wilayah kepulauan yang sama, maka Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Utara akan diarahkan untuk senantiasa menjalin komunikasi yang intensif dan merumuskan kerjasama pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesatuan pembangunan wilayah yang terpadu dan komprehensif. Dengan demikian, maka upaya kerjasama tersebut secara logis akan melibatkan Kota Gunungsitoli sebagai wilayah yang juga terletak di Kepulauan Nias dan relatif lebih maju, dengan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang lebih lengkap, dan dapat menjadi lokomotif pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan pengentasan daerah tertinggal di wilayah Kepulauan Nias.

Dalam upaya menggerakkan dan meningkatkan perekonomian wilayah Kepulauan Nias dimaksud, yang berarti juga akan mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kepulauan Nias secara bertahap dan tuntas, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kerjasama antardaerah di Kepulauan Nias. Kerjasama antardaerah yang lebih maju dengan daerah tertinggal di segala sektor pembangunan merupakan langkah yang harus ditempuh guna mendukung kemajuan pembangunan daerah. Kerjasama pembangunan yang dikembangkan harus berdasarkan pada prinsip saling menghormati, saling menguntungkan dan saling mendukung.

Terkait hal diatas, maka Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginisiasi pembentukan Regional Management (RM) NIAS. RM NIAS merupakan bentuk kerjasama 5 (lima) daerah di wilayah Kepulauan Nias meliputi 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, dan 1 (satu) kota yaitu Kota Gunungsitoli. Kerjasama antardaerah dalam bingkai RM NIAS tersebut diyakini sebagai terobosan inovatif pembangunan dalam menggali berbagai potensi unggulan daerah, meningkatkan daya saing dengan mengutamakan nilai kompetitif wilayah sehingga nantinya secara berkelanjutan akan mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mengentaskan kemiskinan di wilayah Kepulauan Nias.

Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan tersebut, maka dibutuhkan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman bersama dalam memberi koridor arah kebijakan pembangunan bersama berbasis rumusan kerjasama yang disepakati oleh para

pemangku kepentingan. Dokumen itu disepakati oleh para kepala daerah di wilayah Kepulauan Nias dan disusun dalam bentuk rencana strategis dan rencana aksi RM NIAS.

Rencana Strategis (Renstra) RM NIAS memuat visi, misi, tujuan, sasaran/target jangka menengah, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan indikatif jangka menengah yang akan diimplimentasikan secara bertahap dalam mendukung pengembangan RM NIAS. Selanjutnya, dokumen ini memuat juga pagu anggaran indikatif program pembangunan yang diharapkan pendanaannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota se-Kepulauan Nias dan sumber pendanaan lainnya. Renstra dan Renaksi RM NIAS ini memfokuskan kerjasama pembangunan berbasis potensi ekonomi wilayah dengan arah pengembangan agroindustri perkebunan dan pariwisata.

Untuk mendukung implementasi dan operasional Renstra RM NIAS tersebut, maka disusun Rencana Aksi (Renaksi) RM NIAS. Rencana aksi ini memuat penjabaran usulan rencana aksi, strategi implimentasi, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi. Selain itu, juga fidudun matrik rencana aksi berupa program/kegiatan tahunan yang akan diimplimentasikan dalam mendukung pengembangan agroindustri perkebunan dari hulu-hilir dan pengembangan pariwisata. Dengan demikian, Renaksi merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra RM NIAS.

Secara umum tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pengembangan Regional Manajemen Kepulauan Nias dan target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2018 sebagaimana diuraikan pada Tabel 7.17, berikut ini :

Tabel 7.13.
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
PENGEMBANGAN REGIONAL MANAJEMEN KEPULAUAN NIAS

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (2018)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
Mengembangkan Kepulauan Nias sebagai Kawasan Agroindustri dan Pariwisata Dunia	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan organisasi kelembagaan RM NIAS;	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Terpilihnya manager, staf ahli, dan staf pendukung yang profesional	100%	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Penataan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, Bappeda
	Tersedianya sarana dan prasarana produksi perkebunan yang memadai	Penyiapan rencana pembangunan kluster agroindustri perkebunan komoditas karet dan kelapa	Tersusunnya dokumen <i>feasibility study</i> (FS)	1 dokumen	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Perkebunan	Dinas Perkebunan
			Tersusunnya Master Plan Kawasan	1 dokumen	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Perkebunan	Dinas Perkebunan
			Tersusunnya SID	1 dokumen	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Perkebunan	Dinas Perkebunan
			Tersusunnya Design Engineering Detail (DED)	1 dokumen	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Perkebunan	Dinas Perkebunan
Meningkatnya promosi dan publikasi pariwisata alam dan budaya Nias	Meningkatkan kualitas dan pemasaran objek wisata	Terlaksananya kegiatan Festival Budaya Nias	2 kegiatan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

11. Pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo)

Kawasan perkotaan mempunyai fungsi dan peran sebagai mesin penggerak pembangunan wilayah sehingga perlu memperhatikan hubungan keterkaitan perkotaan dan wilayah hinterland-nya yang sinergis serta kerjasama yang harmonis. Namun kawasan perkotaan tumbuh sangat pesat sebagai cermin kemajuan ekonomi telah membawa permasalahan yang rumit dan kemiskinan dari proses urbanisasi sehingga perlu dikelola perkembangannya dan dikendalikan secara serasi dalam satu kesatuan pengembangan wilayah. Sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah, pengembangan wilayah kawasan Perkotaan Mebidangro dilaksanakan melalui penataan ruang kawasan tersebut. Di samping itu, sebagai kawasan perkotaan sebagai tempat terkonsentrasinya penduduk dengan segala kegiatannya, maka perlu ditingkatkan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan dalam hal pelayanan publik, pengelolaan lingkungan perkotaan, peningkatan kapasitas fiskal, pengembangan kemitraan, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana serta permukiman yang memadai untuk mendukung aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat secara luas.

Penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro merupakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo merupakan bentuk dari penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan, dalam hal ini Kawasan Perkotaan Mebidangro ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional. Kestrategisan kawasan perkotaan Mebidangro antara lain dinilai dari:

- Kawasan Perkotaan Mebidangro berada pada posisi geo-strategis regional dan global yang menguntungkan yaitu Selat Malaka (jalur pelayaran kontainer global) dan kawasan pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara.
- Bagian dari Koridor Ekonomi Sumatera.

Konsep pelaksanaan penataan ruang, termasuk penataan ruang kawasan perkotaan seperti Kawasan Perkotaan Mebidangro adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Metropolitan Mebidangro telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Dukungan legalitas terhadap penetapan tersebut saat ini melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro. Dengan penetapan tersebut, Kawasan Mebidangro telah memiliki landasan hukum pengembangan wilayah yang sinergis dan kerjasama yang harmonis antarpemerintah daerah dalam Kawasan Perkotaan Mebidangro. Pasal 137 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 menyebutkan bahwa: (1) Dalam rangka pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja, serta pembiayaan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur. Pasal ini memberikan dasar dan ruang bagi daerah untuk melaksanakan pengelolaan kawasan perkotaan Mebidangro. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan kawasan perkotaan yang meliputi lebih dari satu wilayah administratif dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah pada hakekatnya sebagai cikal bakal terbentuknya sistem pengelolaan dan kelembagaan sebagai dasar manajemen pengelolaan kawasan perkotaan yang efektif. Disamping itu, kerjasama antar daerah merupakan perwujudan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro yang disebut di atas penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro bertujuan untuk mewujudkan:

1. Kawasan Perkotaan Mebidangro yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing secara internasional, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional di bagian utara Pulau Sumatera;
2. lingkungan perkotaan yang berkualitas dan keseimbangan tata air DAS;
3. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan
4. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro di atas, pemanfaatan ruang KSN Perkotaan Mebidangro memiliki ciri khas yang membedakannya dengan perkotaan lain karena perkotaannya yang berciri metropolitan. Penataan ruang untuk kawasan metropolitan adalah mengaturnya dalam beberapa pusat dan sub-pusat yang memungkinkan adanya pembagian hierarkial aktivitas-aktivitas sosial ekonomi metropolitan. Hal ini penting untuk menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Penataan ruang harus diarahkan sedemikian sehingga suatu pusat dapat mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial ekonominya dan yang proporsional terhadap kebutuhan pusat. Demikian juga di dalam sub-pusat terdapat fasilitas-fasilitas yang menunjukkan kejelasan fungsi pelayanannya. Untuk mencapai apa yang diinginkan tersebut maka kebijakan diarahkan pada perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya.

Secara garis besar perencanaan ruang kawasan metropolitan, harus memperhatikan 4 hal yaitu:

- 1) Kejelasan struktur;

Penataan ruang kawasan metropolitan harus mampu menunjukkan struktur tata ruang yang jelas yang terbentuk karena adanya pusat dan sub-pusat kegiatan yang saling terkait dan dihubungkan oleh sistem transportasi yang terpadu. Pusat dan sub-pusat mempunyai skala layanan yang harus dapat didefinisikan dengan baik. Pusat kawasan metropolitan, selain harus dapat melayani seluruh kawasan metropolitan tersebut, juga harus dapat melayani kebutuhan regional di luar kawasan metropolitan, bahkan nasional, karena tidak dapat disangkal bahwa kawasan metropolitan mempunyai peran yang sangat strategis di tingkat nasional. Sub pusat di kawasan metropolitan sebaiknya berupa kota satelit yang berfungsi untuk mendukung Pusat dalam pengembangan kawasan metropolitan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan tentunya lingkungan.

- 2) Kejelasan fungsi;

Struktur perkotaan dalam kawasan metropolitan harus mempunyai kejelasan fungsi masing-masing, walaupun beberapa perkotaan dapat mempunyai fungsi yang sama. Fungsi tersebut antara lain dapat berupa pusat bisnis, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat industri, pusat tempat tinggal (dormitory town), dan sebagainya. Kota pusat kawasan metropolitan biasanya menyandang fungsi sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, sedangkan kota-kota lainnya dapat berfungsi sebagai dormitory town, pusat pendidikan, dan sebagainya. Dengan adanya kejelasan fungsi tersebut maka diharapkan akan terbentuk sinergi antar kota-kota tersebut, dan terdapat kejelasan arah pengembangan masing-masing kota tersebut. Secara internal, di masing-masing kota tersebut juga perlu membentuk struktur tertentu berupa pusat kota yang berfungsi untuk melayani kota secara keseluruhan, dan sub pusat yang berfungsi untuk melayani bagian wilayah kota.

- 3) Efisiensi pemanfaatan ruang;

Keterbatasan ruang di kawasan metropolitan mengharuskan perencanaan penataan ruang harus memperhatikan keadilan. Ruang kota digunakan sesuai dengan nilai ruang yang terbentuk. Kawasan pusat kota misalnya, harus mempunyai kepadatan tinggi dan oleh karenanya jika untuk perumahan harus perumahan vertikal yang mampu mengakomodasi penduduk yang lebih banyak dan memungkinkan terjangkau dari berbagai tingkat ekonomi, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan ruang terbuka hijau yang cukup. Dengan demikian, termasuk dalam efisiensi

pemanfaatan ruang ini adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

4) Kemudahan transportasi;

Sistem jaringan transportasi yang jelas akan memudahkan mobilitas penduduk. Kemudahan transportasi juga terjadi jika ada pembagian fungsi ruang yang baik termasuk adanya fungsi campuran di pusat atau sub-pusat kegiatan kawasan metropolitan. Perencanaan dan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan tersebut harus lintas daerah dan menjadi acuan bagi daerah-daerah administratif yang menjadi bagian kawasan metropolitan tersebut. Kawasan metropolitan, walaupun terus bertambah besar, namun ruang yang tersedia hampir selalu kurang. Sementara itu, kawasan metropolitan yang besar juga peka terhadap perubahan lingkungan alamnya. Oleh sebab itu, pemanfaatan ruang kawasan metropolitan harus secara sadar dilakukan untuk mendapatkan keseimbangan lingkungan hidup sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diciptakan.

5) Penyediaan fasilitas perkotaan yang memadai.

Fasilitas perkotaan, baik berupa fasilitas pendidikan, maupun antara lain fasilitas kesehatan, fasilitas RTH, dan fasilitas perdagangan, perlu disediakan secara cukup di semua kota sesuai dengan hierarkinya. Dukungan fasilitas yang memadai tersebut akan dapat menunjang setiap kota-kota tersebut agar dapat berkembang sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan dengan demikian diharapkan akan mendorong berkembangnya saling sinergi antar kota-kota tersebut.

**Tabel 7.14.
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO**

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (2018)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan dan pengoptimalan kerjasama antardaerah se-Kawasan Perkotaan Mebidangro	Terbentuknya kelembagaan pengelola Kawasan Perkotaan Mebidangro;	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama Menteri, Gubernur Dan Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pembentukan kelembagaan	Disetujuinya naskah kesepakatan (MoU) kerjasama pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro oleh Pemerintah Daerah se-Kawasan Perkotaan Mebidangro dalam suatu kelembagaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro	1 dokumen	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Penataan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, Bappeda
			Fasilitasi dan koordinasi terwujudnya struktur kelembagaan yang efektif melaksanakan fungsi	100%	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Penataan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, Bappeda

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (2018)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui terpilihnya pengelola dan staf pendukung kelembagaan yang kompeten dan profesional				
Mewujudkan kawasan perkotaan sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk	Digunakannya Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan kebijakan spasial pembangunan sektoral lintas sektor maupun wilayah	Mewujudkan program utama untuk perwujudan struktur ruang lintas wilayah	Fasilitasi dan koordinasi terwujudnya TPA berskala regional	100%	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan	Perumahan dan Permukiman	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
			Fasilitasi dan koordinasi pembangunan IPAL berskala regional	100%	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan	Perumahan dan Permukiman	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
			Fasilitasi dan koordinasi pembangunan Jalan Tol Medan Binjai	100%	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga
			Fasilitasi dan koordinasi pembangunan Jalan Tol Medan – Kualanamu (Deli Serdang)	100%	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga

TUJUAN	SASARAN (TARGET GOALS)	STRATEGI/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (2018)	Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mewujudkan program utama untuk perwujudan pola ruang lintas wilayah	Koordinasi penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kawasan fungsional perkotaan	100%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Petaan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
			Koordinasi penyediaan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari setiap DAS dengan sebaran yang proporsional pada Kawasan Perkotaan Mebidangro	100%	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Kehutanan	Dinas Kehutanan

7.3 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

1. Strategi Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

- a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung;
- b. Membangun dan meningkatkan jaringan jalan lintas timur dan barat.
- c. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
- d. Meningkatkan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
- f. Mengembangkan pusat-pusat agropolitan dan agromarinepolitan untuk meningkatkan daya saing;
- g. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbaharukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan;
- h. Mengembangkan kawasan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
- i. Mempertahankan luasan lahan pertanian lahan basah yang ada saat ini;
- j. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah;
- k. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- l. Mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru untuk memenuhi swasembada pangan.
- m. Mempertahankan luasan kawasan lindung;
- n. Meningkatkan kualitas kawasan lindung; dan
- o. Mengembalikan ekosistem kawasan lindung.
- p. Mengendalikan perkembangan fisik permukiman perkotaan;
- q. Mendorong intensifikasi pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.
- r. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah provinsi;
- s. Menyediakan dan pemeratakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pemerintahan dan lain-lain).

2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara

- a. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat
- b. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk.
- c. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi kegiatan yang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-produktif.
- d. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah.
- f. Meningkatkan aksesibilitas dan pemeratakan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.

3. Arahan Pengembangan Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan wilayah Provinsi Sumatera Utara diarahkan memiliki 4 (empat) hierarki pusat pelayanan, yaitu:

- a. Pusat Kegiatan Nasional, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat pelayanan ini terletak di kawasan perkotaan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo).
- b. Pusat Kegiatan Wilayah, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

- c. PKW p, yaitu pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKW.
- d. Pusat Kegiatan Lokal, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan di Provinsi Sumatera Utara. Kota-kota sebagai pusat pelayanan tersier yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien sebagai sentra pelayanan kegiatan.

Penentuan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan sesuai dengan ketentuan sistem perkotaan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sedangkan penentuan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ruang kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera utara hingga akhir tahun perencanaan (tahun 2030).

Tabel 7.15.
Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Utara

No	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
1.	PKN	Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	Eksisting dan Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Provinsi - Pusat perdagangan dan jasa regional - Pusat distribusi dan kolektor barang & jasa regional - Pusat pelayanan jasa pariwisata - Pusat transportasi darat, laut, dan udara regional - Pendidikan tinggi - Industri
2.	PKW	Tebingtinggi	Eksisting	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan Kota - Perdagangan dan jasa
3.		Sidikalang, Kab. Dairi	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Industri pengolahan hasil pertanian - Perdagangan
4.		Pematangsiantar	Eksisting	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan Kota - Perdagangan dan jasa - Industri - Pendidikan
5.		Balige, Kab. Toba Samosir	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Perdagangan - Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hasil perikanan - Pelayanan jasa pariwisata - Pendidikan Tinggi
6.		Rantau Prapat, Kab. Labuhan Batu	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Perdagangan dan Jasa - Pengolahan hasil

No	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
					perkebunan
7.		Kisaran, <i>Kab. Asahan</i>	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Industri pengolah hasil perkebunan dan pertanian tanaman pangan - Perdagangan dan Jasa
8.		Gunung Sitoli	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Pariwisata Bahari - Pengolahan hasil perikanan
9.		Padangsidempuan	Eksisiting	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hasil hutan - Perdagangan dan Jasa
10.		Sibolga	Eksisiting	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan Kota - Pusat perdagangan dan jasa regional - Pusat pelayanan jasa pariwisata - Pengolahan hasil perikanan - Pusat transportasi laut - Pusat pendidikan
11.	PKL	Pangkalan Brandan, <i>Kab. Langkat</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan hasil pertambangan - Pengolahan hasil pertanian - Perikanan
12.		Stabat, <i>Kab. Langkat</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan - Industri Pengolahan hasil Pertanian
13.		Parbaungan, <i>Kab. Serdang Bedagei</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman Perkotaan - Industri - Perdagangan
14.		Sei Rampah, <i>Kab. Serdang Bedagei</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman Perkotaan - Pusat Pemerintahan - Perdagangan dan Jasa
15.		Limapuluh, <i>Kab. Batubara</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman perkotaan - Perdagangan dan Jasa
16.		Indrapura, <i>Kab. Batubara</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - Pelabuhan - Pengolahan hasil pertanian - Pendidikan kejuruan

No	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
17.		Perdagangan, <i>Kab. Simalungun</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan Hasil Perkebunan - Perdagangan
18.		Saribudolak, <i>Kab. Simalungun</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian tanaman pangan - Pendidikan kejuruan
19.		Pematang Raya/ Sondi, <i>Kab. Simalungun</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman perkotaan - Pendidikan
20.		Parapat, <i>Kab. Simalungun</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Perkebunan
21.		TanjungBalai, <i>Kota Tanjung Balai</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan Hasil perikanan Pelabuhan - Permukiman perkotaan
22.		Simpang Empat, <i>Kab. Asahan</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman Perkotaan - Pengolahan Hasil perikanan
23.		Aek Kanopan, <i>Kab. Labuhan Batu Utara</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan hasil perkebunan - Pengolahan hasil pertanian
24.		Labuhan Bilik, <i>Kab. Labuhan Batu</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Pengolahan hasil Perikanan - Jasa
25.		Aek Nabara, <i>Kab. Labuhan Batu</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan - pertanian tanaman pangan
26.		Kota Pinang, <i>Kab. Labuhan Batu Selatan</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian tanaman pangan - Perkebunan
27.		Gunung Tua, <i>Kab. Padang Lawas Utara</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian tanaman pangan - Perkebunan
28.		Sipirok, <i>Kab. Tapanuli Selatan</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan hasil perkebunan dan hutan - Pendidikan kejuruan
29.		Batang Toru, <i>Kab. Tapanuli Selatan</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan hasil perkebunan dan hutan - Pendidikan kejuruan
30.		Siabu, <i>Kab. Mandailing Natal</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan hasil pertanian - Pendidikan kejuruan
31.		Kotanopan, <i>Kab. Mandailing Natal</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan hasil pertanian - Pendidikan kejuruan
32.		Natal, <i>Kab. Mandailing Natal</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - Pertanian tanaman pangan
33.		Panyabungan, <i>Kab. Mandailing Natal</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan Hasil Hutan dan perkebunan - Pertanian tanaman pangan

No	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
34.		Sibuhuan, <i>Kab. Padang Lawas</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan - pertanian tanaman pangan
35.		Pandan/Pinangsori, <i>Kab. Tap. Tengah</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman perkotaan - Perdagangan dan Jasa
36.		Barus/Husor, <i>Kab. Tap. Tengah</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan tangkap - Perkebunan - Jasa
37.		Pangururan, <i>Kab. Samosir</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Jasa - Pengolahan Hasil pertanian
38.		Porsea, <i>Kab. Toba Samosir</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - pertanian tanaman pangan - Pengolahan hasil hutan
39.		Dolok Sanggul, <i>Kab. Humbang Hasundutan</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - pertanian tanaman pangan - Pengolahan hasil hutan - Pengolahan Hasil perkebunan
40.		Tarutung, <i>Kab. Tapanuli Utara</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - pertanian tanaman pangan - Pengolahan hasil hutan - Pengolahan Hasil perkebunan
41.		Siborong-borong, <i>Kab. Tapanuli Utara</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian Tanaman Pangan - Pengolahan hasil perkebunan
42.		Kabanjahe, <i>Kab. Karo</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Agroindustri - Pengolahan hasil perkebunan
43.		Brastagi, <i>Kab. Karo</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan - Pariwisata - Agroindustri
44.		Merek, <i>Kab. Karo</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian tanaman pangan - Perkebunan - Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan
45.		Tiga Binanga, <i>Kab. Karo</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian tanaman pangan - Perkebunan
46.		Kutabuluh, <i>Kab. Dairi</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian tanaman pangan - Perkebunan - Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan
47.		Salak, <i>Kab. Pakpak Bharat</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian tanaman pangan - Pendidikan kejuruan
48.		Gido, <i>Kab. Nias</i>		Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten

No	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
				baru	– Pengolahan hasil perikanan – Perkebunan
49.		Lotu, Kab. Nias Utara		Pengembangan baru	– Perikanan – perkebunan – Peternakan
50.		Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan		Revitalisasi	– Perikanan tangkap – Pariwisata Bahari
51.		Lahomi, Kab. Nias Barat		Pengembangan baru	– Perikanan tangkap – Perkebunan
52.	PKW p	Tanjung Balai		Revitalisasi	– Pengolahan Hasil perikanan Pelabuhan – Permukiman perkotaan
53.		Tarutung		Revitalisasi	– pertanian tanaman pangan – Pengolahan hasil hutan – Pengolahan Hasil perkebunan

Sumber: Hasil Analisis, 2012

4. Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara yang bertujuan untuk membangun akses secara berkesinambungan (*continuous access*) dan berjenjang dari satuan ruang lokal, pusat kegiatan lokal, pusat kegiatan wilayah, hingga pusat kegiatan nasional sebagai *inlet-outlet point* (bandara dan pelabuhan) dengan wilayah eksternal Sumatera Utara.

Strategi dari rencana pengembangan sistem jaringan transportasi umum antara lain

1. Mengembangkan sistem jaringan arteri primer sebagai penghubung antar PKN dan antara PKN dan PKW/PKWp, mengembangkan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara PKW/PKWp dengan PKL dan mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan sebagai penghubung PKN serta mengembangkan jaringan kereta api yang berfungsi sebagai penghubung antara pusat-pusat pertumbuhan.
2. Mengembangkan transportasi terpadu dalam rangka mendukung pengembangan PKN.
3. Mengembangkan tatanan pelabuhan dan kebandarudaraan untuk mendukung PKN dan PKW/PKWp.

5. Arahan Pengembangan Rencana Sistem Jaringan Energi

Pengembangan Rencana Sistem Jaringan Energi di Sumatera Utara terdiri dari energi listrik, minyak dan gas bumi serta batubara dan jenis energi lainnya diarahkan untuk tujuan terlaksananya penyediaan dan pemanfaatan energi listrik bagi kebutuhan aktifitas sosial dan ekonomi skala mikro hingga makro yang terjamin keandalan dan keseimbangan pengelolaannya. Sistem jaringan energi terdiri atas pengembangan penyediaan minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam skala regional.

Pengembangan jaringan energi bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan daya energi yang seluruh wilayah dalam kapasitas dan pelayanannya guna peningkatan kualitas hidup dan mendukung aspek politik dan pertahanan Negara, yaitu:

1. Pengembangan sistem penyediaan minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a. Sistem penyediaan dari Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Labuhan Batu dan Provinsi Riau (Pertamina Sumbangut);

- b. Pembangunan terminal gas terapung di kawasan Pantai Timur dan kawasan Pantai Barat yang potensial.
2. Pengembangan pembangkit tenaga listrik, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang telah ada antara lain PLTG/U Belawan, PLTG Paya Pasir, PLTG Glugur, PLTD Titi Kuning, PLTA Sipansihaporas, PLTA Renun, PLTA Meranti Utara, PLTA Nassau, PLTU Labuhan Angin, PLTA Inalum dan PLTA Inalum II, PLTA Sigura-gura, PLTP Sibayak, PLTM Kombih I dan II, PLTM Boho, PLTM Silang, PLTM Sibundong, PLTD G. Sitoli, PLTD T. Dalam; PLTMH Batang Gadis I dan II, PLTMH Aek Raisan I dan II;
 - b. pembangunan pembangkit listrik baru berdasarkan pertambangan batu bara, panas bumi, hidro meliputi : PLTU Labuhan Angin Tapanuli Tengah; PLTA Asahan III Asahan – Tobasa, PLTA Silau I (2 x 1,5 MW), PLTA Silau II (2 x 3,5 MW), PLTA Silau III (2 x 5,0 MW); PLTU New Sumut Sumbagut; PLTU Pangkalan Susu Langkat; PLTU Gunungsitoli; PLTU New Sumut Pangkalan Brandan Langkat; PLTU Sumut Infrastructure; PLTP Sibayak Karo; PLTP Sorik Merapi Mandailing Natal; PLTP Sarulla; PLTP Pusu Buhit; PLTP Symbolon; PLTP Sipaholon Tapanuli Utara, PLTU Rancong, PLTU Kuala Tanjung, PLTA Asahan I, PLTM Parlilitan, PLTM Parluasan, PLTM Pakat, PLTM Aek Hutaraja, PLTM Lae Une, PLTU Sumut-I, PLTU Sumut-2, PLTA Asahan IV dan V, PLTMH Lae Une, PLTMH Lae Kombih III dan IV, PLTMH di Kecamatan Parlilitan dan Pakkat, PLTMH Bah Belutu, PLTMH Bah Bulan, PLTMH Bah Kulistik, PLTMH Bah Hapesong Simalungun, PLTMH Bah Partamburan, PLTMH Bah Kaliat, PLTMH Bah Parjalapang, PLTMH Bah Bolut, PLTM/PLTMH di Kabupaten Karo; dan pembangkit listrik lainnya.
 - c. Pengembangan sumber energi baru yang berdasarkan potensi panas bumi, hydro power, biomassa dan biogas.
 - d. pengembangan sistem pembangkit mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin dan tenaga diesel dengan sistem jaringan terisolasi pada Pulau Berhala, pulau-pulau kecil atau gugus pulau serta kawasan terpencil dan pedalaman.
3. Jaringan transmisi tenaga listrik
- a. Sistem jaringan interkoneksi se-Sumatera dan sistem energi Asean; dan
 - b. Sistem jaringan transmisi SUTET dan SUTUT menyebar pada wilayah kabupaten/kota.

6. Arahan Pengembangan Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh wilayah dalam kapasitas dan pelayanannya guna untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung aspek politik dan pertahanan negara.

Jaringan telekomunikasi di Provinsi Sumatera Utara saat ini sudah menyebar ke 385 kecamatan, tetapi masih terdapat blankspot di 2.809 desa di Sumatera Utara. Saat ini tercatat 10 operator telekomunikasi dan 1.003 Menara Telekomunikasi yang menyebar di seluruh wilayah Sumatera Utara yang dibangun oleh para operator yang juga bertindak sebagai provider menara telekomunikasi.

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilaksanakan secara kombinasi baik sistem jaringan telekomunikasi teresterial (sistem kabel dan nirkabel) maupun sistem jaringan telekomunikasi satelit. Sementara itu pengembangan sistem jaringan telekomunikasi teresterial terkonsentrasi di wilayah Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera Utara dimana terdapat pusat-pusat pelayanan. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi satelit diarahkan di lokasi yang sulit terjangkau yaitu kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan. Arahan bagi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan pelayanan di Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Pengembangan sistem jaringan terrestrial meliputi sistem kabel dan nirkabel, yaitu:
 - a. Pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten/kota.
 - b. menata lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator.
 - c. pemanfaatan jaringan terrestrial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah blankspot pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil.
2. Pengembangan sistem jaringan satelit, untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi untuk melayani terutama wilayah kepulauan dan terpencil.
 - a. Pengembangan sistem jaringan terrestrial kabel serat optik di perkotaan PKN Mebidangro.
 - b. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi terrestrial kabel dan nirkabel di jaringan pusat pelayanan wilayah pantai timur dan pantai barat.
 - c. Pengembangan jaringan telekomunikasi satelit pada kota-kota PKW, kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan yaitu Pulau Berhala serta pembangunan Stasiun Bumi di Kabupaten Karo.
 - d. Pengembangan Menara Bersama Telekomunikasi untuk menghindari terjadinya hutan menara di kawasan perkotaan dan daerah komersil dan *blankspot* jaringan di wilayah perdesaan.
 - e. Peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan telekomunikasi, menuju *next generation network* yang efektif dan efisien.

7. Arahan Pengembangan Kawasan Lindung

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah hutan yang memiliki sifat-sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahnya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang memenuhi salah satu dan atau lebih kriteria di bawah ini :

- a. Kawasan yang mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980
- b. Kawasan yang mempunyai kemiringan lereng lapangan rata-rata lebih besar dari 45 %
- c. Kawasan yang mempunyai ketinggian 2000 m atau lebih di atas permukaan laut
- d. Kawasan yang mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15 %.
- e. Guna keperluan khusus ditetapkan oleh menteri kehutanan sebagai hutan lindung.

Kawasan hutan lindung menyebar di wilayah kabupaten/kota, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 luas hutan lindung + 1.325.596 hektar.

b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan di Bawahnya

Kawasan ini yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya terutama berkaitan dengan fungsi hidrorologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah serta perlindungan ekosistem subtropis. Pada Provinsi Sumatera utara yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan berada pada ketinggian 2.000 meter d.p.l. dengan kelerengan lebih besar dari sekitar 45 %, mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980, mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15 %, memiliki curah hujan tinggi dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan tanah gambut dengan ketebalan 3m yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa dan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Kawasan ini meliputi juga lahan gambut di Kabupaten Langkat, Humbang Hasundutan, Asahan,

Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Nias. Sementara kawasan resapan air tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan.

c. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melestarikan fungsi badan perairan dan kerusakan oleh kegiatan budidaya. Yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan berada pada sempadan pantai, sempadan sungai besar dan kecil, kawasan sekitar danau/waduk dan dam, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau kota ditetapkan 30% dari luas wilayah perkotaan.

Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat meliputi :

- a. Kawasan sempadan pantai yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota di wilayah pesisir pantai barat dan pantai timur;
- b. Kawasan sempadan sungai besar dan kecil yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
- c. Kawasan sekitar danau/waduk yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
- d. Kawasan sekitar mata air yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
- e. Kawasan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah kota yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota.

d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Di Provinsi Sumatera Utara yang termasuk pada kawasan ini meliputi: Kawasan suaka alam, kawasan suaka margasatwa, taman buru, kawasan pelestarian alam dan wisata alam, kawasan taman nasional dan taman hutan raya, kawasan cagar budaya, Pulau-pulau kecil, dan kawasan pantai berhutan bakau yang berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam serta pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya juga perlindungan dari pencemaran.

Pada Provinsi Sumatera Utara, yang termasuk ke dalam kawasan ini meliputi:

1. Kawasan cagar alam meliputi :Cagar Alam Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang, Cagar Alam Dolok Tinggi Raja di Kabupaten Simalungun, Cagar Alam Batu Gajah di Kabupaten Simalungun, Cagar Alam Martelu Purba di Kabupaten Simalungun; Cagar Alam Liang Balik dan Cagar Alam Batu Ginurit di Kabupaten Labuhan Batu; Cagar Alam Dolok Saut di Kabupaten Tapanuli Utara; Cagar Alam Dolok Sibual – buali di Kabupaten Tapanuli Selatan, Cagar Alam Dolok Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan, Suaka Alam Sei Ledong di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Cagar Alam Lubuk Raya di Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Kawasan suaka margasatwa meliputi Suaka Margasatwa Karang Gading kabupaten Deli Serdang, Suaka Margasatwa Langkat Timur Laut di Kabupaten Langkat; Suaka Margasatwa Siranggias di Kabupaten Pakpak Bharat; Suaka Margasatwa Dolok Surungan di Kabupaten Toba Samosir; Suaka Margasatwa Dolok Saut di Kabupaten Tapanuli Utara dan Suaka Margasatwa Barumon di Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Taman buru Pulau Pini di Kabupaten Nias Selatan;
4. Kawasan pelestarian alam dan wisata alam meliputi Taman Wisata Alam Sibolangit dan Bumi Perkemahan di Kabupaten Deli Serdang, Taman Wisata Alam di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Taman Wisata Alam Lau Debuk-Debuk dan Dalek Lancuk di Kabupaten Karo, Taman Wisata Alam Sicikeh-cikeh di Kabupaten Dairi, Taman Wisata Alam Sijaba Huta Ginjangdan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Kawasan taman nasional dan taman hutan raya meliputi Taman Nasional Gunung Leuser (merupakan cagar biosfer) di Kabupaten Langkat, Taman Nasional Batang

Gadis di Kabupaten Mandailing Natal, Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Karo;

6. Kawasan cagar budaya yang merupakan artefak hasil budaya yang bernilai tinggi tersebar di kawasan permukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan meliputi : Istana Maimun, Mesjid Raya, Mesjid Osmani, Bangunan Kota Tua, Kediaman & taman Chong A Fie di Kota Medan, Rumah Tradisional Lingga Barus Jahe di Kabupaten Karo, Rumah Adat Pematang Purba di Simalungun, Istana Kota Pinang Labuhanbatu Selatan, Istana Lima Laras di Kabupaten Batu Bara, Situs biara-biara di Kabupaten Padanglawas, Candi Portibi di Kabupaten Padanglawas Utara, Makam Batu, kawasan relijius Pusuk Buhit dan Permukiman Tradisional di Tomok Pulau Samosir, Rumah Adat, Rumah Tradisional Kawasan Megalit di Pulau Nias, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo di Kabupaten Nias Selatan, dan Kampung Sisingamangaraja Sionomhudon di Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Pulau-pulau kecil dengan luasan maksimal 10 km² di perairan pantai Barat dan di perairan Pantai Timur;
8. Kawasan Pantai Berhutan Bakau atau hutan mangrove, meliputi: wilayah Pantai: Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli. Jenis mangrove yang tumbuh adalah mangrove sejati (api-api) dan mangrove semu.

e. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa geologi, non geologi dan faktor manusia. Kawasan rawan bencana yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Kawasan rawan massa gerakan tanah/tanah longsor

Kawasan ini terletak pada sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah Utara - Selatan pada dasarnya potensial terhadap gerakan tanah, rayapan, longsor, gelombang pasang dan banjir bandang.

Termasuk dalam kawasan ini Kabupaten Tapanuli Utara pada Kecamatan Muara, Sipoholon, Dolok Sanggul, Lintong Nihuta, Baki, Raja, Siborong-borong, Pagaran, Onan Ganjang, Tarutung, Adian Koting, Pahae Julu, Pahae Jae; Kabupaten Samosir pada Kecamatan Simanindo, Pangururan, Sianjur Mula-Mula, Harian Boho, Palipi, Onan Runggu, Kabupaten Toba Samosir pada Kecamatan Laguboti, Porsea, Habinsaran; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Barus, Kolang, Tapan Nauli, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Siabu, Panyabungan, Batang Natal, Kotanopan; Kabupaten Pakpak Bharat pada Kecamatan Sitelu Taliutang Jahe, Sitelu Taliutang Julu, Taliutang Salak, Taliutang PGGs, Kerajaan; Kabupaten Dairi pada Kecamatan Tigalingga, Siempat Nempu, Silima Pungga-Pungga, Pegagan, Sumbul, Sidikalang, Parbuluan; Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Dolok Silau, Silimakuta, Dolok Pardamean, Sidamanik, Dolok Panribuan, Girsang Sipangan Bolon; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Namorambe, STM Hilir, Biru-biru, Sibolangit, STM Hulu, Bangun Purba, Kabupaten Karo pada Kecamatan Mardinding, Kutabuluh, Lau Baleng, Tiga Binanga, Simpang Empat, Kabanjahe, Barusjahe, Merek; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Padang Tualang, Bahorok, Salopian, Kwala, Sei Bingai; Termasuk Pulau Nias bagian Selatan dan bagian Tengah yaitu: Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias pada Kecamatan Hiliduho; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe serta Kota Gunung Sitoli pada Kecamatan Gunung Sitoli.

2. Kawasan rawan zona patahan aktif;

Posisi wilayah Sumatera Utara terhadap Pulau Sumatera yang terletak diantara Lempeng Asia dan Lempeng Australia mengakibatkan terdapatnya kawasan rawan pada zona tumbukan lempeng di wilayah pantai barat, wilayah daratan Sumatera Utara, dan wilayah pantai Kepulauan Nias.

3. Kawasan rawan gelombang pasang air laut, abrasi dan tsunami; gelombang pasang; rawan abrasi meliputi wilayah pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai Kepulauan Nias
4. Kawasan rawan banjir/ banjir bandang yang terletak di sepanjang pantai Timur yang dilalui oleh jalur lintas timur Sumatera dan wilayah pantai Kepulauan Nias. Termasuk dalam kawasan ini yaitu Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Silau Kahean, Raya Kahean, Bandar, Pematang Bandar, Dolok Batunanggar, Tapan Dolok, Siantar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja, Tanah Jawa; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Manduamas, Barus, Sorkam, Kolang, Tapan Nauli, Sibolga, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Natal, Muara Batang Gadis, Batahan; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Besitang, Tanjungpura, Gebang, Secanggang, Hinai, Stabat, Padangtualang, Bahorok.; Kabupaten Labuhan Batu pada Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, Pangkatan, Bilah Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Kecamatan Kualuh Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Kecamatan Kampung Rakyat dan Kota Pinang; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Tua, Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Biru-biru, Pantai Labu, Batang Kuis, Beringin, Lubuk Pakam; Kabupaten Serdang Bedagai pada Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Sei Bamban dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Termasuk juga pada Kabupaten Nias pada Kecamatan Idano Gawo, Gido; Kabupaten Nias Utara pada Kecamatan Tuhemberua, Lahewa, Alasa; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe, Sirombu, Kabupaten Nias Selatan pada Kecamatan Lolowau, Amandraya, Teluk Dalam, Lahusa; Kota GunungSitoli pada Kecamatan Gunungsitoli.

5. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung berada di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Mandailing Natal.
6. Kawasan Rawan Kebakaran hutan meliputi kawasan sepanjang kawasan Danau Toba.
7. Kawasan rawan letusan gunung berapi yang terdapat pada :
 - a. **Tipe A**, yaitu Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang pernah tercatat meledak paling tidak sekali sejak tahun 1600.
 - b. **Tipe B**, yaitu gunung api aktif yang tercatat tidak pernah meletus sejak tahun 1600. Sumatera Utara memiliki empat gunung api jenis ini, yaitu Gunung Sibayak di Kabupaten Karo; Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Toba Samosir; dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - c. **Tipe C**, yaitu gunung yang tidak pernah tercatat meletus. Namun melihat tanda-tanda di sekitar gunung itu, diyakini gunung itu adalah gunung api, yaitu Gunung Dolok Martimbang/Namoralangit/Hela toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

f. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:

1. Kawasan cagar alam geologi di Sumatera Utara adalah kawasan keunikan batuan dan fosil yaitu :
 - a. Batu gamping gloukonit Sibaganding, terdapat di daerah Parapat – Kabupaten Simalungun, mengandung fosil *Halobia* yang melimpah dan lokasi tipe *Halobia tobensis*;
 - b. Batumilmil, terdapat di daerah Kabanjahe Kabupaten Karo, berupa batu gamping gloukonit, berumur Perem, sangat jarang di Indonesia.

Kriteria kawasan keunikan batuan dan fosil adalah :

- a. memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
- b. memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil);
- c. memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
- d. memiliki tipe geologi unik; atau
- e. memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah atau imbuhan air tanah.

g. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas

- a. Kawasan lindung Taman Buru Pulau Pini di kepulauan Nias .
- b. Kawasan terumbu karang, meliputi:
 - 1) Pesisir pantai dan perairan Kepulauan Pulau Poncan Godang, Poncan Kecil, Pulau Unggas, Pulau Bakal, Pulau Tunggul Nasi, Pulau Bansalar dan Pulau Talam di Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - 2) Kepulauan Nias sekitar perairan Pulau Nias, Pulau Masin, Pulau Pasakek, Pulau Sumbawa dan Pulau Kasik, di Pantai Timur
 - 3) Perairan sekitar Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Arboretum Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal dan Arboretum Simanindo Kabupaten Samosir.

8. Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

a. Arahan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi

Dalam arahan tata ruang, kawasan budidaya hutan memiliki fungsi antara lain sebagai penghasil kayu dan bukan kayu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu, sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya, membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat disamping fungsi lindung dan konservasi, serta mendukung kehidupan dan ekosistem. Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, penggunaan lahan yang ada, serta hasil pemaduserasian, maka rencana pengembangan kawasan budidaya hutan produksi meliputi :

- a. Hutan produksi terbatas tersebar di seluruh kabupaten dan Kota Tanjungbalai.
- b. Hutan produksi tetap tersebar di seluruh kabupaten dan Kota Padangsidimpuan.
- c. Hutan produksi konversi tersebar di Kabupaten Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Kepulauan Nias.

b. Arahan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian

Peruntukan budidaya pertanian memiliki fungsi antara lain menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya serta membantu menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Kawasan budidaya pertanian mencakup kawasan peruntukan pertanian lahan basah, dan peruntukan pertanian lahan kering. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah, termasuk belukar rawa, seluas + 555.397 ha dan kawasan potensial sawah seluas + 279.039 ha, dimana yang selanjutnya ditingkatkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sementara kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas + 861.203 ha terdiri dari tegalan, ladang, kebun tanaman, peternakan dan kawasan pertanian lainnya. Pada kawasan pertanian lahan kering terintegrasi dengan peruntukan kawasan peternakan. Luasan bagi kawasan peruntukan pertanian lahan basah, dan peruntukan pertanian lahan kering adalah seluas + 1,416,600 ha.

Pertanian tanaman pangan lahan basah dan pertanian tanaman pangan lahan kering disebut sebagai tanaman pangan, yang terdiri dari dengan jenis tanaman padi sawah dan padi ladang, palawija, dan buah-buahan.

Pola pengembangan kawasan peruntukan pertanian terdiri dari pengembangan kawasan peruntukan pertanian lahan basah, kawasan potensial sawah, lahan kering

yang terintegrasi dengan kawasan peternakan, sentra produksi kawasan agropolitan dataran tinggi, dan kawasan agromarinepolitan, dan kawasan pertanian lainnya

Sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang, maka kegiatan pertanian tetap diarahkan sebagai basis perekonomian sesuai dengan ketersediaan sumberdaya dan diandalkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi pada awal tahun rencana. Dengan demikian, lahan pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering yang ada tetap dipertahankan sebagai lahan budidaya. Demikian pula lahan kering yang merupakan lahan pertanian tanaman pangan yang ada tetap dipertahankan dan dilakukan pengembangan pada lahan yang sesuai.

Dalam rangka mempertahankan swasembada pangan yang telah tercapai, maka berdasarkan hasil analisa, lokasi pertanian lahan basah yang tersebar di seluruh kabupaten tetap dipertahankan sebagai lahan pertanian abadi beririgasi teknis dan untuk beberapa lokasi dilakukan pengembangan pada lahan yang sesuai dan belum dimanfaatkan untuk kegiatan lain.

Pengembangan hasil produksi pertanian baik tanaman pangan lahan basah dan pertanian tanaman pangan lahan kering diarahkan pada kawasan agropolitan sebagai basis pemasaran dan hasil produksi pertanian tanaman pangan yang tersebar pada dataran tinggi Bukit Barisan yaitu Kota Merek di Kabupaten Karo, Siborong borong di Kabupaten Tapanuli Utara, Dolok Sanggul di Kabupaten Humbang Hasundutan, Lumban Julu di Kabupaten Toba Samosir, Harian di Kabupaten Samosir, Silimakuta di Kabupaten Simalungun, Sitingjo di Kabupaten Dairi, Siempat Rube di Kabupaten Pakpak Bharat, Siantar Martoba di Kota Pematangsiantar. Disamping itu juga akan dikembangkan agropolitan di Kabupaten Mandailing Natal, Serdang Bedagai dan Tapanuli Selatan.

Sementara itu di wilayah kawasan pesisir Pantai Barat dan pesisir Pantai Timur dikembangkan kawasan agromarinepolitan yang diarahkan pada potensi agropertanian, perikanan dan pariwisata.

c. Arahan Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kegiatan perkebunan terdiri dari perkebunan tanaman rakyat dan perkebunan besar berkembang tersebar di seluruh wilayah dengan berbagai jenis komoditi, dimana komoditi utama adalah kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, coklat, teh dan tebu.

Disamping komoditas tersebut, terdapat komoditas lainnya yang bersifat khusus karena merupakan salah satu komoditas pengembangan awal dalam sektor perkebunan di Sumatera Utara yaitu tembakau, atau yang lebih dikenal dengan "Tembakau Deli". Mengingat nilai historis dan ekonomisnya dalam pengembangan wilayah Sumatera Utara, maka keberadaan kawasan peruntukan perkebunan "Tembakau Deli" ini harus dijaga keberlanjutannya. Hal ini dilakukan karena terdapat komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan tembakau sehingga berpotensi beralih fungsi menjadi, yaitu komoditas non – tembakau.

Pengembangan perkebunan terbesar diarahkan ke beberapa lokasi yang sesuai dan memiliki potensi meliputi meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal serta Pulau Nias.

d. Arahan Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan dan Kelautan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Kegiatan perikanan di Provinsi Sumatera Utara selama ini didominasi oleh perikanan tangkap dibandingkan perikanan budidaya.

Pemanfaatan lahan untuk perikanan budidaya tersebar di seluruh kabupaten/kota, sedangkan perikanan tangkap dikembangkan di seluruh daerah kabupaten/kota yang memiliki kawasan laut, terutama Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, Gunungsitoli, Kota Sibolga, dan Kota Medan.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap tersebar di Pantai Timur maupun Pantai Barat Sumatera Utara, diantaranya adalah di Kabupaten Langkat: PPI Pangkalan Susu, PPI Pangkalan Berandan, PPI Kuala Gebang; Kota Medan : PPI Kampung Nelayan, PPI Bagan Deli; Kabupaten Deli Serdang : PPI Percut, PPI Hamparan Perak, PPI Pantai Labu; Kabupaten Serdang Bedagai: PPI Pantai Cermin, PPI Tanjung Beringin, PPI Sialangbuah, PPI Bandar Khalipah; Kabupaten Batu Bara : PPI Lalang/Perupuk, PPI Pangkalan Dodek, PPI Tanjung Tiram; Kota Tanjung Balai : PPI Teluk Nibung; Kabupaten Asahan : PPI Asahan Mati, PPI Bagan Asahan, PPI Rantau Panjang; Kabupaten Labuhan Batu : PPI Sei Berombang ; Kabupaten Labuhan Batu Utara : PPI Tanjung Ledong

Kabupaten Tapanuli Tengah: PPI Sorkam, PPI Barus; Kota Sibolga: PPI Sarudik; Kabupaten Mandailing Natal: PPI Batahan, PPI Natal, PPI Sikara-Kara; Kota Gunung Sitoli : PPI Gunung Sitoli; Kabupaten Nias Selatan : PPI Lahusa, PPI Teluk Dalam, PPI.

Pengembangan pemanfaatan lahan bagi perikanan tangkap atau sebagai bagian dari agromarinopolitan lebih lanjut diarahkan pada kawasan pantai Barat, pantai Timur, dan Kepulauan Nias.

e. Arahan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan

a. Bahan Tambang Minyak dan Gas Bumi

Potensi penambangan tambang minyak bumi meliputi Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Utara. Rencana Pengembangan Penambangan tambang minyak bumi yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias.

b. Bahan Tambang Panas Bumi

Bahan tambang panas bumi tersebar pada beberapa tempat antara lain di Gunung Sibayak Kecamatan Tigapanah di Kabupaten Karo; Dolok Merawan Simalungun; Pusuk Buhit Danau Toba dan Simbolon Kabupaten Samosir; Kabupaten Langkat; Sampuraga, Roburan Mandailing Natal; Kecamatan Sarulla dan Namolangit, Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara; Kabupaten Deli Serdang; Kabupaten Tapanuli selatan.

c. Potensi Gambut

Rencana pengembangan lahan gambut terdapat di Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan; Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Padangtualang Kabupaten Langkat;

d. Bahan Tambang Batu Bara

Potensi keberadaan batubara terdapat di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten

Padang Lawas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan.

e. Bahan Tambang Radio Aktif

Potensi radioaktif terdapat di Tapanuli Tengah dan Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni berupa Radium (Ra).

f. Bahan Tambang Belerang

Potensi belerang terdapat di KabupatenKaro, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Mandailing Natal.

g. Bahan Tambang Mineral

Bahan tambang mineral yang terdapat untuk dikembangkan terdiri dari bahan tambang mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan yang terdapat pada :

1) Tambang Mineral Logam

Bahan tambang mineral logam di Sumatera Utara terdiri dari 22 (dua puluh dua) jenis dengan sebaran sebagai berikut.

Tabel 7.16.
Sebaran Potensi Bahan Tambang Mineral Logam di Provinsi Sumatera Utara

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
1	Antimoni	<ul style="list-style-type: none"> •Gunungsitoli, Kabupaten Nias •Batangasih Batanglubuk •Kabupaten Mandailingnatal. •Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan •Desa Bangko, Kecamatan Batangnatal, Kabupaten Mandailingnatal
2	Arsen	<ul style="list-style-type: none"> • Gunung Marisi, Siayu, Batangasih, Batanglubuk, Kab. Mandailing natal • Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu • Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan • Kabupaten Padang Lawas Utara
3	Barit	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasamosir • Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga
4	Bauksit	<ul style="list-style-type: none"> • Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu • Kabupaten Labuhan Batu Selatan • Kabupaten Padang Lawas Utara • Kabupaten Mandailing Natal
5	Belerang	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Sibanggortonga Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailingnatal • Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailingnatal • Desa Namorailangit, Kecamatan Pahaejulu, Kabupaten Tapanuli Utara • Desa Situmeang, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara • Gunung Pusukbuhit, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir • Desa Banuaji, Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara • Gunung Sibayak, Kecamatan Simpangempat Kabupaten Karo • Gunung Sinabung, Kecamatan Payung Kabupaten Karo • Kabupaten Tapanuli Selatan
6	Besi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelah barat Pulau Nias, Kabupaten Nias • Aeksorik, Aekhorsik, Siayu, Kecamatan Kotanopan Kab Mandailingnatal • Kabupaten Tapanuli Selatan • Kabupaten Padang Lawas Utara • Kabupaten Humbang Hasundutan • Kabupaten Tapanuli Tengah
7	Bismuth	<ul style="list-style-type: none"> • Batanggadis, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailingnatal • Pulau Samosir, Kabupaten Samosir
8	Kromium	<ul style="list-style-type: none"> • Batangnatal, Kecamatan Batangnatal Kab Mandailing natal • Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailingnatal
9	Emas	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Pagargunung, Kecamatan Kotanopan Kab Mandailingnatal • Desa Sinunukan, Desa Muarasoma, Kec Batangnatal Kab. Mandailingnatal • Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailingnatal • Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailingnatal • Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan • Desa SikuikkuikK, Kec Padangsidempuan Barat, Kab Tapanuli Selatan • Gunungmeriah, Kecamatan Gunungmeriah Kabupaten

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
		Deliserdang <ul style="list-style-type: none"> • Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi • Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Desa Toralaulu • Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan • Dolok Pinapan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbanghasundutan • Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat • Padang Lawas
10	Perak	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Pagargunung, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailingnata • Desa Batahan, Kecamatan Batangnata Kabupaten Mandailingnata • Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan
11	Tembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Batanggadis, Aekkorsik, AekSORIK, AekKulbungnagodang, Batanglobung • Kecamatan Batangnata Kabupaten Mandailingnata • Pagargunung, Patahajang, Kec Kotanopan, Kabupaten Mandailingnata • Desa Aekhabil, Kec Sibolga (9 KM selatan timur) Kab Tapanuli Tengah • Dolokpinapan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan • Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi • Kabupaten Tapanuli Selatan • Kabupaten Padang Lawas Utara
12	Florit	<ul style="list-style-type: none"> • Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu
13	Mangan	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Simpanggambir, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailingnata • Desa Natal, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailingnata
14	Merkuri	<ul style="list-style-type: none"> • Seisampali, Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deliserdang
15	Molibdenum	<ul style="list-style-type: none"> • Aekkolbungnagodang, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailingnata
16	Niobium	<ul style="list-style-type: none"> • Aekhabil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah
17	Platina	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailingnata
18	Tellurium	<ul style="list-style-type: none"> • Bukit Pionggu, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailingnata
19	Seng	<ul style="list-style-type: none"> • Aektambang, Batanggadis, Batanglobung Kec Batangnata Kab Mandailingnata • Hutabargotjulu, AekSORIK, Pagargunung, Patahajang, Malilir, Bukit Pionggu, Gunungmarisi Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailingnata • Desa Parombunan, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah • Desa Simangambat, Kecamatan Saipardolokhole Kab Tapanuli Selatan • Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi • Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan • Kabupaten Dairi • Kabupaten Pakpak Bharat • Kabupaten Tapanuli Utara

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Padang Lawas Utara
20	Timbal	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gunungsitoli Kabupaten Nias • Batanggadis, Batanglobung, Aekhorsik Kec Batangnatal Kab Mandailing natal • Desa Pagargunung, Patahajang, Gunungmarisi Bukit Pionggu, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailingnatal • Aekhabil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah • Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara • Desa Sopokomil, Kecamatan SilimapunggapunggaKabupaten Dairi • Kecamatan SosaKabupaten Tapanuli Selatan • Kabupaten Padang Lawas Utara • Kabupaten Pakpak Bharat • Kabupaten Humbang Hasundutan
21	Wolfram	<ul style="list-style-type: none"> • Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah • Desa hatapang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara
22	Timah	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Labuhan Batu • Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2009

2) Bahan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan

Bahan tambang mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 28 jenis yang tersebar pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Bahan galian tersebut adalah bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, fosfat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan tersebar di seluruh kabupaten.

f. Bahan Galian Air Tanah

Lokasi kegiatan pertambangan bahan galian air tanah tersebar di 19 (sembilan belas) cekungan air tanah di Provinsi Sumatera Utara yaitu CAT Langsa; CAT Medan; CAT Kutacane; CAT Sibulus Salam; CAT Sidikalang; CAT Samosir; CAT Porsea-Prapat; CAT Tarutung; CAT Onolimbu; CAT Lahewa; CAT Sirombu; CAT Kuala Batangtoru; CAT Teluk durian; CAT Banjarampa; CAT Panyabungan; CAT Pasaribuhan; CAT Padangsidempuan; CAT Natal Ujung Gading; CAT Lubuk Sikaping.

f. Arahan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Budidaya industri terdiri dari industri kecil atau UMKM, industri menengah dan industri besar dalam suatu lokasi kawasan industri ataupun tersebar. Kawasan budidaya industri memiliki fungsi antara lain untuk memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya prasarana yang efisien, meningkatkan nilai tambah komoditas yang selanjutnya meningkatkan PDRB wilayah bersangkutan, mempermudah pengendalian dampak lingkungan yang mungkin timbul serta mendukung upaya penyediaan lapangan kerja.

Adapun arahan pengembangan industri di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 7.17.

Tabel 7.17.
Rencana Pengembangan Kawasan Industri di Provinsi Sumatera Utara

No.	NAMA	LOKASI		LUAS
	KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	(Ha)
I	Industri UMKM			
1	Kawasan Industri Tertentu	Nias Selatan	Teluk Dalam	50
2	Sentra Industri Kecil	Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	20
3	Lingkungan Industri Kecil (LIK), KI Tebing Tinggi; KI UMKM di Tebing Tinggi;	Tebing Tinggi	Padang Hulu	15
4	Kawasan Industri BWK I	Padangsidempuan	Padangsidempuan Utara	150
5	Kawasan Industri BWK II	Padangsidempuan	Padangsidempuan Tenggara	350
6	Kawasan Industri Berbasis Agro	Dairi	Silalahi Sabungan	
7	KI Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah Kota	Tanjung Balai;		
8	KI Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah Kota	Sibolga		
9	KI Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah Kota	Toba Samosir		
10	Kawasan Industri Kecil	Kota Medan	Amplas	
II	Industri Menengah dan Besar			
1	Kawasan Industri Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	Padang Hilir	127
2	Kawasan Industri	Labuhan Batu	Panai Hulu	272,25
3	Kawasan Industri Bagan Asahan	Asahan	Tanjung Balai	100
4	Kawasan Industri Lamhotma	Medan	Tanjung Morawa	
5	Kawasan Industri Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Percut Sei Tuan	
6	Kawasan Industri Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tanjung Morawa	
7	Kawasan Industri Medan Star	Deli Serdang	Tanjung Morawa	
8	Kawasan Industri Medan	Medan, Deli Serdang		
9	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Batu Bara	Kuala Tanjung	
10	KI Pematangsiantar (KIP)	Pematangsiantar	Siantar Marihat	
11	Kawasan Industri Pangkalan Susu	Langkat		
12	Kawasan Industri Sei Mangke (MP3EI)	Simalungun		
13	Kawasan Industri Pematangsiantar (KIP)	Pematangsiantar	Siantar Martoba	100
14	Kawasan Industri Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah	Kota Tanjung Balai	Sei Tualang Raso	300
15	Kawasan Industri Sidikalang	Dairi	Sidikalang	
16	Kawasan Industri Paluh Merbau	Deli Serdang	Percut Sei Tuan	2300

No.	NAMA	LOKASI		LUAS
	KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	(Ha)
17	Kawasan Industri Sei Bamban (MP3EI)	Serdang Bedagai		
18	Kawasan Industri Labuhan Angin	Tapanuli Tengah		
19	Kawasan Industri Kepulauan Nias	Nias		
III	Kawasan ekonomi Khusus dan Investasi			
1	Kawasan Ekonomi Khusus		Pantai Barat dan Pantai Timur	
2	Kawasan Perhatian investasi (Arahan MP3EI)			
	- Kawasan Sei Mangke	Simalungun		
	- Kawasan Batang Toru	Tapanuli Selatan		
	- Kawasan Dairi	Dairi		

Sumber : Disperindang, 2012

g. Arahan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan budidaya pariwisata dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pariwisata dengan memperhatikan Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya serta kawasan lainnya. Arahan Pengembangan kawasan pariwisata antara lain :

1. Pengembangan Pariwisata Alam

Wisata alam merupakan jenis wisata yang mengandalkan daya tarik keindahan bentukan alam, dapat berupa pantai, laut, danau, pegunungan, flora, fauna, dan lain sebagainya.

- a. Kawasan Danau Toba, dimana Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir dan sekeliling pantai kawasan Danau Toba terdapat air terjun (Sipiso-piso), pantai tepi danau dan pemukiman tradisional yang beragam termasuk Pantai Haranggaol Kabupaten Karo, serta arahan ke depan Kawasan Danau Toba sebagai Taman Bumi (*Geopark*) yang direncanakan titik pusat nya di Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir.
- b. Kawasan Dataran Tinggi Karo yang merupakan dataran tinggi luas di Sumatera Utara, hampir semua dataran tinggi ini termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Karo. Dataran Tinggi Karo juga merupakan dataran tinggi terluas di Indonesia. Letaknya yang dekat dengan pesisir timur Sumatra Utara menyebabkan dataran tinggi berhawa sejuk. Kota-kota wisata di dataran tinggi ini antara lain Brastagi dan Kabanjahe. Di kawasan dataran tinggi ini juga terdapat air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan.
- c. Paroppo di Kec Silahisabungan Kabupaten Dairi;
- d. Pegunungan di Kabupaten Phakpak Barat;
- e. Parapat, Haranggaol, Salbe, Silau ulu Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang, Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimakuta, Dolok Simarsolpah Kecamatan Raya Kahean di Kabupaten Simalungun;
- f. Tangga Seribu, Air Terjun, Desa Sipinsur Paranginan di Kabupaten Humbang Hasundutan;

- g. Ajibata, Agrowisata Rohani di Desa Lumban Rang Kecamatan Lumban Julu, Dolok Tolong, Balige, Silintong di Kabupaten Toba Samosir;
- h. Pemandian air panas pangurusan, Pusuk Buhit, Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipitudai, Kebun Raya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir
- i. Air Panas Sipoholon, Muara, Hutan Rakyat Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara;
- j. Danau Siombak Kota Medan.
- k. Pantai Klang, Kawasan Rekreasi Pantai di Pantai Cermin, Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai;
- l. Pantai Perupuk, Pantai Sejarah, di Kabupaten Batu Bara;
- m. Sibolangit, Kawasan Wisata Pulau Siba Kecamatan Hamparan Perak, di Kabupaten Deli Serdang;
- n. Bahorok, Bukit Lawang di Kabupaten Langkat;
- o. Lagundri, Sorake, Pantai Moale, Pulau Pulau Batu, di Kabupaten Nias Selatan;
- p. Air Panas Bombo Aukhu, Pantai Bozihona dan Kawasan Onolimbu, di Kabupaten Nias;
- q. Pulau Asu dan Kepulauan Hinako, di Kabupaten Nias Barat;
- r. Air Terjun dan Pantai Lahewa di Kabupaten Nias Utara;
- s. Pulau Mursala, Pulau Pandan, Pulau Poncan di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- t. Pantai Natal, Mandailing Natal
- u. Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Pariwisata Budaya

Merupakan jenis wisata dengan daya tarik budaya, dapat berupa peninggalan jaman dahulu, kawasan permukiman yang masih memelihara tradisi. Di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa objek wisata budaya diantaranya:

- a. Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Mesjid Raya, Mesjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, situs bersejarah kota Cina di Kota Medan;
- b. Stasiun Kereta Api Binjai;
- c. Kawasan situs bersejarah reliji Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- d. Kawasan situs bersejarah kota Rintang di Kabupaten Deli Serdang;
- e. Istana Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- f. Peninggalan Sultan Labuhan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- g. Peninggalan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas/Padanglawas Utara;
- h. Situs Benteng Portugis, Gua Jepang dan Gua Portugis di Kabupaten Mandailing Natal;
- i. Bangunan Cagar Budaya di Kota Sibolga;
- j. Makam Raja Simalungun Pematang Purba, Situs Batu Gajah di Kabupaten Simalungun;
- k. Makam Nommensen di Kabupaten Tapanuli Utara;
- l. Makam Sisingamangaraja XII, Rumah Bolon di Kabupaten Toba Samosir;
- m. Istana Sisimangaraja di Bakkara, Tempat Gugurnya Sisingamangaraja XII Desa Sionom Hudon di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- n. Batu Hogon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Sialagan Ambarita, Rumah Tradisonil Simanindo, Perkampungan Tua Suku Batak Harian Boho di Kabupaten Samosir;
- o. Situs Batu Sumbang, Batu Mejan di Kabupaten Dairi;

- p. Rumah Tradisionil di Kabupaten Phakpak Barat;
- q. Pemukiman Tradisional Desa Lingga, Desa Dokan, Peceren, Perkampungan Tradisionil di Kabupaten Karo;
- r. Istana Lima Laras, Meriam Kuno di Kabupaten Batu Bara;
- s. Situs Istana Kota Galuh di Kabupaten Serdang Bedagai; Gua Kemang di Kabupaten Deli Serdang;
- t. Masjid Azizi, Rumah Peninggalan Sultan Siak, Situs Komplek Istana Sultan Aziz di Kabupaten Langkat;
- u. Makam bersejarah Nias di Desa Ono Namolo I Lot dan Peninggalan Megalit di Kota Gunungsitoli;
- v. Peninggalan Megalit Kecamatan Gomo, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo, Silima Ewali Majingo di Kabupaten Nias Selatan.

3. Pariwisata Minat Khusus

Wisata minat khusus merupakan wisata dengan daya tarik aktivitas tertentu seperti olahraga, rohani, pendidikan dan lain sebagainya. Pengembangan wisata minat khusus antara lain:

- a. Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar;
- b. Arung Jeram di Sei Asahan - Tobasa dan Sei Binge, Sei Wampu di Langkat;
- c. Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Wisata menyelam di Perairan Pulau Pulau Batu di Nias Selatan
- d. Olahraga Air di Pulau Asu, Nias Barat
- e. Olah Raga Paralayang di Sitopsi;
- f. Wisata Rohani di Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara;
- g. Taman Wisata Iman di Kabupaten Dairi;
- h. Kawasan Rekreasi Pantai di Kecamatan Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai;
- i. Rekreasi Pegunungan dan Taman Hiburan di Sibolangit, di Kabupaten Deli Serdang;
- j. Museum pusaka Nias di Kota Gunungsitoli;
- k. Museum sejarah Batak di Balige, Kabupaten Toba Samosir

h. Arahana Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan non perkotaan atau pedesaan di dataran rendah dan dataran tinggi, kawasan pesisir pantai dan pulau kecil. Sebagaimana peruntukannya, kawasan permukiman memiliki fungsi antara lain pusat pelayanan dalam skala yang dilayaninya, sebagai tempat tinggal bermukim dan pusat kegiatan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam interaksi sosialnya

Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan bagi kawasan permukiman antara lain yaitu :

- a. Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 - 25%);
- b. Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang memadai. Untuk penyediaan air bersih, memiliki suplai air antara 60 - 100 liter/org/hari;
- c. Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi);
- d. Memiliki jaringan drainase baik sampai sedang;
- e. Tidak berada pada wilayah sempadan sungai, pantai, waduk, danau, mata air, saluran pengairan, rel kereta api dan daerah aman jalur penerbangan;
- f. Tidak berada pada kawasan lindung;
- g. Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/penyangga;
- h. Menghindari sawah irigasi teknis.

i. Arahana Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Pengembangan kawasan pesisir dan kelautan diarahkan pada :

1. Mempertahankan kawasan fungsi lindung di sekitar pantai di Asahan, Langkat, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal dan Nias.
2. Mengembangkan kawasan mangrove untuk mendorong daya dukung perikanan laut.
3. Pengembangan dan meningkatkan produksi perikanan tangkap laut di pantai Timur, pantai Barat serta Pulau Nias dan pulau lainnya terutama pada Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia.
4. Pengembangan kegiatan pertambakan dan pertambakan rakyat yang berwawasan lingkungan di pantai barat dan di pantai timur.
5. Pengembangan kawasan wisata bahari termasuk pengembangan promosi pariwisata di Pulau Nias, Medan, Deli Serdang, Tapanuli Tengah dan Sibolga.
6. Mengembangkan sarana dan prasarana bagi peningkatan kegiatan perikanan meliputi pelabuhan perikanan, prasarana transportasi dari lokasi sumberdaya laut ke lokasi koleksi dan distribusi, sarana transportasi laut, jaringan irigasi tambak, alat penangkapan ikan, pakan, pupuk, pengelolaan pembibitan ikan terpadu, tempat pelelangan ikan di kawasan pantai Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Asahan, Tanjungbalai, Labuhan Batu, Sibolga, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Nias dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang tersebar di Pantai Timur maupun Pantai Barat Sumatera Utara, diantaranya adalah di Kabupaten Langkat: PPI Pangkalan Susu, PPI Pangkalan Berandan, PPI Kuala Gebang; di Kota Medan : PPI Kampung Nelayan, PPI Bagan Deli; di Kabupaten Deli Serdang : PPI Percut Sei Tuan, PPI Hamparan Perak, PPI Pantai Labuh; di Kabupaten Serdang Bedagai: PPI Tanjung Beringin, PPI Sialang Buah, PPI Bandar Khalipah; di Kabupaten Batu Bara : PPI Pangkalan Dodek, PPI Tanjung Tiram; di Kota Tanjung Balai : PPI Pacak Kerang; di Kabupaten Asahan : PPI Rantau Panjang, PPI Sei Kepayang; di Kabupaten Labuhan Batu : PPI Sei Berombang; di Kabupaten Tapanuli Tengah: PPI Sorkam, PPI Barus; di Kota Sibolga: PPI Sarudik; di Kota Mandailing Natal: PPI Batahan, PPI Natal, PPI Sikara-Kara; Kota Gunung Sitoli : PPI Gunung Sitoli; Kabupaten Nias Selatan : PPI Teluk Dalam, PPI Pulau Telo.
7. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di sentra-sentra perikanan melalui melalui pengembangan teknologi penangkapan ikan dan pengolahan hasil tangkapan ikan yang lebih baik tanpa mengganggu atau merusak ekosistem laut.
8. Meningkatkan prasarana dan sarana bagi permukiman nelayan.
9. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pelabuhan ekspor impor di Belawan.
10. Meningkatkan pengamanan kawasan laut dari pencurian ikan serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir laut dan pulau – pulau kecil.

j. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya lainnya

Rencana pengembangan peruntukan budidaya lainnya meliputi kawasan pertahanan keamanan dan kawasan lainnya. Untuk menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas) yang stabil dan mantap, maka perlu ditetapkan kawasan-kawasan yang bersifat strategis bagi kepentingan hankamnas. Arah pengembangan kawasan strategis hankamnas dimaksudkan bagi menjamin kondisi pertahanan dan keamanan nasional yang stabil dan mantap dan mendorong terciptanya penataan ruang yang serasi antara kepentingan strategis hankamnas dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara merupakan pantai yang relatif landai dan berada pada jalur pelayaran internasional yang padat. Oleh karenanya, kawasan tersebut rawan terhadap invasi pihak asing, terutama di kawasan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi memanjang antara Sei Denai dan Bedagai. Selain itu, kawasan Pantai Timur juga rawan terhadap penyelundupan barang-barang dari luar negeri.

Arahan lokasi yang diperuntukkan dalam kepentingan Hankamnas di Provinsi Sumatera antara meliputi :

- a. Pendaratan Pasukan yang berada di Pangkalan Susu Langkat, Pantai Cermin dan Pulau Berhala Serdang Bedagai, Tanjung Tiram Asahan, Pantai Barus dan Pantai Pandan Tapanuli Tengah.
- b. Kawasan Pangkalan Perlawanan berada di Kecamatan Raya Simalungun, Kecamatan Sipiongot Tapanuli Selatan.
- c. Daerah Latihan Militer berada di Naga Huta Pematangsiantar, Aek Natolu Toba Samosir dan Tanjung Dolok Simalungan.
- d. Penguasaan teritorial di Pantai Barat Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh Selatan.
- e. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I di Medan Belawan.
- f. Pusat Latihan Militer Angkatan Laut di Paluh Kurau Deli Serdang.
- g. Pos Pengamat Pulau Terluar Lantamal I di Pulau Berhala Kabupaten Deli Serdang.
- h. Markas strategi daerah Lantamal di Belawan, Bandar Khalifah, Pangkalan Susu, Bagan Asahan.
- i. Pangkalan udara Polonia,
- j. Pulau Heruanga, Nias Barat,
- k. Pulau Simuk, Nias Selatan,
- l. Pulau Wunga, Nias Utara.